

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penelitian dalam penulisan disertasi ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif untuk menafsirkan fenomena dengan cara menjelaskan secara detail dalam hal ini bagaimana berlangsungnya *effectiveness network governance* (efektivitas tata kelola jaringan) dalam penanganan pascabencana di Kota Palu. Teknik analisis data dibagi ke dalam beberapa tahapan, oleh Creswell, (2015) yaitu proses klasifikasi data dan perencanaan data yang dipakai menginterpretasikan makna dari data yang diperoleh. Selanjutnya dilakukan pendeskripsian tentang masing-masing data yang diperoleh serta proses menerjemahkan bagaimana data yang diperoleh akan dinarasikan secara deskriptif, sehingga dapat memudahkan pembaca dalam memahaminya.

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan disertasi ini adalah metode induktif yaitu proses pengambilan keputusan dimulai dari hal-hal yang bersifat khusus menuju umum. Istilah ini dikenal dengan generalisasi. Metode ini membuat pernyataan umum berdasarkan observasi yang spesifik. Sederhananya, terdapat bermacam data, kemudian selanjutnya dibuat sebuah kesimpulan berdasarkan data tersebut. Metode ini digunakan karena penelitian ini berdasar pada beberapa konsep dan teori terkait efektivitas tata kelola jaringan yang

berkembang pesat saat ini. Selanjutnya akan direduksi ke dalam beberapa pertanyaan penelitian, fokus Penelitian dan kerangka konseptual. Creswell (2010:98) mengemukakan bahwa teori dalam penelitian kualitatif dapat muncul terlebih dahulu, dapat dimodifikasi atau dilakukan penyesuaian tersebut berdasarkan pendapat dari informan.

3.2. Fokus dan Deskripsi Penelitian

Batasan dalam penelitian merupakan hal yang penting untuk mendekatkan pokok permasalahan yang menjadi pembahasan, hal ini juga untuk memberikan batasan pada ruang lingkup permasalahan yang luas sehingga fokus penelitian memiliki arah dan tujuan yang jelas. Adapun yang menjadi fokus pada penelitian ini adalah penyelenggaraan pemulihan bencana pada tahap pascabencana meliputi:

- a. Rehabilitasi, yaitu pemberian bantuan perbaikan rumah masyarakat, perbaikan lingkungan daerah bencana, pemulihan sosial psikologis, perbaikan prasarana umum, pemulihan ketertiban dan keamanan, pemulihan fungsi pelayanan publik, pemulihan fungsi pemerintahan, rekonsiliasi dan resolusi konflik, pelayanan kesehatan, pemulihan sosial, ekonomi dan budaya.
- b. Rekonstruksi, yaitu pembangkitan kembali kehidupan sosial budaya masyarakat, pembangunan kembali prasarana dan sarana, pembangunan kembali sarana sosial masyarakat, penerapan rancang bangun yang tepat dan penggunaan peralatan yang lebih dan tahan bencana, peningkatan kondisi ekonomi, sosial, dan budaya, partisipasi

dan peran organisasi dan lembaga kemasyarakatan, dunia usaha dan masyarakat, peningkatan fungsi pelayanan publik, dan peningkatan pelayanan utama di masyarakat.

Sementara untuk teori yang digunakan sebagai konsep atau metode yang digunakan dalam membantu peneliti dalam mendeskripsikan data-data yang dihasilkan dari lapangan adalah *effectiveness network* dengan menggunakan 4 (empat) *key factor* (faktor kunci) dalam jaringan sebagai berikut :

1. Komposisi Jaringan

Ada dua faktor utama dalam komposisi jaringan yang terdiri dari ukuran aktor dan keragaman aktor. Jaringan yang efektif harus cukup besar untuk membawa beban tetapi tidak terlalu besar untuk dikelola dan memiliki tujuan bersama. Tergantung pada tujuan jaringan, mungkin perlu ada lebih banyak keragaman aktor, yaitu lebih banyak keragaman dan sumber daya serta kemampuan yang dimiliki.

- a. Ukuran aktor adalah seberapa banyak aktor yang terlibat dan peran serta aktor dalam jaringan penanggulangan pascabencana di Kota Palu
- b. Keragaman aktor adalah melakukan penilaian latar belakang aktor yang terlibat dalam jaringan serta sumber daya dan kemampuan yang dimilikinya.

2. Struktur Tata Kelola Jaringan

Struktur tata kelola jaringan mencakup model tata kelola jaringan, aturan, dan proses pengambilan keputusan. Struktur ini sering ditentukan pada fase desain jaringan tetapi kemudian disesuaikan pada tahap jaringan yang berbeda.

a. Model Tata Kelola

Tata kelola manajemen strategis jaringan melibatkan pembentukan organisasi formal yang berisi semua anggota jaringan yang terlibat. Mode tata kelola yang tepat untuk jaringan kerja bergantung pada beberapa faktor, termasuk ukuran, tujuan, tugas, dan kepercayaan.

b. Aturan Kerjasama

Agar jaringan berfungsi secara efektif, kesepakatan kerja sama yang jelas dan aturan formal untuk kolaborasi perlu dibuat dan diterapkan. Aturan dan kesepakatan bisa formal atau informal. Semakin tinggi tingkat kepercayaan dalam suatu jaringan, semakin rendah kebutuhan akan aturan dan kontrak yang diformalkan. Formalisasi meningkatkan presisi dan keadilan, tetapi jika terlalu banyak formalisasi akan menyebabkan hubungan kerja sama tidak fleksibel dan bersifat kaku.

c. Mekanisme Pengambilan Keputusan

proses pengambilan keputusan harus dibagi dan adil, Karena anggota jaringan adalah mitra dari pada atasan dan bawahan, mereka mencapai kesepakatan dengan konsensus dari pada memaksakan keputusan.

3. Proses Manajerial

Koordinasi tugas dan kegiatan pada tingkat jaringan diperlukan untuk efektivitas jaringan sehingga kegiatan perlu diatur. Mekanisme manajemen yang memadai memastikan bahwa hasil jaringan tercapai.

a. Strategi dan Tujuan.

Untuk mengelola jaringan secara efektif, strategi keseluruhan perlu dikembangkan pada tingkat jaringan. Pengembangan strategi ini meliputi pengembangan Visi dan Misi yang jelas, penetapan tujuan dan sasaran bersama, serta definisi yang jelas dari hasil yang dicapai. Peserta jaringan lebih mungkin untuk terlibat dan berkomitmen pada jaringan jika ada konsensus umum tentang tujuan tingkat jaringan yang luas.

b. Transparansi Komunikasi

Faktor kunci lain dari manajemen jaringan adalah komunikasi yang jelas dan transparan. Termasuk penyediaan semua informasi antar peserta jaringan dengan meningkatkan pertukaran informasi antara peserta.

4. Faktor Relasi

Faktor kunci relasional ini didasarkan pada budaya serta perilaku peserta jaringan karena akan mempengaruhi atmosfer dan hasil dari jaringan itu sendiri.

a. Kepercayaan

Kepercayaan merupakan keyakinan yang membuat mitra dalam jaringan semakin andal dan berintegritas, hal ini dianggap membuat dinamisme dalam jaringan lebih efisien dan efektif, karena semakin kuat kepercayaan dalam jaringan maka akan semakin besar kemampuan untuk mencapai tujuan jaringan.

b. Harmoni dan Komitmen

Faktor kunci lain dalam jaringan yang mengacu kepada hubungan antar peserta adalah harmoni. Tingkat harmoni yang tinggi akan meningkatkan efektivitas jaringan. Harmoni digambarkan sebagai pemahaman tentang memberi dan menerima dan kesiapan untuk menerima sudut pandang masing-masing peserta jaringan. Mengembangkan kepentingan bersama diantara anggota jaringan dengan melibatkan aktor dalam perencanaan dan koordinasi dalam mengatasi dan mengelola konflik.

c. Gaya Kepemimpinan

Berbeda dengan manajer dalam organisasi, maka manajer dalam jaringan tidak dapat menggunakan otoritas atau perintah dari atas kebawah, meskipun demikian mereka tetap bertanggung jawab atas keputusan dan hasil dari jaringan. Manajer jaringan yang ideal seharusnya memiliki kewenangan serta kompetensi yang dimiliki oleh manajer proyek. Mampu mengadopsi sinkronisasi dan proses pengambilan keputusan diambil secara partisipatif dan tidak memihak. Memiliki kemampuan menginspirasi dan memotivasi orang lain

membangun visi bersama untuk secara bebas terlibat dalam tugas jaringan.

3.3. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kota Palu Provinsi Sulawesi Tengah. Lokasi ditetapkan berdasarkan pada perkembangan kajian ilmu administrasi publik dengan mempertimbangkan beberapa hal sebagai berikut :

1. Kota Palu merupakan salah satu daerah yang memiliki potensi bencana yang besar dan memiliki kecenderungan untuk berulang (siklus).
2. Dari 3 Kabupaten dan 1 Kota yang terdampak bencana alam, pada 28 September 2018, Kota Palu yang mengalami kerusakan/dampak paling parah baik dari segi korban jiwa maupun kerusakan infrastruktur yang masif.
3. Sejak bencana terjadi sampai saat ini upaya dalam penanganan dan pemulihan pascabencana masih banyak mengalami permasalahan yang belum terselesaikan.

3.4. Sumber Data Penelitian

Data akan dikumpulkan melalui beberapa cara dan tahapan. Pertama, *in depth interview* dengan Kepala Pelaksana BPBD Kota Palu dan stakeholder lainnya yang terlibat dalam jaringan penanganan pascabencana di Kota Palu. Kedua, Observasi melalui keikutsertaan langsung serta menganalisis jejaring penanganan pascabencana di Kota

Palu untuk memperoleh data sebagai bahan analisa. Dalam observasi ini peneliti melihat bagaimana para aktor atau organisasi dalam melakukan kegiatan jaringan dalam menangani upaya pemulihan pascabencana di Kota Palu. Dokumentasi yang diperoleh berupa risalah rapat tentang pertemuan antar aktor dalam pembahasan penanggulangan pascabencana serta data lain yang terkait.

Informan yang menjadi narasumber dalam penelitian ini adalah aktor-aktor dalam jaringan yang saling bekerja sama dalam penanganan pascabencana di Kota Palu, adapun alasan penulis memilih informan karena aktor-aktor yang saling bekerja sama dan saling berinteraksi terlibat langsung dalam jaringan penanganan pascabencana. Berikut adalah informan penelitian ini :

Tabel 3. 1: Daftar Informan Penelitian

NO	LEMBAGA/INSTITUSI
1	BPBD Kota Palu
2	Dinas PU Kota Palu
3	Dinas Perumahan dan Pemukiman Kota Palu
4	Dinas Sosial
5	Bappeda Kota Palu
6	Balai Prasarana dan Permukiman Wilayah Sulawesi Tengah

NO	LEMBAGA/INSTITUSI
7	Dinas Lingkungan Hidup
8	Akademisi Universitas Tadulako
9	Sulteng Bergerak
10	Solidaritas Korban Pelanggaran. SKP – HAM
10	Pusat Kajian Bencana Universitas Tadulako
12	Warga Terdampak Bencana

Sumber data sekunder digunakan untuk mendukung data primer, yaitu melalui studi pustaka, dokumentasi, buku, majalah, surat kabar, dan dokumen tertulis yang terkait dengan subjek yang akan dikaji dalam penelitian ini. Sumber data sekunder secara tidak langsung memberikan data kepada peneliti, misalnya melalui orang atau dokumen. Sugiyono, (2015). Data sekunder ini akan memudahkan peneliti dalam mengumpulkan data serta melakukan analisis dari hasil penelitian, yang dapat menguatkan fakta temuan sehingga akan memperoleh data penelitian dengan tingkat validitas yang baik.

3.5. Teknik Pengumpulan Data

Kegiatan pengumpulan dan analisis data merupakan tahap pelaksanaan dari proses penelitian. Pengumpulan dan analisis data penelitian didasarkan pada suatu metode atau prosedur sehingga data yang diperlukan dapat dikumpulkan secara lengkap dari lapangan. Pengumpulan data dilakukan untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan dalam rangka mencapai tujuan penelitian. Adapun teknik pengumpulan data adalah cara yang digunakan dalam penelitian untuk memperoleh data di lapangan. Dalam penelitian sosial, ada beberapa teknik yang umum dilakukan, yaitu :

1. Studi Pustaka,

Penelitian pustaka akan memperkuat latar belakang dilakukannya sekaligus menjelaskan suatu penelitian yang memungkinkan kita untuk belajar dari penelitian yang dilakukan sebelumnya sehingga dapat menghasilkan penelitian baru. Teknik studi pustaka ini dimaksudkan untuk mengumpulkan data-data yang bersumber dari buku, jurnal atau tulisan ilmiah, seperti: majalah, brosur dan artikel ilmiah yang berhubungan dengan penulisan ini, serta sumber lain yang memiliki relevansi dengan penelitian model efektivitas jaringan dalam pemulihan pascabencana di Kota Palu.

2. Wawancara

Wawancara digunakan untuk menggali informasi atau persepsi subjektif dari informan terkait topik yang ingin diteliti. Peneliti akan

menyusun serta menyiapkan pertanyaan dalam bentuk pedoman wawancara terlebih dahulu. Serupa dengan kuesioner, pertanyaan wawancara perlu diuji kemampuannya supaya peneliti dapat memperoleh data yang dibutuhkan. Teknik wawancara tidak berstruktur merupakan wawancara yang dilakukan berdasarkan pada suatu pedoman atau catatan yang hanya berisi butir-butir atau pokok-pokok pemikiran mengenai hal-hal yang akan ditanyakan pada waktu wawancara berlangsung. Pedoman ini disebut pedoman wawancara. dengan teknik ini pewawancara mempunyai kebebasan dalam merumuskan dan menanyakan butir atau pokok yang tertera dalam pedoman wawancara kepada responden. Wawancara akan dilakukan kepada aktor yang bekerja dan terlibat dalam jaringan penanganan pascabencana di Kota Palu.

3. Observasi.

Peneliti melaksanakan pengamatan pada lokasi terhadap objek penelitian yang akan diamati menggunakan panca indra. Peneliti diposisikan sebagai pengamat atau orang luar. Untuk pengumpulan data menggunakan pendekatan teknik observasi ini, peneliti akan menggunakan alat berupa catatan ataupun perekam. Untuk mendapatkan masukan pada objek yang di observasi, yaitu kegiatan dan perilaku dari aktor yang terlibat dalam efektivitas jaringan dalam penanganan pascabencana di Kota Palu. Observasi dilakukan dengan menggunakan catatan lapangan untuk merekam proses dan aktivitas

dalam jaringan penanganan bencana yang terjadi dan tampak dalam kegiatan pengamatan.

3.6. Teknik Analisa Data

Data dianalisa menggunakan teknik analisis kualitatif. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini mengacu pada pendapat Sarantakos (1993) yang menyebutkan jika inti dari teknik analisis data kualitatif terdiri dari tiga bagian yang saling berkaitan atau bersifat siklikal, yaitu: (1) mendeskripsikan fenomena. (2) mengklasifikasikan fenomena dan (3) melihat bagaimana konsep - konsep yang muncul itu satu dengan lainnya berkaitan. Prosedur analisis data dalam penelitian ini meliputi beberapa tahapan, yaitu:

1. Identifikasi dan pemetaan peserta organisasi yang terlibat dalam jaringan yang bisa memberikan informasi tentang penanganan pascabencana di Kota Palu;
2. Komposisi kategori peran masing-masing aktor dan menggambarkan hubungan antar aktor;
3. Mengenali ciri-ciri pola jaringan yang terbentuk dengan visualisasi pola jaringan;
4. Mengklasifikasikan dan menjelaskan faktor-faktor penentu efektivitas jaringan;
5. Menafsirkan dan mengembangkan pola jaringan antar organisasi yang terlibat;
6. Menarik kesimpulan berdasarkan hasil tahap sebelumnya.

Khusus untuk analisis pola jaringan, data yang digunakan adalah data relasional, Seperti yang dikatakan Scott (2000: 3), analisis jaringan lebih cocok menggunakan data relasional, di mana data relasional adalah kontak, ikatan, dan koneksi yang menghubungkan satu aktor dengan yang lain. Dalam pandangannya, hubungan adalah sistem di bentuk oleh hubungan antara agen/peserta yang menggambarkan struktur yang lebih besar sehingga dapat menunjukkan bagaimana pola jaringan terbentuk. data hubungan dicapai dengan membedakan frekuensi antara hubungan peserta, yaitu, "sering" digunakan untuk interaksi dua kali atau lebih; interaksi satu kali "jarang" dan bagi mereka yang tidak memiliki interaksi sama sekali "tidak ada" bahkan jika mereka berinteraksi secara langsung.

1. *Data Reduction* (Reduksi Data).

Data yang diperoleh dari laporan yang jumlahnya cukup banyak, maka dari itu perlu dicatat secara teliti serta dengan rinci. Mereduksi data artinya merangkum, lalu memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, kemudian mencari tema dan polanya. Kegiatan mereduksi data yang akan dilakukan dalam penelitian ini yaitu: perekapan hasil wawancara, pengamatan serta dokumentasi baik yang berhasil direkam melalui alat perekam ataupun catatan-catatan lapangan serta hasil pengumpulan dokumen yang berhubungan dengan fokus penelitian. Pada penelitian efektivitas jaringan pemulihan bencana di Kota Palu ini, data yang diperoleh kemudian nantinya dipilih, diseleksi lalu difokuskan pada hal-hal yang

berkaitan dengan permasalahan yang ditemukan dalam kegiatan pemulihan pascabencana yang nantinya akan dievaluasi (Sugiyono, 2010).

2. *Data Display* (Penyajian Data)

Dalam penelitian kualitatif, penyajian data umumnya dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, ataupun sejenisnya. Data ditampilkan dalam bentuk uraian, tabel, gambar ataupun foto. Namun yang paling banyak digunakan di dalam penyajian data dalam penelitian kualitatif ini ialah teks yang mana dapat menggambarkan bagaimana permasalahan mengenai efektivitas jaringan organisasi aktor dalam kegiatan pemulihan pasca bencana di Kota Palu (Sugiyono, 2010).

3.7. Validasi Data Temuan

Validitas adalah derajat ketetapan antara data eksisting pada obyek penelitian dengan data yang didapatkan saat penelitian dilakukan. Menurut Sugiyono (2011) Manfaat dari uji validitas ini adalah untuk meningkatkan kepercayaan data yang diperoleh. Validasi data menjadi dasar agar hasil penelitian memiliki dasar yang kuat dan akurat sebagai penelitian yang ilmiah. Oleh Sukmadinata, (2009). Validitas akan menunjukkan sejauh mana tingkat interpretasi dan konsep-konsep yang diperoleh memiliki makna yang sesuai antara sumber informasi dengan peneliti. Menurut Bungin (2010) secara umum dikenal ada dua macam standar validitas, yaitu validitas internal dan eksternal. Sebagai teknik pengumpulan data, triangulasi juga dikenal sebagai teknik pengumpulan data dengan

menggabungkan berbagai teknik pengumpulan data dari sumber data yang ada.

Triangulasi adalah penyilangan data yang telah diperoleh dari sumbernya. Oleh karenanya hanya informasi dan data yang valid saja yang dipakai untuk menarik kesimpulan dan hasil penelitian, triangulasi dimanfaatkan tidak hanya untuk menemukan fakta terhadap beberapa fenomena, tetapi lebih pada peningkatan pemahaman peneliti terhadap apa yang telah ditemukan (Sugiyono, 2015).

Model triangulasi data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

- a). *Triangulasi Sumber*, yaitu dipakai untuk melihat keabsahan data dengan cara menguji data yang sudah diperoleh dari berbagai sumber. keabsahan data dilakukan untuk memperoleh data dan informasi yang sama, maka peneliti melakukan perbandingan dengan melakukan konfirmasi terhadap data dan informasi yang diperoleh kemudian dilanjutkan dengan klasifikasi, pendeskripsian untuk mengetahui perspektif mana yang sama, mana yang beda serta mana yang lebih detail dan mana yang tidak sesuai dengan data tersebut. Untuk mendapatkan data yang berbeda dengan hasil yang akurat maka peneliti melakukan wawancara terhadap para aktor yang terlibat dalam jejaring penanganan bencana untuk memperoleh keabsahan informasi.
- b.) *Triangulasi Metode*, peneliti melakukan penelitian untuk melengkapi kekurangan informasi yang diperoleh dengan cara

crosscheck kepercayaan data kepada sumber yang sama dengan metode tertentu. Peneliti membandingkan melalui data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara, kemudian diperkuat dengan dokumentasi dan melalui teori yang terkait dengan topik penelitian efektivitas jaringan dalam penanganan bencana.

- c.) *Triangulasi Waktu*, menggunakan waktu untuk menguji keabsahan data dengan melakukan pengamatan dan wawancara dalam waktu dan situasi yang berbeda tujuan dari triangulasi waktu adalah untuk mengetahui keakuratan data yang diperoleh selama wawancara dan observasi lapangan.

BAB IV

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

4.1 Gambaran Umum Kondisi Daerah

Berdasarkan Undang – Undang Nomor 4 Tahun 1994 Tentang Pembentukan Kota Madya Daerah Tingkat II Palu. Kota Palu ditetapkan sebagai ibu kota Provinsi Sulawesi Tengah dengan wilayah seluas 395,06 kilometer persegi, dalam struktur tata ruang Kota Palu juga ditunjuk sebagai PKN (Pusat Kegiatan Nasional). Secara umum, Kota Palu disebut sebagai kota lima dimensi, sebab berpadunya unsur alami gunung, pantai, lembah, sungai dan bukit dalam satu lanskap hamparan yang utuh.

4.1.1 Luas dan Batas Wilayah Administrasi

Wilayah Kota Palu secara administratif terbagi atas delapan kecamatan dan empat puluh enam kelurahan. Kecamatan terluas adalah Kecamatan Mantikulore yaitu seluas 206,80 km² (52,35%) dan kecamatan terkecil adalah Kecamatan Palu Timur yaitu seluas 7,71 km² (1,95%). Luas Wilayah Kota Palu secara rinci berdasarkan wilayah kecamatan tergambar dalam Tabel 4.1 di berikut ini :

Tabel 4. 1 Luas Wilayah Kota Palu Menurut Kecamatan Tahun 2019

No.	Kecamatan	Luas (KM ²)	Persentase
1.	Palu Barat	8,28	2,10
2.	Tatanga	14,95	2,78
3.	Ulujadi	40,25	10,19
4.	Palu Selatan	27,38	6,93
5.	Palu Timur	7,71	1,95
6.	Mantikulore	206,8	52,35
7.	Palu Utara	29,94	7,58
8.	Tawaeli	59,75	15,12
	Total Luas Kota Palu	395,06	100,00

Sumber: Kota Palu Dalam Angka, Tahun 2020

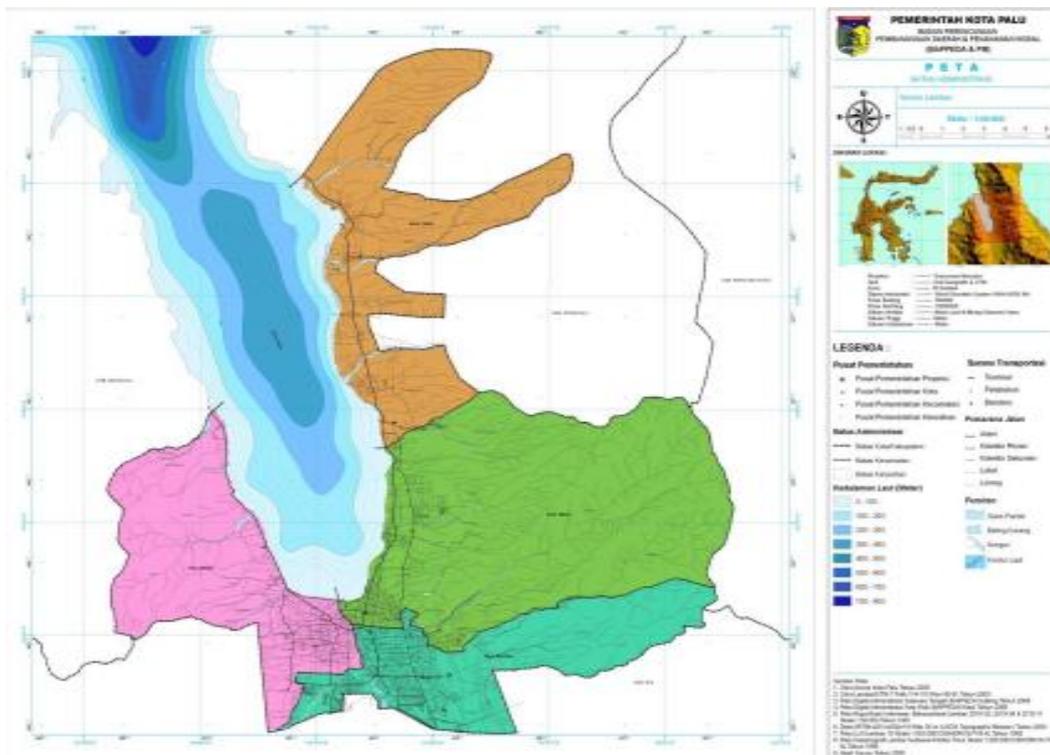
Kota Palu berada di sekitar garis Khatulistiwa, dari 46 kelurahan sebagian besar kelurahan berada pada daratan lembah Palu yaitu sebanyak 29 (dua puluh sembilan) kelurahan, 17 (tujuh belas) kelurahan lainnya berada di sepanjang Pantai Teluk Palu. Secara administratif batas-batas wilayah Kota Palu adalah sebagai berikut:

1. Sebelah Utara : Kecamatan Tanantovea Kabupaten Donggala;
2. Sebelah Selatan : Kecamatan Marawola dan Kecamatan Sigi Biromaru, Kabupaten Sigi;
- Sebelah Barat : Kecamatan Kinovaro dan Kecamatan Marawola Barat Kabupaten Sigi, dan Kecamatan Banawa Kabupaten Donggala;

Sebelah Timur : Kecamatan Parigi Kabupaten Parigi Moutong,
dan Kecamatan Tanantovea Kabupaten
Donggala.

4.1.2 Letak dan Kondisi Geografis

Kota Palu yang berada pada kawasan dataran lembah Palu dan teluk Palu, secara astronomis terletak antara 0°,36" - 0°,56" Lintang Selatan dan 119°,45" - 121°,1" Bujur Timur. Luas wilayah Kota Palu, adalah 395,06 km² yang berada pada kawasan dataran lembah Palu dan teluk Palu. Letak wilayah Kota Palu menurut kecamatan tergambar pada peta Kota Palu sebagaimana Gambar 4.1. berikut ini:



Sumber: RTRW kota palu, 2010-2030

Gambar 4 1
Peta Administrasi Wilayah Kota Palu

4.1.3 Kondisi Topografi

Topografi wilayah Kota Palu adalah datar sampai berombak-ombak dengan beberapa daerah yang berlembah. Keadaan topografi secara tak langsung merupakan kendala aktif atas penggunaan lahan. Tampak daerah dataran merupakan pusat dari berbagai sektor kehidupan, seperti misalnya permukiman, perkotaan, persawahan dan kebun palawija. Sedangkan daerah perbukitan dan pegunungan umumnya merupakan kawasan yang dimanfaatkan sebagai kebun-kebun, tanah tegalan, perkebunan permanen, hutan produksi dan hutan lindung, serta Taman Hutan Raya (TAHURA).

Hasil analisis terhadap peta topografi diperoleh klasifikasi kemiringan lereng terdapat di wilayah Kota Palu sebagai berikut :

1. Daerah dataran berkemiringan lereng kurang dari 0% - 8% dan 8% - 15%, meliputi seluruh wilayah kecamatan yang tersebar di wilayah Kota Palu, termasuk semua kelurahan yang ada di dalamnya;
2. Daerah landai dengan kemiringan lereng antara 15% - 25%, meliputi seluruh wilayah kelurahan yang tersebar di 4 kecamatan Kota Palu;
3. Daerah agak terjal berkemiringan lereng 25% - 40%, meliputi wilayah yaitu di wilayah kelurahan Kawatuna, Poboya, Lasoani, Vatutela, kebun kopi, Buluri, Watusampu, Kabonena, dan Donggala Kodi dan lain-lain.
4. Daerah terjal berkemiringan lereng > 40%, meliputi wilayah Pegunungan pada wilayah Timur, Utara dan Barat Kota Palu yaitu di wilayah kelurahan Kawatuna, Poboya, Lasoani, Vatutela, Kebun Kopi, Buluri dan Watusampu.

Secara umum wilayah Kota Palu dapat dibagi menjadi tiga zona ketinggian, yaitu:

1. Sebagian daerah bagian barat sisi timur memanjang dari utara ke selatan, bagian timur arah utara dan bagian utara sisi barat yang memanjang dari utara ke selatan merupakan dataran rendah/pantai dengan ketinggian antara 0-100 meter di atas permukaan laut (mdpl).
2. Daerah bagian barat sisi barat dan selatan, daerah bagian timur ke arah selatan dan bagian utara ke arah timur dengan ketinggian antara 100-500 meter di atas permukaan laut (mdpl).
3. Daerah pegunungan dengan ketinggian lebih dari 100 meter di atas permukaan laut (mdpl).

4.1.4 Jumlah dan Persebaran Penduduk

Kota Palu sebagai ibukota Provinsi Sulawesi Tengah dengan luas 395,06 km², didiami penduduk sebanyak 370.376 jiwa. Penduduk ini tersebar di 8 Kecamatan yaitu Kecamatan Palu Utara, Palu Timur Palu Selatan dan Palu Barat, Kecamatan Tatanga, Kecamatan Ulujadi, Kecamatan Mantikulore dan Kecamatan Tawaeli. Jumlah penduduk terbesar terdapat di Kecamatan Palu Selatan sebanyak 72.137 jiwa (19,52%) sedangkan Kecamatan Tawaeli memiliki jumlah penduduk terkecil yaitu 23.289 jiwa (6,30%).

Tabel 4. 2 Distribusi Penduduk Menurut Kecamatan dan Jenis Kelamin, Kota Palu, Tahun 2019

Kecamatan	Laki-laki		Perempuan		Jumlah	
	N	%	N	%	N	%
Palu Timur	23.572	12,64	23.796	12,94	47.368	12,79
Palu Barat	25.931	13,91	25.453	13,84	51.384	13,87
Palu Utara	12.035	6,46	11.785	6,41	23.820	6,43
Palu Selatan	36.021	19,32	35.569	19,34	71.590	19,33
Ulujadi	17.092	9,17	16.651	9,05	33.743	9,11
Tatanga	24.950	13,38	24.701	13,43	49.651	13,41
Tawaeli	11.482	6,16	10.946	5,95	22.428	6,06
Mantikulore	35.348	18,96	35.044	19,05	70.392	19,01
Kota Palu	186.431	100	183.945	100	370.376	100

Sumber : SIPD Kota Palu 2020

Registrasi Penduduk Kota Palu Tahun 2019 berjumlah sebesar 370.376 jiwa, yang terdiri dari 186.431 jiwa penduduk laki-laki dan 183.945 jiwa penduduk perempuan. Rasio jumlah penduduk laki-laki dan perempuan Kota Palu Tahun 2019 sebesar 101,43. Perkembangan penduduk di suatu wilayah dipengaruhi oleh tiga komponen demografi yaitu kelahiran (*birth*), kematian (*death*) dan perpindahan penduduk (*migration*).

4.1.5 Visi dan Misi Kota Palu

Visi Kepala Daerah yang menjadi arah pembangunan sampai dengan 5 (lima) tahun mendatang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Palu Tahun 2021-2026 adalah : **MEMBANGUN KOTA PALU YANG MANDIRI, AMAN DAN NYAMAN, TANGGUH, SERTA PROFESIONAL DALAM KONTEKS**

PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN BERBASIS KEARIFAN LOKAL DAN KEAGAMAAN.

Adapun penjabaran Misi Kota Palu 2021-2026 adalah sebagai berikut: Kota Palu meliputi seluruh wilayah Kota Palu dan isinya. Artinya Kota Palu dan seluruh warganya serta entitas yang ada di dalamnya yang berada di dalam satu wilayah dengan batas-batas tertentu secara administratif berdasarkan peraturan dan ketentuan per undang-undangan.

Mandiri Pembangunan yang diarahkan pada suatu keadaan yang memungkinkan masyarakat untuk menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapinya, mampu mengambil keputusan sendiri, mempunyai inisiatif dan kreatif, tanpa mengabaikan lingkungan di sekitarnya yang ditandai dengan meningkatnya kesejahteraan masyarakat.

Aman dan nyaman dimaknai sebagai pembangunan yang dilaksanakan pada berbagai sektor dan wilayah Kota Palu sehingga menjadikan kota yang aman dan nyaman untuk dihuni yang tercermin dari kualitas lingkungan hidup yang baik, infrastruktur yang berkualitas dan tahan gempa, tata kelola pemerintahan yang profesional dan selalu hadir melayani. Tangguh Pembangunan yang ditujukan agar sumber daya manusia dan infrastruktur di Kota Palu mampu beradaptasi terhadap perubahan, ***memiliki daya saing serta selalu siaga dalam menghadapi bencana baik alam maupun non alam.***

Profesional, dimana pembangunan yang diarahkan pada suatu kondisi sumber daya aparatur semakin profesional, kelembagaan yang efektif dan efisien, serta pelayanan yang selalu hadir melayani.

Pembangunan Berkelanjutan merupakan suatu proses pembangunan yang mengoptimalkan manfaat dari sumber daya alam serta sumber daya manusia, dengan menyeraskan sumber daya alam dan manusia dalam pembangunan serta sebagai ikhtiar pemerintah daerah untuk mewujudkan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan

Kearifan Lokal merupakan pengakuan Pemerintah Kota Palu untuk menjadikan kearifan lokal sebagai basis dalam pembangunan. Kearifan lokal merupakan bentuk pengetahuan asli masyarakat lembah Kaili yang berasal dari nilai luhur budaya di lembah Kaili yang memiliki relevansi penyelesaian permasalahan masyarakat.

Keagamaan berupa komitmen Pemerintah Kota Palu menjadikan nilai-nilai religius sebagai fondasi dalam melakukan ikhtiar pembangunan. Merupakan suatu sistem yang mengatur tata keimanan (kepercayaan) dan peribadatan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa serta tata kaidah yang berhubungan dengan pergaulan manusia dan manusia serta lingkungannya.

4.1.6 Wilayah Rawan Bencana

Kawasan rawan bencana alam di Kota Palu terdiri dari Kawasan rawan gempa bumi, kawasan rawan tanah longsor, kawasan rawan

gelombang pasang/tsunami, kawasan rawan banjir serta likuifaksi yang terjadi akibat gempa yang melanda Kota Palu.

a. Kawasan Rawan Gempa Bumi

Di Kota Palu, gempa bumi yang potensial terjadi adalah jenis gempa bumi tektonik. Gempa jenis ini diakibatkan oleh pergeseran di dalam bumi. Magnitude gempa bumi berkisar kecil sampai besar, daerahnya luas, kedalaman sumber gempa bisa dangkal, menengah hingga dalam. Aktivitas gempa bumi di Kota Palu dan sekitarnya terutama dikarenakan oleh patahan aktif Palu Koro dan Patahan Pasternoster.

Jalur gempa sangat berkaitan dengan jalur patahan. Kota Palu dilalui/dipengaruhi oleh tiga jalur patahan yang saling sejajar berarah barat laut –tenggara, yaitu :

1. Patahan vertikal di sebelah timur melewati jalur perbukitan;
2. Patahan vertikal di bagian tengah Kota Palu, melewati Tondo, Talise, Biromaru Bora dan memanjang ke arah Palolo;
3. Patahan vertikal di sebelah barat, Jalur patahan secara relatif terdapat memanjang dari tepi pantai Kabonga melewati Loli, Buluri, Watusampu, Balane dan selanjutnya memanjang ke selatan yang kemudian akan bersambung dengan patahan Matano.

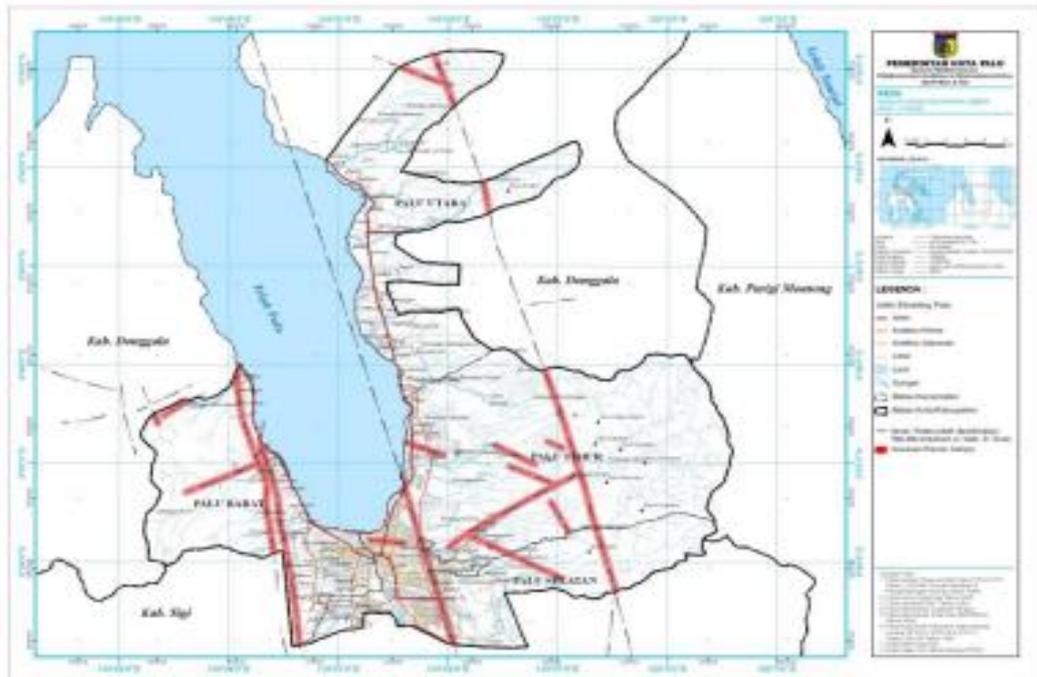
Ketiga patahan tersebut secara regional merupakan akibat gravitasi dari proses patahan geser Palu-Koro. Berdasarkan letak dan orientasi garis patahan tersebut maka wilayah yang sangat dekat akan jalur patahan

rawan kerusakan akibat gempa adalah : Watusampu, Buluri, Silae, Kabonena, Donggala Kodi dan Duyu.

Berdasarkan pada data BNPB, terdapat sejumlah peristiwa gempa besar yang pernah terjadi di wilayah Sulawesi Tengah yang terasa sampai di Kota Palu, yakni:

1. Pada tanggal 1 Desember 1927, gempa berkekuatan 6,5 SR yang berasal dari aktivitas tektonik Watusampu dengan pusat gempa di Teluk Palu. Akibatnya 14 orang meninggal dunia dan 50 orang luka-luka;
2. Tahun 1994 gempa mengguncang Kabupaten Donggala;
3. 11 Oktober 1998, gempa berkekuatan 5,5 SR mengguncang Kabupaten Donggala;
4. 24 Januari 2005, gempa berkekuatan 6,2 SR dengan pusat gempa 16 km arah tenggara Kota Palu;
5. 17 November 2008, gempa berkekuatan 7,7 SR berpusat di Laut Sulawesi mengguncang Kabupaten Buol, Sulawesi Tengah
6. 18 Agustus 2012, gempa berkekuatan 6,2 SR terjadi di Kabupaten Sigi dan Parigi Moutong.
7. Gempa bumi yang terjadi pada tanggal 28 September 2018 berkekuatan 7,4 SR terjadi pada pukul 17:02:45 WITA.

Untuk informasi sebaran, peruntukan ruang daerah rawan gempa dapat dilihat pada Gambar 4.2. berikut ini.



Gambar 4.2
Peta Analisa Rawan Gempa di Kota Palu

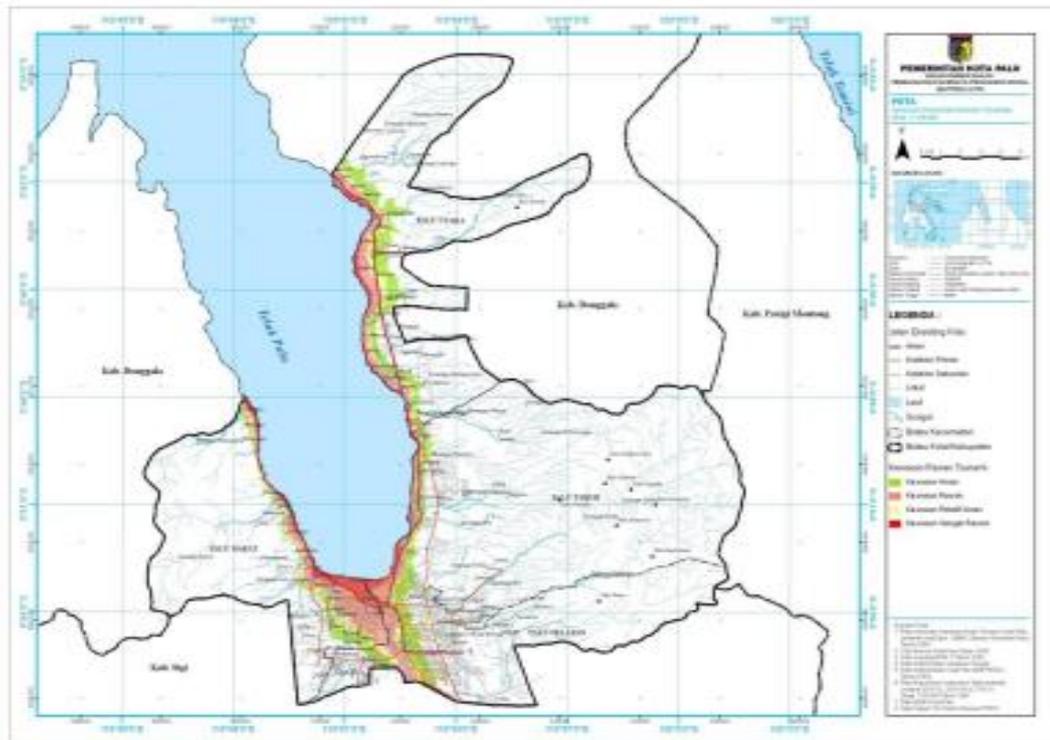
b. Kawasan rawan gelombang pasang/tsunami

Tsunami pada prinsipnya diawali oleh gempa bumi, yang menimbulkan gangguan impulsif terhadap air laut karena adanya perubahan bentuk dasar laut. Proses terjadinya tsunami dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Gempa bawah laut merenggutkan massa besar air laut dalam satu hentakan kuat.
2. Gelombang balik air menerjang dengan kecepatan hingga 800 Km/jam
3. Mendekati pantai, gelombang melambat namun mendesak ke atas
4. Gelombang menghempas ke daratan dan menghancurkan apa pun yang ada di belakang garis pantai.

Wilayah Selat Makassar dimana Kota Palu terdapat memiliki frekuensi yang tinggi kejadian tsunami. Selat ini memiliki aktivitas seismik akibat adanya konvergensi empat lempeng tektonik yang menghasilkan struktur yang kompleks. Kenampakan tsunamigenic utama di Selat Makassar adalah zona patahan Palu-Koro dan Pasternoster, yang membentuk batas cekungan Selat Makassar. Analisa seismisitas, tektonik dan sejarah tsunami menunjukkan kedua zona patahan ini memiliki karakteristik yang berbeda.

Perairan pantai Kota Palu berpeluang terjadi tsunami, dikarenakan gempa-gempa yang berpusat di barat laut Kota Palu, yaitu Selat Makassar dan sekitarnya. Gempa bumi yang terjadi di wilayah ini memiliki magnitude > 6,3 SR, kedalaman dangkal (kurang dari 60 km), bentuk patahan naik, turun atau terbelah dan bentuk pantai yang cekung memungkinkan energi gelombang yang terjadi dapat terakumulasi menjadi lebih besar di Teluk Palu, yaitu kemungkinan terjadinya gelombang tsunami bisa mencapai di atas ketinggian > 15m (berkategori berbahaya, BMKG Palu, 2004). Berdasarkan data BMKG Palu tersebut. Adapun gambaran spasialnya dapat dilihat pada gambar 4.3. tentang peta rawan tsunami di Kota Palu sebagai berikut :



Gambar 4 3
Peta Analisa Rawan Tsunami di Kota Palu

c. Kawasan Rawan Likuefaksii

Gempa 7.4 SR yang mengguncang Palu pada tanggal 28 September 2018 mengakibatkan beberapa wilayah mengalami fenomena mengejutkan yang disebut likuefaksi. Wilayah Balaroa dan Petobo di Palu, Sulawesi Tengah mengalami fenomena likuefaksi yang mengakibatkan pengangkatan dan amblesan di tiga wilayah tersebut. Likuefaksi disebabkan oleh hilangnya kekuatan tanah yang disebabkan guncangan gempa sehingga tidak memiliki daya ikat.

Jumlah bangunan terdampak yang diperoleh melalui pengamatan citra satelit tersebut adalah data indikatif yang perlu dilakukan verifikasi dengan data yang dilaporkan oleh BNPB sebagai lembaga terkait yang

melakukan pendataan terkait jumlah wilayah dan bangunan terdampak. Sebaran wilayah terdampak likuefaksi beserta perkiraan jumlah bangunan yang terpapar yaitu :

1. Kelurahan Balaroa

Kelurahan Balaroa merupakan salah satu wilayah yang terdampak cukup parah yang diakibatkan oleh gempa yang terjadi pada tanggal 28 September 2018. Meski tidak terdampak tsunami, namun hampir seluruh wilayah Balaroa, termasuk Perumnas Balaroa terkubur oleh tanah yang mengalami likuefaksi atau ambles, yang diakibatkan oleh gempa besar yang terjadi. Identifikasi wilayah yang terdampak yang dilakukan oleh LAPAN dan mitra terkait seperti OSM menggunakan citra satelit sebelum dan setelah bencana, diperoleh informasi bahwa luas wilayah terdampak di Balaroa adalah 51,34 Ha. Sedangkan bangunan yang berada di wilayah terdampak likuefaksi sebelum bencana yang teridentifikasi melalui citra satelit sejumlah 1,364 bangunan rusak, dan 263 bangunan diperkirakan rusak, sehingga total bangunan di wilayah terpapar 1,627.

2. Kelurahan Petobo

Wilayah Kelurahan Petobo merupakan salah satu dari dua wilayah di Kota Palu yang terdampak bencana likuefaksi cukup parah selain Kelurahan Balaroa. Berdasarkan pengamatan dan hasil interpretasi yang dilakukan oleh LAPAN dengan menggunakan citra satelit sebelum dan sesudah bencana, diperkirakan bahwa total wilayah terdampak likuefaksi di wilayah Petobo ini adalah 175,64 Ha, sedangkan total bangunan

terpapar adalah 2,283, dimana 2,059 bangunan rusak, sedangkan 224 bangunan lainnya dikategorikan sebagai bangunan yang “kemungkinan rusak”

4.2 Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Palu.

a. Sejarah singkat terbentuknya BPBD Kota Palu

Pemerintah Kota Palu melalui Walikota Palu dengan persetujuan DPRD Kota Palu menetapkan Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 2 Tahun 2009 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Palu yang ditetapkan pada tanggal 24 April 2009 dan selanjutnya pada tanggal 4 Juni 2009 Walikota Palu melantik Pejabat Eselon IIb, IIIb dan Eselon IVa Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Palu.

b. Dasar Hukum

1. Undang- Undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana.
3. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah.
4. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana.

5. Peraturan Walikota Palu Nomor 33 Tahun 2005 Tentang Tugas Pokok dan Fungsi Satuan Organisasi pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Palu.

c. Visi dan Misi Badan Penanggulangan Bencana Kota Palu

Berdasarkan tugas pokok dan fungsi BPBD Kota Palu Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Palu dan Peraturan Walikota Palu Nomor 23 Tahun 2009 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Satuan Organisasi pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Palu, serta isu-isu strategis yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat khususnya sub bidang penanggulangan bencana kabupaten/kota dengan memperhatikan Visi dan Misi Walikota Palu periode 2016 - 2020, maka BPBD Kota Palu menetapkan Visi, yaitu : " MENUJU KOTA TANGGUH BENCANA BERBASIS KEARIFAN LOKAL "

Untuk mewujudkan Visi yang telah ditetapkan, SKPD harus mempunyai Misi yang jelas. Misi merupakan pernyataan yang menetapkan tujuan SKPD dan sasaran yang ingin dicapai dalam waktu tertentu melalui penerapan strategi yang telah dipilih. Oleh karena itu, untuk mewujudkan Visi BPBD Kota Palu sebagaimana dikemukakan di atas, maka ditetapkan Misi sebagai berikut:

- Misi 1 Penguatan kapasitas daerah dan masyarakat dalam menghadapi bencana.
- Misi 2 Pemberdayaan partisipasi dan pengembangan budaya gotong royong dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana.
- Misi 3 Perlindungan kepada masyarakat dari ancaman dan risiko bencana.
- Misi 4 Penyelenggaraan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu dan terkoordinasi

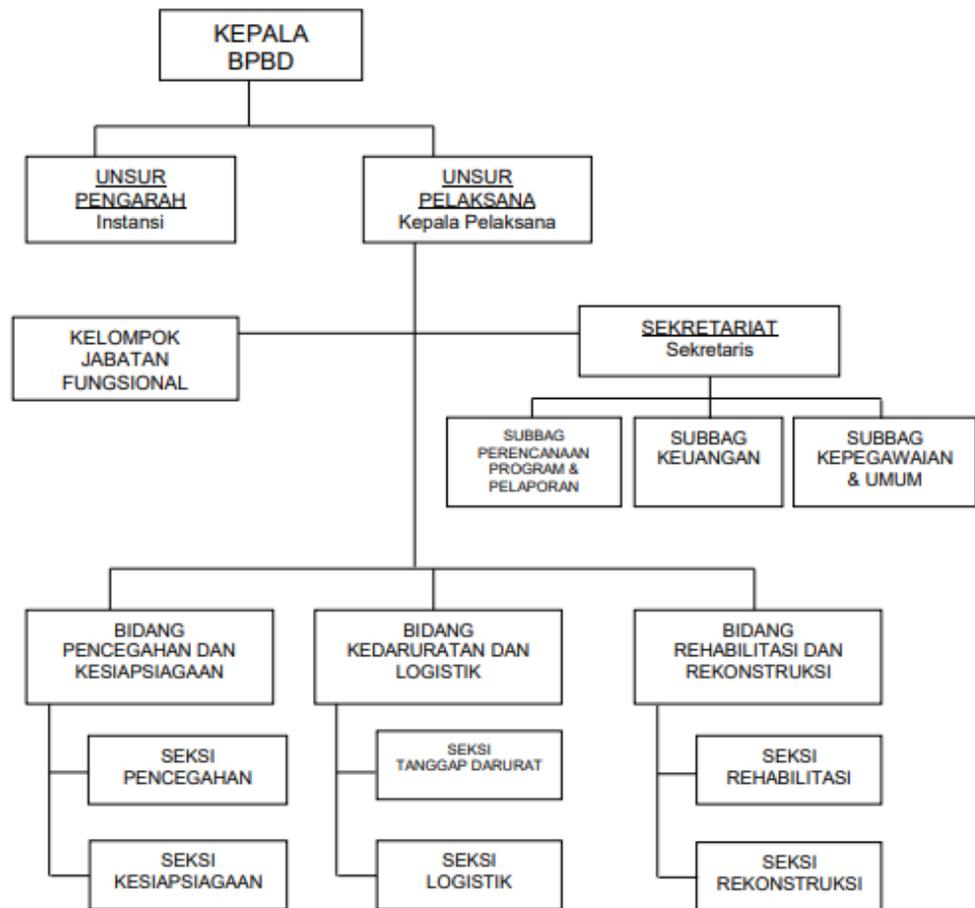
d. Tugas dan Fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 2 Tahun 2009 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah, BPBD Kota Palu memiliki tugas pokok yakni membantu Kepala Daerah dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan dibidang penanggulangan bencana yang mencakup tugas pencegahan, penanganan kondisi kedaruratan, rehabilitasi dan rekonstruksi serta tugas pembantuan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut maka BPBD Kota Palu melekat fungsi sebagai berikut:

1. Menetapkan pedoman dan pengarahan terhadap usaha penanggulangan bencana yang meliputi usaha pencegahan bencana, penanganan kedaruratan, kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi;
2. Melakukan koordinasi dengan SKPD dan instansi lainnya dalam kegiatan penanggulangan bencana;
3. Menetapkan standarisasi serta kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana serta melakukan koordinasi dengan perangkat daerah Kota Palu serta instansi sesuai ketentuan yang berlaku;
4. Menyusun, menetapkan dan menginformasikan peta rawan bencana;
5. Menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanggulangan bencana;
6. Melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada kepala daerah secara berkala baik dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana;
7. Penyelenggaraan ketatausahaan dan tatalaksana;
8. Mempertanggung jawabkan sarana dan prasarana, keuangan, personil dalam pelaksanaan tugas penanggulangan bencana;
9. Melakukan pembinaan pada unit-unit yang membantu penyelenggaraan tugas penanggulangan bencana;
10. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala daerah sesuai tugas pokok dan fungsinya.

4.2.1 Struktur Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah.



Gambar 4 4
Struktur Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Palu

Berdasarkan Perda Kota Palu Nomor 2 Tahun 2009 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah terdiri dari:

- a. Kepala (secara *ex-officio* dijabat oleh sekretaris daerah)
- b. Unsur Pengarah;

Unsur Pengarah meliputi Keterwakilan instansi terkait dan Profesionalisme/ahli yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan

c. Unsur Pelaksana .

Unsur Pelaksana meliputi :

1. Kepala Pelaksana;
2. Sekretariat Unsur Pelaksana, membawahi : 1. Subbagian Perencanaan Program dan Pelaporan; 2. Subbagian Keuangan; 3. Subbagian Kepegawaian dan Umum;
3. Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan, membawahi : 1. Seksi Pencegahan Bencana; 2. Seksi Kesiapsiagaan Bencana;
4. Bidang Kedaruratan dan Logistik, membawahi : 1. Seksi Tanggap Darurat Bencana; 2. Seksi Logistik dan Mobilisasi Bencana;
5. Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi, membawahi : 1. Seksi Rehabilitasi Korban Bencana; 2. Seksi Rekonstruksi;

4.3 Organisasi Pemulihan Pascabencana Kota Palu

Penyelenggaraan penanggulangan bencana di daerah dilaksanakan secara terencana, terpadu, menyeluruh dan terkoordinasi yang melibatkan semua potensi yang ada di daerah. Untuk melaksanakan ketentuan Undang-Undang RI. Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, Pemerintah Daerah menjadi penanggungjawab dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana.

Pemerintah Kota Palu telah melakukan beberapa kegiatan sebagai upaya pemulihan bencana yang melanda pada tanggal 28 September 2018. Berbagai upaya tersebut dilakukan berdasarkan Peraturan Daerah No. 5 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana. Untuk mempercepat pemulihan kehidupan masyarakat pada wilayah pascabencana penanganan pemulihan bencana tersebut mencakup 2 tahap.

TAHAP 1: Rehabilitasi yang terdiri dari,

- a. Perbaikan lingkungan daerah bencana;
- b. Perbaikan prasarana dan sarana umum;
- c. Pemberian bantuan perbaikan rumah masyarakat;
- d. Pemulihan sosial psikologis;
- e. Pelayanan kesehatan;
- f. Rekonsiliasi dan resolusi konflik;
- g. Pemulihan sosial, ekonomi, dan budaya;
- h. Pemulihan keamanan dan ketertiban;
- i. Pemulihan fungsi pemerintahan; dan
- j. Pemulihan fungsi pelayanan publik.

TAHAP 2: Rekonstruksi dengan kegiatan meliputi,

- a. Pembangunan kembali prasarana dan sarana;
- b. Pembangunan kembali sarana sosial masyarakat;
- c. Pembangkitan kembali kehidupan sosial budaya masyarakat;

- d. Penerapan rancang bangun yang tepat dan penggunaan peralatan yang baik serta tahan bencana;
- e. Partisipasi dan peran serta lembaga dan organisasi kemasyarakatan, dunia usaha dan masyarakat;
- f. Peningkatan kondisi sosial, ekonomi, dan budaya;
- g. Peningkatan fungsi pelayanan publik; dan
- h. Peningkatan pelayanan utama dalam masyarakat.

Kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi tersebut sebagai upaya pemulihan bencana dilaksanakan oleh Satuan Kerja Pemerintah Daerah dan instansi/ lembaga terkait yang dikoordinasikan oleh Kepala BPBD Kota Palu. Hal tersebut sejalan dengan Peraturan Daerah No. 5 Tahun 2011 Bab IV tentang Kelembagaan Pasal 7 yang berbunyi Penyelenggara Penanggulangan Bencana berada di bawah koordinasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Palu. Dalam usaha mempercepat upaya penanggulangan dan pemulihan bencana, maka lembaga usaha, lembaga internasional dan lembaga kemasyarakatan diberikan kesempatan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana.

Informan yang diwawancarai dalam penelitian ini ditentukan secara *purposive sampling*, dengan mempertimbangkan kesesuaian antara calon informan dengan informasi yang dibutuhkan, baik secara sendiri maupun secara bersama sama dengan pihak lain. Berkaitan dengan kebutuhan pengumpulan data primer yang akan diperoleh secara langsung melalui wawancara. Maka informan yang terpilih adalah narasumber yang memiliki

kompetensi pengetahuan dan pemahaman tentang kajian efektivitas jaringan dalam pemulihan bencana serta terlibat secara langsung dalam kegiatan pemulihan pascabencana di Kota Palu. Begitupun dengan *key informan* dipilih dari orang yang menduduki posisi strategis, memiliki pengetahuan dan pemahaman yang baik serta terlibat langsung dengan kegiatan pemulihan pascabencana.

BAB V

HASIL DAN PEMBAHASAN

Jaringan yang efektif dapat memainkan peran yang sangat penting dalam penanganan dan pemulihan pascabencana. Dalam situasi bencana, kecepatan, koordinasi, dan aksesibilitas menjadi sangat penting dalam membantu korban dan mengurangi kerusakan yang ditimbulkan. Dalam kesimpulannya, jaringan yang efektif sangat penting dalam penanganan bencana. Jaringan yang kuat dan terhubung dengan baik dapat membantu dalam komunikasi, pendanaan, distribusi sumber daya, dalam pemulihan pascabencana.

Seperti yang telah dijelaskan pada bagian terdahulu, studi ini akan menjelaskan tentang model efektivitas pemulihan pascabencana di Kota Palu yang dianalisis menggunakan *key factor effectiveness networking*. Sementara model *indigenous knowledge* merupakan novelty sebagai temuan baru dan menjadi kesimpulan dalam studi ini akan menggambarkan bagaimana efektifitas jaringan dan *indigenous knowledge* dalam organisasi jaringan aktor penanganan pemulihan pascabencana di Kota Palu.

5.1 Kegiatan dan Upaya Pemulihan Bencana di Kota Palu.

Tahapan analisis kondisi terkini merupakan kegiatan peninjauan pada sumber data dengan tujuan untuk memperoleh data yang akurat dan relevan yang terjadi saat ini. Pada tahapan ini akan menggambarkan kondisi nyata pada kegiatan upaya pemulihan pascabencana yang terjadi

di Kota Palu selama penelitian berlangsung. Kondisi terkini dalam penelitian ini akan digunakan untuk melakukan analisis terhadap variabel efektivitas jaringan dalam pemulihan bencana. Informasi tentang kondisi pemulihan pascabencana diperoleh dari proses penggalan data melalui wawancara dan studi pustaka yang telah dilakukan pada tahap sebelumnya, kondisi ini juga akan menggambarkan pada bagian mana dari kondisi saat ini yang sudah memenuhi dan bagian mana yang belum memenuhi standar yang sudah ditetapkan sebelumnya.

Berdasarkan rencana induk pemulihan dan pembangunan kembali wilayah pascabencana di Sulawesi Tengah yang disusun dan diterbitkan oleh Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas, yang diharapkan menjadi pegangan bagi semua pihak dalam upaya pemulihan dan pembangunan pascabencana di Sulawesi Tengah termasuk di dalamnya pemulihan pascabencana di Kota Palu.

Kebijakan dan Strategi Pemulihan dan Pembangunan. Rencana pemulihan dan pembangunan diwujudkan melalui penyusunan kebijakan dan strategi pemulihan wilayah pascabencana, pembangunan kawasan permukiman baru, serta pengurangan risiko bencana wilayah pascabencana dan rawan bencana. Pemulihan wilayah pascabencana dilakukan melalui rehabilitasi serta rekonstruksi pada masing-masing sektor perumahan dan permukiman, infrastruktur, sosial dan budaya, perekonomian wilayah dan masyarakat, serta lintas sektor. Pembangunan kawasan permukiman baru disusun berdasarkan penataan ruang kawasan,

penataan administrasi kependudukan, pembangunan perumahan, pembangunan infrastruktur, pembangunan sosial, budaya, ekonomi, serta kelembagaan pemerintahan dan kemasyarakatan. Kemudian, pengurangan risiko bencana dilakukan dengan menyusun kebijakan dan strategi sesuai dengan wilayah rawan bencana di Provinsi Sulawesi Tengah dan kabupaten/kota terdampak.

1. Kondisi Pemulihan Infrastruktur dan Kawasan

Penataan Ruang Wilayah dan Kawasan Rawan Bencana. Rencana pembangunan kembali wilayah terdampak pascabencana berbasis risiko bencana dilakukan dengan menyusun kebijakan dan strategi penataan ruang wilayah terdampak, menyusun rekomendasi tata ruang pada tingkat Provinsi Sulawesi Tengah dan kabupaten/kota terdampak, serta menyusun rekomendasi arahan pemanfaatan ruang di lokasi relokasi. Berdasarkan hasil analisis geologi dan pemenuhan kriteria kesesuaian lahan, terdapat empat lokasi relokasi di Kota Palu meliputi Kelurahan Duyu, Kelurahan Tondo dan Talise.

Pemulihan dan Pembangunan Infrastruktur Wilayah dan Kawasan Relokasi. Rencana pemulihan dan pembangunan infrastruktur disusun sesuai dengan strategi pemulihan dan pembangunan infrastruktur pascabencana, serta strategi pembangunan infrastruktur pada kawasan permukiman baru. Pemulihan dan pembangunan infrastruktur meliputi infrastruktur transportasi darat, laut, dan udara, sumber daya air, telekomunikasi dan energi kelistrikan, jaringan persampahan, serta

infrastruktur sosial. Kemudian, pada rencana pembangunan infrastruktur pada kawasan permukiman baru terbagi menjadi infrastruktur transportasi, sumber daya air dan irigasi, telekomunikasi dan energi kelistrikan, air bersih dan air limbah, serta infrastruktur persampahan. Pemulihan infrastruktur dilakukan dengan penguatan (*retro-fiting*) pada bangunan yang masih ada maupun infrastruktur rusak yang masih bisa digunakan, sedangkan pembangunan infrastruktur disusun dengan mempertimbangkan ancaman bencana di masa depan. Pemulihan dan pembangunan infrastruktur saat ini terus berjalan misalnya pembangunan jalan dan jembatan juga pembangunan sarana pendidikan dan kesehatan. Ada beberapa proyek yang sudah selesai dan sebagian lainnya masih dalam tahap pengerjaan.

Pada sektor perumahan dan permukiman, saat ini sebagian penyintas gempa, tsunami, dan likuefaksi di Kota Palu, Sulawesi Tengah, yang jumlahnya sekitar 4.255 Kepala Keluarga masih tinggal di hunian sementara (HUNTARA) setelah 3 tahun bencana terjadi. Hal ini disebabkan karena proses pembangunan hunian tetap (HUNTAP) belum selesai dikerjakan karena permasalahan lahan yang belum tuntas sampai saat ini. Untuk huntap relokasi, Pemerintah Indonesia menganggarkannya dari pinjaman kepada Bank Dunia sebesar US\$250 juta (lebih dari Rp 3,5 triliun). Pelaksanaannya dilakukan Kementerian PUPR lewat *National Slum Upgrading Project-Contingency Emergency Response Component* (NSUP-CERC, Tahap 1) dan *Central Sulawesi Rehabilitation and Reconstuction Project* (CSRRP, Tahap 2). Sedangkan untuk huntap *in situ* (dana

stimulan), pemerintah mengucurkan dana Rp 1,9 triliun melalui BNPB. Selanjutnya pemerintah kemudian menyiapkan sejumlah skema untuk program penyediaan hunitan tetap tersebut: (1) huntap relokasi skala besar (kawasan); (2) huntap relokasi skala kecil-menengah (huntasatelit); (3) huntap relokasi mandiri; dan (4) huntap *in situ*. Huntasatelit skala besar, huntap satelit, atau huntap mandiri disediakan bagi warga yang kehilangan rumahnya karena tsunami atau liquefaksi, serta rusak berat dan berada di Zona Rawan Bencana (ZRB).

Bagi yang memilih skema Huntasatelit mandiri, warga disyaratkan harus memiliki lahan sendiri yang berada di luar zona rawan bencana. Huntasatelit *in situ*, yang disediakan lewat Bantuan Dana Rumah (BDR) atau yang lebih dikenal dengan dana stimulan, diperuntukkan bagi warga yang rumahnya mengalami rusak berat namun tidak berada di zona rawan bencana. Skema dana stimulan ini pun, dengan besaran dana yang berbeda, diberikan kepada warga yang rumahnya mengalami rusak sedang dan rusak ringan. Tabel berikut ini merupakan rencana penyediaan hunian tetap yang dibuat oleh Kementerian PUPR seperti yang termuat dalam Rencana Induk Pemulihan dan Pembangunan Kembali Wilayah Pascabencana Provinsi Sulawesi Tengah pada Tabel 5.1 sebagai berikut :

Tabel 5. 1 Rencana Penyediaan Hunian Tetap

	Lokasi	Kab/Kota	Luas Lahan (Ha)	Hunian Tetap (unit)						Total
				Tahap 1		Tahap 2		Total		
				PUPR	Donor	PUPR	Donor	PUPR	Donor	
1	Duyu	Palu	36,30	450	-	-	-	450	-	450
2	Tondo-Talise	Palu	157,1	-	1.500	3.358	-	3.358	1.500	4.858
3	Pombewe	Kab. Sigi	104	500	1.000	-	-	500	1.000	1.500
4	Huntap Satelit	Kab. Sigi and Kab. Donggala	28,53*	685	500	745	-	1.430	500	1.930
	Belum Teridentifikasi		-	-	-	3.050	-	3.050	-	3.050
	Total		325,93	1.635	3.000	7.153	-	8.788	3.000	11.788

Sumber: Kementerian PUPR. 2019

Berdasarkan tabel di atas dan data yang diperoleh dari LPS HAM menyebutkan rencana awal pembangunan Huntap secara keseluruhan di Palu, Sigi, dan Donggala akan dibangun sebanyak 11.788 unit. Dari jumlah itu, Kementerian PUPR akan membangun 8.788 unit, Yayasan Buddha Tzu Chi 2.500 unit, dan 500 unit lainnya dibangun pihak lainnya. Secara keseluruhan ditaksir kebutuhan pembiayaan penanganan pascabencana di Sulteng sekitar Rp 22,8 Triliun. Jumlah itu termasuk Rp 5 Triliun untuk relokasi pembangunan kembali pemukiman warga terdampak bencana. Sumber dana selain berasal dari pemerintah, juga dari bantuan beberapa lembaga dari luar negeri.

Fase pemulihan dari bencana ditandai dengan mulai berkurangnya peran BNPB dan Basarnas, setelahnya itu peran pemulihan bencana kepada Pemerintah Daerah lebih banyak dikerjakan secara berjenjang

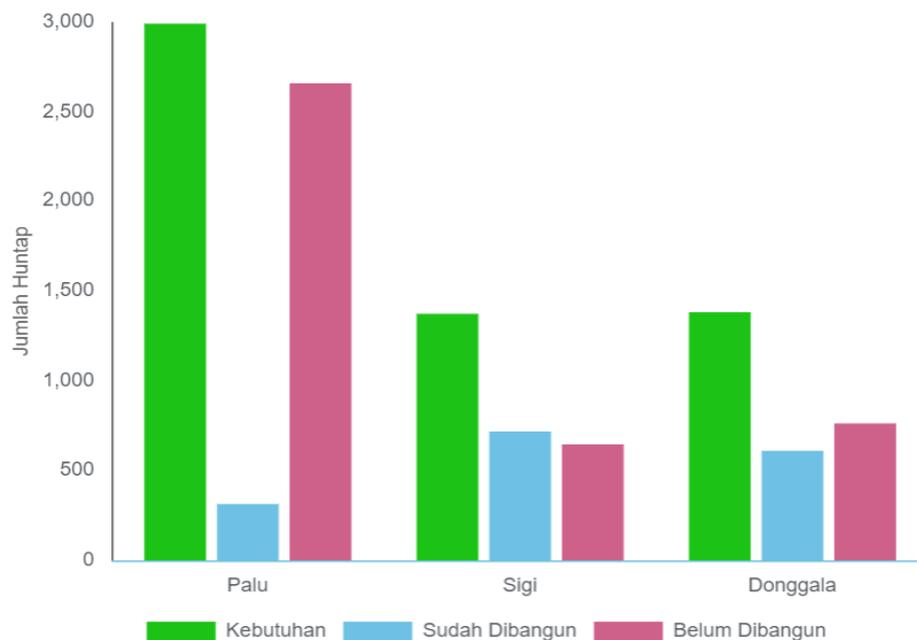
kepada Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota. Meskipun demikian, dalam penyelenggaraannya menggunakan model kolaborasi dengan melibatkan berbagai pihak di daerah dan luar daerah dalam pembangunan hunian Sementara pembangunan Huntara sampai kepada Huntap untuk Warga Terdampak Bencana (WTB).

Tahap Pembangunan Huntara Tetap yang dibangun berdasarkan kebutuhan penanganan pengungsi yang awalnya hidup di hunian sementara saat mulai mendapatkan masalah ekonomi dan sosial karena kondisi hunian yang sudah mulai rusak. Selain itu, Huntara yang dihuni saat ini mulai dirasakan tidak nyaman bagi para korban dalam melaksanakan aktivitas rumah tangga. Oleh karena itu berdasar inisiatif dari Pemerintah maka dibangun hunian tetap yang melibatkan beberapa pihak non-pemerintah.

Dari berbagai upaya pemulihan yang ada saat ini maka pembangunan Huntap merupakan kegiatan pemulihan yang menghadapi banyak masalah terutama penyediaan lahan untuk pembangunan Huntap. Khusus yang diusulkan Kota Palu, masih ada Hak Guna Usaha (HGU) dan Hak Guna Bangunan (HGB) dari sejumlah perusahaan yang memiliki konsesi. Untuk lahan konsesi yang sudah habis masa izinnya pun, jauh sebelum bencana terjadi, sejumlah warga mengklaim bahwa mereka memiliki hak atas lokasi tersebut. Penyediaan lahan huntap untuk relokasi, terutama untuk relokasi skala besar, sepenuhnya menjadi tanggung jawab pemerintah daerah. Untuk kawasan Huntap Satelit, selain menjadi tanggung jawab pemerintah

daerah, penyediaannya dimungkinkan juga untuk dilakukan dengan cara konsolidasi lahan dari warga. Penyediaan lahan untuk Huntap relokasi sebenarnya sudah diupayakan dari sejak masa tanggap darurat bencana. Usulan untuk lokasi Huntap relokasi kala itu sudah diberikan oleh Kota Palu. Usulan inilah kemudian menjadi dasar bagi Gubernur Sulteng untuk menerbitkan surat keputusan tentang Penetapan Lokasi Tanah Relokasi Pemulihan Akibat Bencana di Sulteng, tanggal 28 Desember 2018. Permasalahan lahan yang dihadapi ini kemudian menyebabkan pemulihan sarana dan prasarana pembangunan perumahan tidak berjalan sesuai target yang telah ditetapkan. Berikut Progres ketersediaan hunian tetap berdasarkan data per Januari 2023 ini dapat dilihat pada Grafik berikut ini :

Grafik 5.1
Progres Ketersediaan Huntap



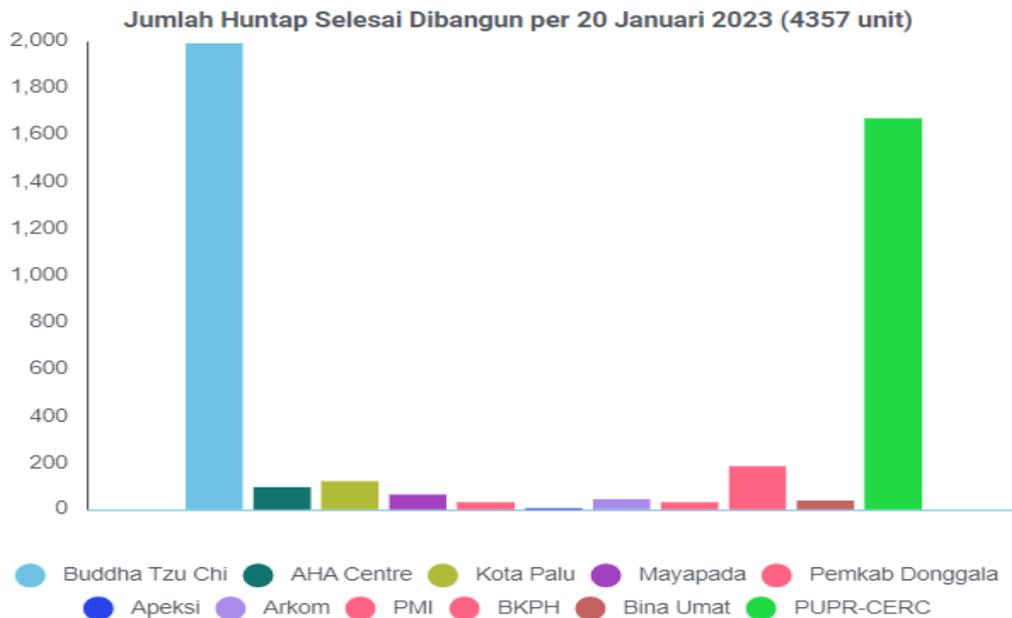
Sumber : SKP HAM. 2023

Kebutuhan hunian tetap yang diproyeksikan sebanyak 2998 unit, sudah dibangun 327 unit, belum dibangun sebanyak 2671 unit. Huntap relokasi kawasan (ex situ) skala besar di Kota Palu terdapat di Kelurahan Duyu sebanyak 230 unit di atas lahan seluas 79,3 hektar. Lahan tersebut adalah lahan eks PT. Duta Dharma Bhakti. Awalnya Kementerian PUPR akan membangun 450 unit. Namun, ada klaim dari 19 warga di lokasi itu atau seluas 22,2 Hektar sebagai miliknya.

Pada lokasi Tondo 1, ATR/BPN awalnya hanya memberikan lahan 19,2 hektar. Kemudian ditambah lagi 30 hektar sehingga menjadi 45 hektar. Di lahan itu dibangun 1.611 unit Huntap. Dari jumlah itu, 1.500 unit dibangun Yayasan Buddha Tzu Chi, 100 unit dibangun AHA Center, dan 11 unit dibangun APEKSI. Sementara pada lahan lainnya, Tondo 2 terdapat 65,31 hektar untuk kapasitas 1.100 unit Huntap. Oleh masyarakat lahan ini masih ada klaim warga sebanyak 37 petak lahan. Pemerintah Kota Palu sedang dalam proses dialog dengan warga untuk mengupayakan penyelesaian klaim kepemilikan lahan itu yang menjadi penyebab hambatan pembangunan Huntap bagi warga terdampak bencana.

Adapun stakeholder yang terlibat dalam pembangunan hunian tetap bagi warga terdampak bencana berasal dari berbagai lembaga dari pemerintah pusat dan daerah, yayasan, asosiasi dan lainnya disajikan pada pada grafik 5.2 sebagai berikut :

Grafik 5.2
Stakeholder Penyedia Hunian Tetap



Sumber : SKP HAM. 2023

Saat ini Yayasan Budha Tzu Chi membangun hunian tetap sebanyak 2000 unit, dimana 1.500 unit dibangun di Tondo Kota Palu. Selain itu juga membangun satu unit sekolah dan aula serbaguna. Sementara Kementerian PUPR mendirikan 1679 unit hunian tetap melalui program Rehabilitasi dan Rekonstruksi pemulihan Pascabencana Sulawesi Tengah atau *Contingency Emergency Response Component (CERC)* yang dibiayai oleh Bank Dunia. Selebihnya dibangun oleh berbagai lembaga sosial dan pemerintah daerah seperti AHA Centre 100 Unit, Pemerintah Kota Palu 127 Unit, Mayapada 72 Unit, Pemerintah Daerah Kabupaten Donggala 39 Unit, Apeksi 11 Unit, Arkom 49 Unit, PMI 40 unit, BKPH 193 Unit dan Yayasan Bina Umat sebanyak 47 unit hunian tetap.

2. Kondisi Pemulihan Sosial dan Ekonomi

Sektor Perekonomian, Kota Palu didominasi oleh sektor konstruksi, administrasi pemerintahan, perdagangan, dan transportasi. Sebagai kota terbesar di Provinsi Sulawesi Tengah, peran sektor jasa di kota ini lebih tinggi dari kabupaten-kabupaten lain. Infrastruktur seperti pelabuhan besar dan bandara utama juga berada di kota ini. Di kota Palu, sektor dengan pertumbuhan tertinggi dalam 3 tahun terakhir adalah sektor akomodasi dan makanan-minuman, diikuti oleh pertambangan, dan jasa kesehatan

Pemulihan sosial ekonomi seharusnya berjalan secara simultan dengan pembangunan fisik, karena pengutamaan pemulihan fisik saja dapat menimbulkan tekanan ekonomi dan psikologis pada warga terdampak bencana yang dapat menyebabkan potensi munculnya tindakan-tindakan kriminal dan konflik sosial di lokasi pengungsian dan hunian sementara (Huntara). Demikian juga ketika pemulihan infrastruktur fisik tidak melibatkan para penyintas dalam proses perencanaan dan pembangunannya, telah menyebabkan munculnya kesenjangan sosial di kalangan penyintas akibat dari tidak terbukanya informasi terkait dengan perencanaan permukiman kembali maupun ganti rugi kerugian atas lahan dan bangunan yang terdampak bencana.

Kerusakan terhadap berbagai fasilitas sosial ekonomi mengakibatkan penurunan aktivitas ekonomi secara langsung, dan secara sosial berdampak khusus pada kelompok rentan seperti perempuan, anak-anak, penyandang disabilitas, dan lanjut usia. Kebijakan umum pada bidang

sosial ekonomi, dilakukan melalui tiga rancangan strategi pemulihan, meliputi percepatan pemulihan sosial masyarakat pascabencana, percepatan pemulihan dan rekonstruksi ekonomi pascabencana, serta normalisasi sosial, ekonomi, budaya pascabencana. Pada bidang sosial masyarakat dilakukan program pemulihan pembangunan yang memberikan perhatian khusus terhadap kelompok perempuan dan kelompok rentan lainnya.

Beberapa kegiatan upaya pemulihan bencana di Provinsi Sulawesi Tengah termasuk di Kota Palu sejak bencana melanda pada fase rehabilitasi dan rekonstruksi yang difasilitasi oleh pemerintah daerah provinsi dan Kota berdasarkan klasifikasi sektor pemulihan, fase/tahapan kebencanaan sampai kepada jenis kegiatan yang telah dilaksanakan dapat dilihat pada Tabel 5.2 sebagai berikut :

Tabel 5. 2 Program Kegiatan oleh Pemerintah Kota, Kabupaten dan Provinsi

No	Sektor	Fase/Tahapan	Kegiatan
1	Pertanian	Rehab - Rekon	<ul style="list-style-type: none"> - Distribusi benih dan pupuk untuk musim tanam yang akan datang - Pencairan dana melalui program Kementerian Sosial Pembangunan area lantai jemur (drying floor)
2	Perikanan	Rehab - Rekon	<ul style="list-style-type: none"> - Penyediaan peralatan untuk budidaya perikanan seperti benih ikan, pakan, obat-obatan dan kolam ikan bioflok; - Rehabilitasi kolam ikan, perahu dan alat tangkap nelayan

No	Sektor	Fase/Tahapan	Kegiatan
			– Pengadaan pelatihan secara teknis untuk produk olahan ikan
3	Peternakan	Rehab - Rekon	– Rehabilitasi Rumah Penangkaran
4	Konstruksi	Rehab - Rekon	– Rehabilitasi dan penyediaan pasar; Distribusi barang sebagai langkah awal untuk memulai usaha bagi penerima bantuan
5	Otomotif	Rehab - Rekon	– Pelatihan dan pemberian peralatan penunjang
6	Furnitur	Rehab - Rekon	– Pemberian peralatan untuk memulai bisnis
7	Usaha Kuliner	Rehab - Rekon	– Pemberian peralatan, pelaksanaan pelatihan teknis pengolahan pangan dan bantuan dana
8	Makanan Olahan	Rehab - Rekon	– Pelatihan kewirausahaan dan bantuan keuangan bagi pelaku usaha
9	Jasa	Tanggap Darurat	– Penyediaan mesin jahit; Pelatihan pengembangan kapasitas bagi perempuan; Pelatihan untuk pemulihan trauma
10	Kerajinan Tangan	Rehab - Rekon	– Bantuan pendanaan untuk penerima manfaat agar dapat memulai usaha kembali
11	Tekstil	Rehab - Rekon	– Pelatihan peningkatan kapasitas industri dan teknologi
12	UMKM dan Koperasi	Rehab - Rekon	– Bantuan pendanaan untuk penerima manfaat agar dapat memulai usaha kembali

Sumber: Kementerian PPN/Bappenas – JICA. 2021

Berdasarkan tabel klasifikasi jenis kegiatan oleh Pemerintah Kota dan Pemerintah Provinsi di atas, menunjukkan bahwa 'Pemberdayaan Masyarakat' dan Pemulihan Mata Pencaharian bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) telah dilaksanakan. Data menunjukkan bahwa pemerintah menitikberatkan pada kemandirian dan rasa kepemilikan

masyarakat dalam program/kegiatan pemulihan mata pencaharian dan penguatan masyarakat. Selain itu, di daerah bencana, ada banyak UMKM yang mendukung perekonomian masyarakat. Oleh karena itu pemerintah harus mendukung UMKM terdampak melalui pelatihan kapasitas dan pelatihan usaha untuk mendukung mereka memulai kembali usahanya, terutama di sektor perikanan, makanan olahan dan usaha kuliner sebagaimana yang ditampilkan pada Tabel 5.3 berikut ini:

Tabel 5. 3 Program Kegiatan NGO dan Mitra Pembangunan

No.	Sektor	Fase/Tahapan	Kegiatan
1	Pertanian	Tanggap Darurat Rehab - Rekon	<ul style="list-style-type: none"> - Pengadaan benih dan pupuk; - Pendampingan teknis untuk peningkatan kapasitas kesiapsiagaan bencana - Pelatihan penanaman dan permakultur; - Pemberian alat pertanian dan benih sayur organik - Pelatihan dan dukungan terkait Good Agriculture Practices (GAP)
2	Peternakan	Rehab - Rekon	<ul style="list-style-type: none"> - Pelatihan peternakan, manajemen kewirausahaan, pemasaran, dan keuangan
3	Otomotif	Rehab - Rekon	<ul style="list-style-type: none"> - Pelatihan keterampilan dan perencanaan usaha; - Rekapitulasi Usaha Otomotif untuk bantuan pendanaan
4	Konstruksi	Tanggap Darurat Rehab - Rekon	<ul style="list-style-type: none"> - Distribusi Emergency Shelter Kits dan Kit Higiene; - Padat karya untuk membersihkan puing/reruntuhan pascabencana - Penyediaan Fasilitas Air Bersih dan Sanitasi yang Layak - Pelatihan pertukangan dan pekerja konstruksi; - Pembangunan kompleks Integrated Community Shelter (ICS)

No.	Sektor	Fase/Tahapan	Kegiatan
5	Kerajinan Tangan dan Tekstil	Rehab - Rekon	<ul style="list-style-type: none"> - Pelatihan keterampilan pembuatan batu bata untuk pria/wanita; - Pelatihan pembuatan furnitur
6	Usaha Kuliner	Tanggap Darurat Rehab - Rekon	<ul style="list-style-type: none"> - Distribusi alat dan bahan baku produksi serta pelatihan menghitung (pembukuan); - Pelatihan dan pendampingan dalam pembuatan rencana dan manajemen usaha, serta penyediaan bahan baku makanan
7	Perikanan	Tanggap Darurat Rehab - Rekon	<ul style="list-style-type: none"> - Bantuan peralatan tangkap kepada nelayan sebagai dorongan untuk memulai aktifitas kembali - Pemberian bantuan perahu, peralatan tangkap dan rumpon; - Pelatihan dan pendampingan untuk pembuatan rencana usaha
8	Makanan Olahan	Rehab - Rekon	<ul style="list-style-type: none"> - Pelatihan manajemen usaha, pemasaran dan keuangan; - Penyediaan bahan baku dan peralatan memasak - Bantuan permodalan dan produk olahan
9	Furnitur	Rehab - Rekon	<ul style="list-style-type: none"> - Pelatihan usaha secara teknis; - Pendampingan pembuatan rencana usaha; - Distribusi bantuan hibah bersyarat
10	Kerajinan Tangan	Rehab - Rekon	<ul style="list-style-type: none"> - Pelatihan dan pendampingan dalam pembuatan usaha; - Bantuan pendanaan, peralatan dan perlengkapan untuk usaha kecil; - Pelatihan keterampilan untuk mata pencaharian alternatif
11	Kesehatan	Rehab - Rekon	<ul style="list-style-type: none"> - Penyediaan Hygiene Kits untuk anak-anak; - Kegiatan Mobile Clinic (Klinik Keliling); - Kegiatan Psikososial anak;
12	Usaha Mikro dan Kecil	Tanggap Darurat	<ul style="list-style-type: none"> - Pelayanan kesehatan dan distribusi alat bantu untuk lansia dan disabilitas - Pemberian bantuan modal usaha (stimulan), dan pendampingan pelatihan

No.	Sektor	Fase/Tahapan	Kegiatan
13	Peternakan	Tanggap Darurat Rehab – Rekon	<ul style="list-style-type: none"> – Dukungan teknis untuk persiapan pemulihan dini pada masa tanggap darurat – Bantuan penggantian pakan ternak; Pelatihan peternakan
14	Jasa	Tanggap Darurat Rehab - Rekon	<ul style="list-style-type: none"> – Distribusi Emergency Shelter Kits dan Hygiene Kits; - Penyediaan Fasilitas Air Bersih dan Sanitasi; - Penyediaan Hunian Sementara – Pencairan bantuan tunai; - Pelaksanaan pelatihan manajemen usaha
15	Kesiapsiagaan bencana	Tanggap Darurat	<ul style="list-style-type: none"> – Penguatan kesiapsiagaan masyarakat yang inklusif melalui inisiasi Desa Tangguh Bencana; - Penguatan kesiapsiagaan melalui Satuan Pendidikan Aman Bencana
16	Tekstil	Tanggap Darurat Rehab - Rekon	<ul style="list-style-type: none"> – Distribusi bantuan darurat berupa paket makanan dan hygiene kits; - Penyediaan ruang untuk anak-anak dan sumber air – Pelatihan dan pendampingan dalam pembuatan rencana usaha - Pelatihan Tanggap Darurat dan Core Humanitarian Standard (CHS)

Sumber: Kementerian PPN/Bappenas – JICA. 2021

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan tentang beberapa jenis kegiatan pemberdayaan masyarakat, dukungan terhadap kelompok rentan serta kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan merupakan kegiatan dukungan yang paling banyak dilakukan pada masa tanggap darurat serta masa pemulihan dan rekonstruksi. Oleh karena itu, bisa ditarik kesimpulan bahwa pemberdayaan masyarakat merupakan faktor penting dalam pemulihan mata pencaharian dan penguatan masyarakat serta pertumbuhan sosial ekonomi pascabencana dalam jangka panjang

Kebutuhan pembiayaan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi dengan prinsip membangun kembali Sulawesi Tengah yang lebih baik, lebih aman (*Build Back Better and Saver*) sebesar Rp 22,8 triliun termasuk kebutuhan relokasi pembangunan kembali permukiman warga yang selamat dari bencana tsunami dan likuifaksi diperkirakan sebesar Rp 5 triliun. Kebutuhan dana untuk rehabilitasi dan rekonstruksi di tahun anggaran 2019 sampai 2020 akan langsung dianggarkan melalui mekanisme APBN, termasuk yang bersumber dari hibah dan pinjaman luar negeri.

Beberapa upaya lainnya yang dilakukan untuk pemulihan kondisi sosial dan ekonomi masyarakat adalah penyaluran bantuan stimulan pembangunan/perbaikan rumah korban bencana pada status transisi darurat ke pemulihan yang selanjutnya disebut bantuan stimulan yang diberikan untuk memperbaiki kembali rumah Korban Bencana yang memenuhi standar Pengurangan Risiko Bencana. Hunian Tetap *in situ*, yang disediakan lewat bantuan dana rumah (BDR) atau yang lebih dikenal dengan dana stimulan, diperuntukkan bagi warga yang rumahnya mengalami rusak berat namun tidak berada di zona rawan bencana.

Skema dana stimulan ini pun, dengan besaran dana yang berbeda, diberikan kepada warga yang rumahnya mengalami rusak sedang dan rusak ringan. Sementara untuk kategori rusak berat bantuan diberikan bukan dalam bentuk uang tunai seperti kategori rusak ringan dan sedang, akan tetapi dibangun rumah pengganti. Berikut ini adalah kondisi realisasi penyaluran dana stimulan Kota Palu yang membutuhkan waktu

penyelesaian selama 4 tahun untuk penyelesaiannya disajikan dalam

Tabel 5.4 sebagai berikut :

Tabel 5. 4 Daftar Penerimaan Dan Realisasi Penyaluran Dana Stimulan Kota Palu Tahun 2019 Sampai dengan 2022

TAHUN	TINGKAT KERUSAKAN	PENERIMA	DANA STIMULAN
2019			789.040.000.000
2020	Rusak Berat	920	46.000.000.000
	Rusak Sedang	7.725	193.125.000.000
	Rusak Ringan	17.213	172.130.000.000
		25.858	411.255.000.000
2021	Rusak Berat	477	23.850.000.000
	Rusak Sedang	2.545	63.625.000.000
	Rusak Ringan	15.728	157.280.000.000
		18.750	244.755.000.000
2022	Rusak Berat	113	5.650.000.000
	Rusak Sedang	477	11.925.000.000
	Rusak Ringan	3.717	31.270.000.000
		3.717	48.845.000.000
Total			1.493.895.000.000

Sumber : BPBD Kota Palu. 2023

Bantuan Stimulan perbaikan rumah ini bersumber dari Dana Siap Pakai (DSP) BNPB. Bantuan Stimulan perbaikan rumah merupakan Bantuan Stimulan bagi korban terdampak Bencana untuk bantuan

pembangunan bagi yang rumahnya rusak berat dan juga merupakan Bantuan Stimulan untuk perbaikan rumah korban bencana baik rusak sedang dan ringan. Besaran bantuan stimulan perbaikan rumah paling banyak adalah sebagai berikut a. Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) untuk rumah rusak berat; b. Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) untuk rumah rusak sedang; dan c. Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk rumah rusak ringan.

Kegiatan pemulihan pada sektor ekonomi ini juga paling banyak melibatkan pihak dari lembaga nirlaba salah satunya adalah Yayasan Relief Islami Indonesia (YRII) yang melakukan kegiatan pemulihan mata pencaharian dan peningkatan pendapatan ekonomi bagi ribuan warga terdampak bencana pada tahun 2018 di Kota Palu dan Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah.

Adapun jumlah rumah tangga yang ditangani oleh Yayasan Relief Islami Indonesia sebanyak 2500 rumah tangga. Selain program pemulihan ekonomi yang sementara berjalan, beberapa program lainnya yang akan dikerjakan. Diantaranya *Sustainable Livelihood Recovery Through Islamic Social Enterprise (SULRISE)* juga *Livelihood Recovery in Post Disaster Area (LIREPDA)* dalam kurun waktu program 2 tahun.

3. Kerangka Regulasi dan Kelembagaan.

Perubahan kerangka regulasi pascabencana diawali dengan dilakukannya peninjauan kembali terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Sulawesi Tengah, RTRW Kabupaten/Kota terdampak,

penyusunan Perda RDTR, serta Pembentukan Peraturan Rencana Induk Pemulihan/Rekonstruksi Wilayah Pascabencana Sulawesi Tengah. Dari segi kelembagaan, terdapat urgensi pembentukan lembaga Tim Adhoc Asistensi Rehabilitasi dan Rekonstruksi (TAA-RR) sebagai penanggungjawab rehabilitasi dan rekonstruksi multi-sektor yang dapat dimanfaatkan secara efektif oleh Pemerintah Pusat dan Daerah untuk membantu penyelenggaraan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi lintas bidang. Selanjutnya, berdasarkan Instruksi Presiden No. 8 Tahun 2022, seluruh kementerian/lembaga terkait serta pemerintah daerah di wilayah terdampak untuk melakukan langkah-langkah sesuai tugas, fungsi dan kewenangan masing-masing guna mendukung penuntasan percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana gempa bumi dan tsunami.

Sebelum berlakunya Undang-Undang Penanggulangan Bencana, secara materi, kebijakan-kebijakan tersebut bersifat sektoral dan cenderung terpecah-pecah. Sebagian bergantung pada kebijakan eksekutif dan paradigma yang digunakan dalam melihat masalah bencana masih terfokus pada kegiatan tanggap darurat. Padahal salah satu syarat efektifnya kegiatan penanganan bencana yaitu adanya komitmen politik yang dilakukan pemerintah atas kebijakan baik yang konstitusional, perundangan, peraturan daerah, maupun kebijakan eksekutif. Tanpa adanya sebuah kebijakan yang jelas, maka tidak akan ada norma yang bisa digunakan untuk menentukan maksud dan tujuan, menetapkan kaidah, dan

juga memotivasi perilaku aktor pemangku kepentingan untuk mencapai tujuan tersebut.

Penanganan dan penanggulangan sebagai upaya pemulihan pascabencana di Kota Palu berlangsung berdasarkan regulasi yang dirumuskan dalam bentuk kebijakan pemerintah. Regulasi berupa Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden, Keputusan Menteri hingga Peraturan Daerah baik itu Peraturan Gubernur, Peraturan Walikota menunjukkan jika intervensi Pemerintah dari segi kebijakan sudah cukup banyak sebagai dasar pengambilan kebijakan dalam penyelesaian berbagai masalah yang dihadapi selama ini. Berikut beberapa produk hukum yang ada terkait dengan penanganan bencana termasuk tahapan rehabilitasi dan rekonstruksi yang tersaji pada Tabel 5.5 berikut :

Tabel 5. 5 Regulasi Pemerintah Tentang Penanggulangan Bencana

No	Undang Undang	Peraturan Pemerintah	Peraturan Presiden	Instruksi Presiden	Regulasi Pemerintah Provinsi	Regulasi Pemerintah Kota
1	Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana	Peraturan pemerintah Nomor 21 tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana.	Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2020 Tentang Rencana Induk Penanggulangan Bencana Tahun 2020-2044	Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Percepatan Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pascabencana, Gempa Bumi dan Tsunami di Provinsi Sulawesi Tengah dan Wilayah Terdampak Lainnya.	Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah No. 2 Tahun 2013 Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Rencana Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pascabencana.	Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 5 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana
2	Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum	Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Penanggulangan Bencana.	Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Dalam	Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Penuntasan Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pascabencana	Keputusan Gubernur Nomor 369 Tahun 2020 Tentang Pedoman Peran Serta Lembaga Non Pemerintah Dalam bantuan Pembangunan Hunian Bagi Korban	Keputusan Walikota Nomor 650 Tahun 2019 Tentang Kelompok Kerja Pengadaan Tanah dan Pemukiman Kembali Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi

			Keadaan Tertentu	Gempa Bumi, Tsunami, Dan Likuefaksi Di Provinsi Sulawesi Tengah	Bencana Gempa Bumi, Tsunami dan Likuifaksi	Wilayah Pascabencana Alam di Kota Palu.
3		Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2008 tentang Peran Serta Lembaga Internasional dan Lembaga Asing Non Pemerintah dalam Penanggulangan Bencana.			Rencana Induk Pemulihan Dan Pembangunan Kembali Wilayah Pascabencana Provinsi Sulawesi Tengah	
4					Keputusan Gubernur Nomor 369 Tahun 2020 Tentang Pembatasan Penggunaan Asbes Dalam Pembangunan Hunian Korban Bencana Gempa Bumi, Likuifaksi dan Tsunami di Provinsi Sulawesi Tengah.	

Sumber : Olah Data Primer. 2023 (Dokumen Regulasi)

Pemerintah pusat melalui Presiden telah dua kali menerbitkan Instruksi Presiden (Inpres) terkait penanganan pascabencana di Provinsi Sulawesi Tengah. Pertama Inpres No. 10 tahun 2018 Tentang Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Gempa Bumi dan Tsunami di Provinsi Sulawesi Tengah dan Wilayah Terdampak Lainnya. Dalam rangka percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi untuk pemulihan kehidupan sosial dan kondisi ekonomi masyarakat di wilayah terdampak bencana. Instruksi Presiden ini berlaku sampai dengan Tanggal 31 Desember 2020. Akan tetapi sampai dengan habis masa berlakunya INPRES tersebut pencapaian pemulihan bencana seperti yang diinstruksikan belum juga selesai sehingga Gubernur kemudian mengajukan perpanjangan Inpres sebagai payung hukum penuntasan rehabilitasi dan rekonstruksi

Selanjutnya Presiden menerbitkan Instruksi Presiden tentang penuntasan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana gempa bumi, tsunami dan likueifaksi di Provinsi Sulawesi Tengah yang ditetapkan dengan INPRES No. 8 Tahun 2022, yang disahkan pada Tanggal 14 September 2022. Dalam Inpres itu, diinstruksikan kepada kementerian terkait untuk melaksanakan sesuai tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing dalam rangka penuntasan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana gempa bumi, tsunami, dan likueifaksi di Sulawesi Tengah melalui kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi. Instruksi Presiden ini berlaku sampai dengan Tanggal 31 Desember 2024.

5.2 Komposisi Jaringan Dalam Efektivitas Jaringan Pemulihan Bencana di Kota Palu.

Jika dilihat dari perspektif komposisi maka ada dua unsur utama dalam komposisi jaringan yang terdiri dari ukuran dan keragaman aktor, sementara komposisi aktor dalam organisasi jaringan juga bisa diketahui melalui pemetaan aktor dan relasi yang berlangsung dalam jaringan tersebut. Suatu jaringan memiliki karakteristik utama yaitu sarat dengan kompleksitas yang bersifat substantif, strategis dan kelembagaan aktor atau partisipan dalam jaringan terkait erat dengan skala sosial (*social scale of participating actors*). Skala sosial dalam jaringan bisa terjadi karena konsep jaringan itu berisikan individual, kelompok, organisasi dan jejaring dalam organisasi itu sendiri.

Pembahasan mengenai suatu jaringan tentu akan berhubungan dengan siapa saja pihak, organisasi atau aktor yang terlibat di dalam interaksi. Jaringan dapat berupa individu atau organisasi, dimana sesuai dengan tujuan penelitian komposisi jaringan yang terlibat maka jaringan yang dimaksud adalah jaringan antar organisasi. Sementara yang dimaksud sebagai aktor jaringan ialah seluruh organisasi yang terlibat dalam interaksi dan relasi dalam jaringan. Gabungan para aktor dapat dimaknai sebagai populasi jaringan dimana mereka mempunyai tujuan tertentu dan memiliki peran masing-masing di dalam jaringan, sebagai upaya memahami komposisi aktor yang terlibat dalam upaya penanganan dan pemulihan pascabencana di Kota Palu.

Ukuran dan keragaman aktor dalam jaringan adalah dua konsep penting dalam analisis jaringan sosial. Ukuran aktor mengacu pada jumlah hubungan atau koneksi yang dimiliki oleh suatu aktor dalam jaringan. Aktor yang memiliki banyak hubungan disebut aktor sentral atau aktor yang berpengaruh dalam jaringan tersebut. Sebaliknya, aktor yang memiliki sedikit hubungan disebut aktor perifer atau aktor yang kurang memiliki pengaruh dalam jaringan.

Sementara itu, keragaman aktor mengacu pada seberapa beragam hubungan yang dimiliki oleh suatu aktor dalam jaringan. Aktor yang memiliki hubungan dengan berbagai kelompok atau kategori yang berbeda disebut aktor yang berkeragaman, sementara aktor yang hanya memiliki hubungan dengan kelompok yang sama atau sejenis disebut aktor yang homogen.

Dalam analisis jaringan, kedua konsep ini penting karena akan memberikan informasi tentang peran dan posisi aktor dalam jaringan, serta karakteristik jaringan secara keseluruhan. Aktor yang memiliki banyak hubungan atau aktor sentral, misalnya, dapat berfungsi sebagai penghubung antara kelompok-kelompok dalam jaringan, sementara aktor yang berkeragaman dapat memainkan peran penting dalam menghubungkan kelompok-kelompok yang berbeda secara efektif. Sementara jaringan dengan kombinasi aktor sentral dan aktor berkeragaman memungkinkan terjadinya pertukaran informasi dan sumber daya yang efektif dan efisien dalam jaringan tersebut. Berikut ini adalah

tabel tanggapan aktor terhadap *key factor* komposisi jaringan seperti yang seperti pada tabel 5.6 berikut ini :

Tabel 5. 6 Komposisi Jaringan Dalam Efektivitas Jaringan Pemulihan Bencana di Kota Palu

KEY FACTOR	INDIKATOR	TANGGAPAN AKTOR		
		Pemerintah	Non Pemerintah	Warga Terdampak Bencana
Komposisi Jaringan	Ukuran/Jumlah Aktor	Jumlah aktor besar dan fleksibel	Banyak tetapi tidak efektif	Aktor banyak kurang melibatkan WTB
	Keragaman Aktor	Keragaman tinggi	Keragaman tinggi	Keragaman tinggi

Sumber: Reduksi Data, 2023

Berdasarkan *key factor* yang digunakan melihat efektivitas jaringan aktor dalam penanganan pemulihan pascabencana di Kota Palu menggunakan Indikator ukuran dan indikator keragaman untuk melihat efektivitas jaringan komposisi jaringan aktor sebagai bagian dari upaya pemulihan pascabencana di Kota Palu sebagai berikut :

5.2.1 Ukuran Aktor

Variabel ukuran aktor ini akan membahas hasil penelitian tentang ukuran atau jumlah aktor yang terlibat dalam upaya pemulihan pascabencana di Kota Palu yang bertujuan untuk melakukan perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan publik atau masyarakat sampai tingkat yang memadai pada wilayah pasca bencana, dengan sasaran utama untuk normalisasi atau berjalannya secara wajar semua aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat pada wilayah pasca bencana. Pendekatan *key factor network actor composition* digunakan untuk menilai keberadaan dan

pengaruh jumlah aktor dalam jaringan sebagai bagian utama dari komposisi aktor dalam efektivitas jaringan pemulihan bencana di Kota Palu.

Pada organisasi jaringan tidak ada jumlah aktor yang ideal dalam sebuah organisasi jaringan, besar atau kecilnya jumlah aktor yang terlibat sangat tergantung pada kebutuhan dan tujuan organisasi tersebut. Meski demikian, ada beberapa hal yang bisa menjadi pertimbangan dalam menentukan jumlah anggota atau aktor dalam sebuah organisasi jaringan, antara lain:

- a. Tujuan organisasi: Sebuah organisasi jaringan perlu menentukan tujuan dan misi yang jelas. Hal ini akan membantu dalam menentukan jumlah aktor yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan tersebut.
- b. Skala organisasi: Skala organisasi juga mempengaruhi jumlah aktor yang dibutuhkan. Semakin besar skala organisasi, semakin banyak juga aktor yang dibutuhkan untuk mengelolanya.
- c. Jenis kegiatan: Jenis kegiatan yang dilakukan oleh organisasi juga akan mempengaruhi jumlah aktor yang dibutuhkan. Misalnya, jika organisasi melakukan kegiatan sosial yang melibatkan banyak orang, maka jumlah aktor yang dibutuhkan akan lebih banyak.
- d. Sumber daya: Sumber daya yang tersedia juga perlu dipertimbangkan dalam menentukan jumlah aktor yang dibutuhkan. Jika organisasi memiliki sumber daya yang terbatas, maka jumlah aktor yang dibutuhkan juga harus disesuaikan dengan sumber daya yang ada.

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan jika ukuran aktor dilihat dari jumlah aktor yang terlibat tersedia cukup banyak. Hasil wawancara dengan kepala pelaksana (Kalaksa) BPBD Kota Palu yang memiliki fungsi mengkoordinasikan upaya pemulihan bencana, Bapak PT menjelaskan:

Adapun jumlah aktor atau organisasi yang terlibat dalam upaya pemulihan bencana saat ini tidak ada jumlah yang pasti akan tetapi bergantung dari kebutuhan, saat ini kami melibatkan dinas terkait pada kegiatan tanggap darurat dan pemulihan bencana sesuai dengan kebutuhan, akan tetapi dengan kewenangan yang kami miliki kami bisa meminta instansi lain yang ada untuk ikut terlibat. (Wawancara, 19 Mei 2022)

Pernyataan diatas menjelaskan jika aktor yang terlibat sudah memadai dari segi jumlah, terutama aktor yang berasal dari unsur pemerintah daerah yang menjadi kewenangan BPBD untuk mengkoordinasikan penyelenggaraannya. Karena setiap Organisasi Perangkat Daerah yang tidak bersifat teknis pun bisa dilibatkan jika dibutuhkan seperti misalnya Dinas Kearsipan yang datanya bisa digunakan untuk kebutuhan pemulihan bencana. Kondisi ini menjelaskan jika ukuran aktor yang terlibat dalam jaringan pemulihan bencana selama tidak ini tidak bersifat rigid akan tetapi bisa bertambah sesuai dengan kebutuhan.

Berdasarkan data sekunder dan informasi yang diperoleh dari hasil wawancara dengan NGO yang terlibat melakukan advokasi kepada warga terdampak bencana, menyebutkan jika jumlah aktor yang terlibat dalam upaya pemulihan bencana sangat banyak, akan tetapi tidak terkoordinasi dengan baik sehingga efektivitas kegiatan pemulihan tidak berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Sebagaimana yang disampaikan oleh AM Direktur Sulteng Bergerak sebagai berikut :

Jumlah aktor sudah terlalu banyak, baik dari pemerintah pusat dari kementerian koordinator bahkan melibatkan wakil presiden, belum lagi dari pemerintah daerah termasuk agensi-agensis internasional masalahnya adalah tidak ada koordinasi yang jelas antar lembaga-lembaga tersebut. Sehingga meskipun kelihatan besar tapi kinerja tidak maksimal dan terkesan lambat dalam penanganan pascabencana.. (Wawancara: 5 Februari 2023)

Jika dilihat dari perspektif warga terdampak bencana terhadap jumlah aktor yang terlibat dalam kegiatan bencana ini meski tergolong sangat besar dilihat dari jumlah aktor yang terlibat, akan tetapi belum mengakomodasi kepentingan dan kebutuhan warga terdampak secara menyeluruh. Saat ini kebutuhan dan aspirasi mereka terutama warga yang saat ini masih menghuni hunian itu diperjuangkan oleh lembaga swadaya masyarakat yang selama ini mendampingi dan mengadvokasi kepentingan warga terdampak bencana.

Berikut ini adalah sebagian organisasi aktor yang secara aktif terlibat dalam kegiatan pemulihan pascabencana di Kota Palu yang berasal dari unsur lokal, nasional sampai kepada internasional, beserta peran dan tugasnya dapat dilihat pada tabel 5.7 berikut ini :

Tabel 5. 7 Keterlibatan Aktor Dalam Pemulihan Bencana di Kota Palu

No.	Organisasi/Aktor	Peran dan Tugas
1	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Mengkoordinasikan kegiatan pemulihan bencana. Menetapkan pedoman dan pengarahan sesuai dengan kebijakan Pemda dan Badan Nasional penanggulangan Bencana terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi, serta rekonstruksi secara adil dan setara.

No.	Organisasi/Aktor	Peran dan Tugas
2	Dinas Sosial	Melaksanakan penyiapan data, bahan, dan informasi, advokasi dan fasilitasi pengelolaan perlindungan sosial korban bencana alam,
3	Dinas Kesehatan	Penanggulangan pada tahap pascakrisis kesehatan ditujukan untuk mengembalikan kondisi sistem kesehatan seperti pada kondisi pra krisis kesehatan dan membangun kembali lebih baik (<i>build back better</i>) dan aman (<i>safe</i>).
4	Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan	Perumusan kebijakan urusan Penataan Ruang dan Pertanahan; Pelaksanaan kebijakan urusan Penataan Ruang dan Pertanahan; Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan Penataan Ruang dan Pertanahan; Pelaksanaan administrasi Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan.
5	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman	Membangun kembali tatanan lingkungan yang aman dan nyaman dengan dukungan infrastruktur yang berketahanan terhadap bencana dengan tujuan yang ingin dicapai adalah meningkatkan kualitas lingkungan hidup yang aman,nyaman dan berketahanan bencana, yang dapat diukur dari indeks kota layak huni dan indeks risiko bencana.
6	SKP HAM	Melakukan pengawasan terhadap Rehabilitasi dan Rekonstruksi Hunian Tetap di wilayah Pascabencana Sulawesi Tengah.
7	Sulteng Bergerak	Mewujudkan pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan, adil, setara dan berperspektif mitigasi bencana. Mewujudkan masyarakat berwawasan gender, lingkungan hidup berkelanjutan dan berperspektif mitigasi bencana.
8	Wahana Visi Indonesia	Pengurangan Risiko Bencana (PRB) dan adaptasi perubahan iklim menjadi tiga sektor utama dalam program penanggulangan bencana WVI.Pengurangan Risiko Bencana Berbasis Komunitas.

No.	Organisasi/Aktor	Peran dan Tugas
9	Save The Children	Mengembangkan kemitraan dengan organisasi lokal, dan menyediakan pelatihan dan sumber daya untuk membangun dan memberdayakan komunitas, di mana ada anak-anak yang membutuhkan.
10	Yayasan Budha Tzu Chi Indonesia	Membangun 1.500 hunian tetap yang dilengkapi dengan fasilitas sekolah dan aula pertemuan.
11	Pusat Studi Bencana Universitas Tadulako.	Membantu pemerintah daerah merumuskan manajemen pengelolaan bencana serta mendukung kemitraan dengan NGO yang bekerja dalam pemulihan bencana.
12	Balai Prasarana dan Permukiman Wilayah Sulteng	Meningkatkan pembangunan prasarana dan sarana (infrastruktur) permukiman di perkotaan dan perdesaan dalam rangka mengembangkan permukiman yang layak huni, berkeadilan sosial, sejahtera, berbudaya, produktif, aman, tenteram, dan berkelanjutan untuk memperkuat pengembangan wilayah.
13	Warga Terdampak Bencana	(1) Memberikan informasi kejadian bencana ke BPBD atau Instansi terkait, (2) Melakukan evakuasi mandiri, (3) Melakukan kaji cepat dampak bencana, dan (4) Berpartisipasi dalam respon tanggap darurat sesuai bidang keahliannya.

Sumber : Diolah berdasarkan data sekunder. 2023

Keterlibatan berbagai pihak dalam kegiatan pemulihan pascabencana menjadi salah satu solusi dari keterbatasan pemerintah Kota Palu sebagai penanggung jawab dalam menyelenggarakan kegiatan pemulihan bencana yang memiliki masalah yang kompleks. Jumlah aktor yang terlibat akan berpengaruh kepada hasil yang akan dicapai. Juga perlu diperhatikan kalau jumlah aktor yang terlibat dengan keahliannya masing-masing akan menciptakan sebuah jejaring yang dengan cepat dapat menyelesaikan

permasalahan yang dihadapi. Maka dalam kegiatan pemulihan bencana dalam membangun jaringan aktor pemerintah harus bekerja sama dengan aktor atau lembaga yang memiliki keahlian dengan bidang yang dikerjakan.

Dalam organisasi jaringan, penting untuk memiliki jumlah aktor yang cukup untuk mencapai tujuan organisasi tersebut, namun juga tidak terlalu banyak sehingga sulit untuk mengkoordinasikan kegiatan dan membuat keputusan. Oleh karena itu, perlu dilakukan evaluasi secara berkala untuk menentukan apakah jumlah aktor yang terlibat telah atau belum memenuhi kebutuhan organisasi jaringan.

Meskipun secara umum tidak ada jumlah spesifik organisasi yang mungkin tepat untuk setiap bentuk tata kelola, meskipun beberapa penelitian sebelumnya menunjukkan hasil yang lebih efektif jika jumlah anggota organisasi jaringan dalam jumlah yang lebih sedikit, bentuk tata kelola bersama tampaknya paling efektif dengan kurang dari enam sampai delapan organisasi. sangat memungkinkan jika faktor-faktor lain akan berdampak pada apakah jumlah organisasi terlalu banyak atau tidak untuk ditangani secara efektif oleh bentuk tertentu misalnya, jaringan dengan kepercayaan kepadatan tinggi harus dapat menangani lebih banyak organisasi daripada jaringan dengan kepercayaan yang memiliki tingkat kepadatan rendah.

Variabel ukuran/jumlah aktor yang terlibat dalam pemulihan pascabencana di Kota Palu ini sangat besar jumlahnya terutama dari unsur pemerintah dan NGO akan tetapi belum mampu dikoordinasikan dengan

baik, sehingga sumber daya yang dimiliki oleh masing-masing aktor tidak bisa dimaksimalkan dengan baik. Meski demikian, secara umum, bentuk *Network Analysis Organization* (NAO) mungkin bisa menjadi pilihan paling efektif di jaringan yang memiliki jumlah peserta terbanyak. Karena memiliki struktur administrasi yang unik, sehingga memiliki kemampuan menangani peserta dalam jumlah yang besar dan beragam.

5.2.2 Keragaman Aktor

Organisasi jaringan (*network organization*) adalah jenis organisasi yang terdiri dari sekelompok individu atau organisasi yang bekerja bersama dalam jaringan yang terdiri dari hubungan informal dan fleksibel. Dalam organisasi jaringan, keragaman aktor sangat penting karena setiap aktor memiliki peran yang unik dalam jaringan dan memberikan kontribusi yang berbeda dalam mencapai tujuan bersama. Dalam konteks pemulihan bencana, keragaman aktor merujuk pada keberagaman jenis, sumber daya, dan peran yang dimainkan oleh berbagai entitas yang terlibat dalam upaya pemulihan. Keragaman ini meliputi:

Aktor pemerintah termasuk tingkat lokal, regional, dan nasional. Mereka memiliki peran dalam merencanakan, mengkoordinasikan, dan melaksanakan upaya pemulihan bencana. Berbagai elemen aktor pemerintah tersebut, terdiri dari lembaga yang dibentuk khusus untuk penanganan bencana yang terstruktur dari pusat, provinsi sampai kepada pemerintah daerah dan kota, lembaga teknis dan non teknis dan lain sebagainya. Adapun yang menjadi tugas pemerintah adalah menjamin dan

memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman bencana sampai kepada upaya pemulihan pascabencana. Menyelaraskan peraturan perundang-undangan yang sudah ada. Menjamin terselenggaranya penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, terkoordinasi dan menyeluruh termasuk menghargai budaya lokal yang ada pada daerah tersebut.

Non Government Organization (NGO) dan badan bantuan internasional juga merupakan aktor penting dalam kegiatan pemulihan bencana. Mereka memberikan bantuan kemanusiaan, logistik, rekonstruksi, layanan kesehatan, dan dukungan psikososial kepada korban bencana. Masyarakat lokal yang mendiami dan memiliki pengetahuan wilayah mereka juga memiliki peran yang signifikan dalam pemulihan bencana, mereka selayaknya terlibat dalam rekonstruksi fisik, pemulihan ekonomi, sampai kepada proses pengambilan keputusan terkait pemulihan. Selain itu komunitas lokal juga penting didengar pendapatnya karena memiliki pengetahuan dan keahlian lokal yang berharga untuk dipertimbangkan dalam pemulihan bencana.

Lembaga internasional: Organisasi internasional, seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa, badan bantuan internasional, dan lembaga donor, juga merupakan aktor penting dalam pemulihan bencana. Mereka memberikan dukungan teknis, pendanaan, dan koordinasi untuk membantu pemulihan yang efektif. Aktor yang berasal sektor swasta, termasuk perusahaan, industri, dan perbankan, dapat terlibat dalam pemulihan bencana melalui

sumbangan dana, sumber daya, dan bantuan teknis. Mereka juga dapat berkontribusi pada pemulihan ekonomi dan rekonstruksi infrastruktur.

Hasil penelitian menunjukkan jika dimensi keragaman aktor yang terlibat sebagai peserta jaringan pemulihan bencana sangat beragam, hal ini bisa dilihat dari Instruksi Presiden tentang rehabilitasi dan rekonstruksi bencana di Kota Palu yang memerintahkan pelaksanaan sesuai tugas, fungsi, dan kewenangan kepada 29 lembaga kementerian/setingkat menteri dan lembaga non kementerian dalam rangka penuntasan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana gempa bumi, tsunami, dan likuefaksi di Provinsi Sulawesi Tengah. Selanjutnya ditambah dengan penugasan kepada pemerintah provinsi dan kabupaten/kota yang terdampak bencana.

Berikutnya juga diatur tentang kemitraan dengan berbagai pihak termasuk peran serta dunia usaha, lembaga swadaya masyarakat, masyarakat, dan perguruan tinggi khususnya perguruan tinggi lokal. Berdasarkan hasil tersebut keragaman aktor terwakili dari berbagai unsur seperti unsur pemerintah pusat, pemerintah daerah yang diwakili oleh Dinas/Badan yang terkait dengan upaya pemulihan bencana, unsur akademisi, unsur Organisasi Non Pemerintah lokal dan internasional dan organisasi nirlaba/nonprofit lainnya.

Dalam kegiatan pemulihan bencana, berbagai aktor seperti pemerintah, lembaga kemanusiaan, organisasi masyarakat sipil, dan sukarelawan memiliki latar belakang, pengetahuan, serta pengalaman yang

berbeda satu dengan yang lain. Masing-masing aktor memiliki keragaman keahlian dan perspektif yang berbeda-beda dalam menangani situasi yang kompleks. Aktor dengan pengetahuan dan pengalaman yang beragam dapat saling melengkapi dalam menyediakan solusi yang lebih holistik dan efektif. Berikut ini hasil wawancara yang disampaikan oleh bapak HOU dari Dinas Sosial mengenai keragaman aktor berikut ini:

Aktor dalam jaringan yang terlibat dalam penanganan bencana di Kota Palu memiliki latar belakang dan kemampuan yang beragam bahkan melibatkan organisasi internasional di dalamnya, hal ini bisa menjadi modal untuk mempercepat proses pemulihan yang dilakukan saat ini (Hasil wawancara: 4 Agustus 2022)

Penjelasan tersebut menegaskan jika jumlah aktor yang banyak seperti yang dibahas pada variabel sebelumnya juga disertai dengan keberagaman aktor yang juga bervariasi latar belakang yang dimiliki, aktor yang terlibat tidak saja dari berasal dari dalam negeri akan tetapi juga melibatkan aktor yang berasal dari luar negeri. Keragaman aktor yang terlibat juga memungkinkan para aktor untuk melakukan pertukaran sumber daya atau *Resources Exchange* antar organisasi jaringan merupakan konsekuensi dari ketidakmampuan dalam memenuhi kebutuhannya sendiri dan sebagai akibat dari keterbatasan sumber daya yang dimiliki. Organisasi pemerintah tidak bisa menjadi domain utama dalam pelaksanaan kebijakan, karena sumber daya yang dimiliki terbatas, sehingga membutuhkan aktor lain untuk pemenuhan sumber daya yang mampu menunjang tercapainya tujuan kegiatan pemulihan bencana di Kota Palu.

Pentingnya keragaman aktor dalam pemulihan bencana adalah untuk memastikan bahwa berbagai kepentingan, perspektif, dan sumber daya

dapat diakomodasi dan mampu dikolaborasikan secara efektif. Keragaman ini juga memungkinkan adanya sinergi antara berbagai pihak yang bekerja bersama-sama untuk mencapai pemulihan pascabencana yang berkelanjutan dan inklusif.

Dengan keragaman aktor yang tepat, organisasi jaringan akan dapat menggunakan sumber daya yang beragam baik secara materi maupun keahlian serta pengalaman yang dimiliki dari anggotanya sehingga memiliki kemampuan untuk memperluas jangkauannya ke berbagai wilayah atau sektor yang ditangani untuk mencapai tujuan bersama dan menyelesaikan berbagai masalah yang dihadapi. Berikut adalah hasil pemetaan stakeholder berdasarkan kepentingan dan sumber daya yang dimiliki dalam kegiatan pemulihan bencana di Kota Palu pada tabel 5.8 sebagai berikut :

Tabel 5. 8 Stakeholder Mapping

Stakeholder	Interest	Resources
Pemerintah Pusat	– Pelaksanaan tugas dan fungsi Pertanggung jawaban kinerja	– Otoritas – Anggaran Regulasi
Pemerintah Daerah	– Pembinaan dan pengawasan – Koordinasi	– Otoritas – Legitimasi – Regulasi – Personil
NGO	– Advokasi dan pendampingan – Kontrol sosial	– Organisasi – Pekerja Sosial
Dunia Usaha	– Investasi – Bantuan sosial	– Perusahaan – Modal – Tenaga Kerja
Perguruan Tinggi	– Penelitian – Pengabdian	– Lembaga Penelitian – Tim Ahli

Stakeholder	Interest	Resources
Warga Terdampak Bencana	<ul style="list-style-type: none"> - Memperoleh hak atas bencana. - Perlindungan dan pemenuhan kebutuhan - Pemberdayaan ekonomi dan sosial 	<ul style="list-style-type: none"> - Aspirasi - Partisipasi dalam kegiatan pemulihan bencana.

Sumber: Olah Data Sekunder, 2023

Model Jaringan Aktor adalah sebagai bentuk dari jaringan aktor yang ada dan dibedakan berdasarkan jumlah aktor dalam jaringan yang memiliki peran dan tugasnya masing-masing dapat dibagi ke dalam beberapa model sebagai berikut: 1) Model Triple Helix: (Universitas, Industri, Pemerintah) 2) Model Quadruple Helix: (Universitas, Industri, Pemerintah, dan masyarakat sipil) 3) Model Penta Helix: (*Academician, Business, Community, Government dan Mass Media*) biasa disingkat ABCGM. Jika dilihat dari pendekatan dan pelibatan jaringan aktor yang ada, bisa dipastikan kalau jaringan organisasi pemulihan bencana di Kota Palu telah menerapkan model Penta Helix dalam penanganan pemulihan pascabencana.

5.3 Struktur Jaringan Dalam Efektivitas Jaringan Pemulihan Bencana Di Kota Palu.

Network Structure, yaitu struktur organisasi yang terdiri dari sebuah inti pusat yang dihubungkan melalui jaringan hubungan dengan pihak luar dan pemasok layanan penting lainnya. Organisasi ini mempunyai komponen inti dan menggunakan aliansi strategis atau *outsourcing* untuk menyediakan komponen lainnya. Dalam organisasi aktor jaringan, struktur jaringan mengacu pada pola koneksi atau hubungan antara aktor-aktor yang terlibat dalam jaringan tersebut. Struktur jaringan dapat

mempengaruhi komunikasi, koordinasi, dan aliran informasi antara aktor, serta memengaruhi cara jaringan tersebut beroperasi dan mencapai tujuannya.

1. Potensi keuntungan dari struktur jaringan adalah:

- a. Organisasi dapat bekerja dengan sedikit pegawai tetap dan tidak perlu mengenal sistem internal yang kompleks.
- b. Mengurangi biaya dan dapat meningkatkan efisiensi operasional.
- c. Secara operasional dapat melintasi jarak yang jauh

2. Potensi kerugian dari struktur jaringan:

- a. Kontrol dan koordinasi masalah mungkin timbul dari kompleksitas jaringan.
- b. Potensi kehilangan kontrol atas kegiatan yang tidak bersifat tetap.
- c. Potensi kurangnya loyalitas di kalangan anggota jaringan yang jarang terlibat atau dilibatkan.

Adapun struktur organisasi jaringan pemulihan bencana di Kota Palu merujuk pada regulasi INPRES No. 10 Tahun 2019 tentang percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi yang memberikan instruksi kepada unsur pemerintah pusat sebanyak 35 lembaga kementerian dan non kementerian. Unsur pemerintah daerah terdiri dari pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota terdampak. Termasuk membangun kemitraan dari unsur dari non pemerintah berasal dari Dunia Usaha, NGO internasional dan Lokal serta turut melibatkan Perguruan Tinggi Lokal.

Raab Network Management Model adalah kerangka kerja tata kelola jaringan yang dikembangkan oleh J. David Raab. Model ini membagi tata kelola jaringan menjadi enam area utama, yaitu:

1. Perencanaan strategis: area ini mencakup pengembangan strategi dan rencana jangka panjang untuk pengelolaan jaringan, termasuk pemilihan teknologi yang tepat dan identifikasi sumber daya yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan jangka panjang.
2. Analisis kebutuhan: area ini mencakup penilaian kebutuhan bisnis dan teknis, analisis risiko dan keamanan, serta pemilihan infrastruktur jaringan yang tepat untuk memenuhi kebutuhan tersebut.
3. Perancangan: area ini mencakup desain jaringan secara rinci, termasuk arsitektur jaringan, infrastruktur, topologi, dan konfigurasi perangkat.
4. Implementasi: area ini mencakup instalasi dan konfigurasi perangkat jaringan, serta pengujian dan integrasi jaringan ke dalam lingkungan operasional.
5. Operasi: area ini mencakup pengelolaan jaringan sehari-hari, termasuk pemantauan, pemeliharaan, manajemen kapasitas, manajemen keamanan, dan manajemen performa jaringan.
6. Evaluasi dan perbaikan: area ini mencakup pengukuran kinerja jaringan, evaluasi pengelolaan jaringan secara keseluruhan, identifikasi masalah dan kelemahan dalam pengelolaan jaringan, serta perbaikan dan peningkatan terus-menerus.

Selanjutnya ditampilkan tabel tanggapan informan terkait struktur tatakelola jaringan dalam efektifitas jaringan pemulihan bencana di Kota Palu sebagaimana pada tabel 5.9 sebagai berikut :

Tabel 5. 9 Struktur Jaringan Dalam Efektivitas Jaringan Pemulihan Bencana di Kota Palu

KEY FACTOR	INDIKATOR	TANGGAPAN AKTOR		
		Pemerintah	Non Pemerintah	Warga Terdampak Bencana
Struktur Tatakelola Jaringan	Model Tatakelola	Sesuai Tupoksi	Dibutuhkan wadah pengelolaan	Kurang dilibatkan
	Aturan Kerjasama	Sektoral	Tidak ada	Tidak jelas
	Pengambilan Keputusan	Dikoordinasikan	Kurang dilibatkan	Kurang dilibatkan

Sumber: Reduksi Data, 2023

5.3.1 Model Tata Kelola

Network governance atau yang lebih sering dikenal dengan tata kelola jaringan pemerintah adalah pola kerja sama telah diakui sebagai bentuk penting dari pemerintahan multi organisasi. Tatakelola jaringan dapat diartikan sebagai kombinasi antar struktur dalam pemerintahan atau secara sederhana sehingga dapat diartikan sebagai bentuk kerjasama antar lembaga pemerintah. Tata kelola dalam jaringan organisasi adalah proses pengelolaan jaringan organisasi untuk memastikan bahwa jaringan berfungsi dengan efektif dan efisien, serta sesuai dengan kebijakan dan standar organisasi. Dengan menerapkan prinsip-prinsip tata kelola yang baik dalam pengelolaan jaringan organisasi, organisasi dapat memastikan bahwa jaringan mereka berfungsi dengan efektif dan efisien serta dapat

diandalkan untuk mendukung kegiatan pencapaian tujuan operasional organisasi.

Struktur tata kelola yang mapan akan membawa banyak manfaat bagi seluruh kerja sama, terutama dalam hal efisiensi kerja dan transparansi. Beberapa hal dari struktur organisasi yang ditata dengan baik, diantaranya adalah lebih sedikit gangguan atau hambatan dalam proses pengambilan keputusan karena prosedur dan pembagian tugas dan tanggung jawab ditetapkan dengan jelas; peningkatan keandalan dan kepercayaan karena risiko potensi kesalahpahaman atau masalah komunikasi dikurangi seminimal mungkin.

Tata kelola jaringan pada dasarnya bersifat kompleks. Aktor yang berpartisipasi dalam jaringan memiliki kekuatan dalam membangun hubungan sosial dan kontrak, sehingga dapat mempengaruhi pengambilan keputusan yang diambil. Dengan demikian, maka organisasi akan saling bergantung satu sama lain, karena jaringan menjadi media untuk mencapai tujuan aktor jaringan bahkan mungkin saja menjadi penentu kelangsungan hidup mereka. Tata kelola juga memiliki peran penting dalam mendorong tercapainya efektivitas jaringan aktor. Adapun pengaruh tata kelola dengan efektivitas jaringan dapat dilihat dari bentuk tata kelola dengan jumlah aktor yang terlibat yang digunakan oleh peserta jaringan yang kemudian digunakan untuk menilai bentuk tata kelola organisasi aktor dalam pemulihan pascabencana di Kota Palu sebagaimana disajikan pada tabel 5.10 berikut:

Tabel 5.10 Pengaruh Keefektifan Bentuk Tata Kelola Jaringan

Bentuk Tata Kelola	Tingkat Kepercayaan	Jumlah peserta	Konsensus Tujuan	Tingkat Kebutuhan Kompetensi Jaringan
Shared Governance	Kepadatan tinggi	Sedikit	Tinggi	Rendah
Lead Organization	Kepadatan rendah, sangat terpusat	Sedang	Cukup Rendah	Sedang
Network Administrative Organization	Kepadatan sedang, NAO dipantau oleh anggota	Sedang hingga banyak	Cukup Tinggi	Tinggi

Sumber : Provan, Kennis 2008

Berdasarkan tabel diatas, tata kelola jaringan dibagi berdasarkan 3 bentuk dasar yaitu, *Shared Governance*, *Lead Organization* dan *Network Administrative Organization* (NAO). *Shared governance* adalah bentuk paling sederhana dan paling umum adalah tata kelola partisipan. formatnya diatur oleh anggota jaringan itu sendiri tanpa entitas tata kelola yang terpisah dan unik. Tatakelola dalam bentuk ini dapat dilakukan baik secara formal; misalnya, melalui pertemuan rutin perwakilan organisasi yang ditunjuk, atau lebih informal, melalui upaya berkelanjutan tetapi biasanya tidak terkoordinasi dari mereka yang memiliki andil dalam kesuksesan jaringan. Bentuk kedua dalam tata kelola *Lead Organization*, dimana semua aktivitas tingkat jaringan utama dan keputusan kunci dikoordinasikan melalui anggota jaringan yang berpartisipasi, yang bertindak sebagai organisasi pemimpin. Dengan demikian, tata kelola jaringan menjadi sangat tersentralisasi dan ditengahi, dengan kekuatan asimetris. Bentuk ketiga

Network Administrative Organization (NAO) yang Ide dasarnya adalah bahwa entitas administratif terpisah dibentuk khusus untuk mengatur jaringan dan aktivitasnya.

Berdasarkan pada beberapa bentuk tata kelola jaringan yang dikemukakan di atas, dihubungkan dengan hasil penelitian maka bentuk tata kelola pemulihan bencana di Kota Palu memiliki kecenderungan menggunakan pendekatan model *Network Administrative Organization* (NAO) dalam tata kelola jaringan aktornya. Hal ini disimpulkan berdasarkan karakteristik tata kelola jaringan yang memiliki jumlah peserta jaringan yang besar, begitu juga dengan konsensus tujuan yang cukup tinggi oleh aktor organisasi jaringan dan tingkat kebutuhan terhadap kompetensi jaringan yang berada pada kategori tinggi. Kecenderungan ini bisa dilihat dari masih ada anggota jaringan yang kurang memiliki inisiatif dalam mengambil peran aktif dalam kegiatan pemulihan bencana. Bersikap pasif menunggu arahan dari koordinator jaringan, dalam hal ini BPBD Kota Palu. Jika dilihat komposisinya, keanggotaan jaringan yang mayoritas berasal dari unsur pemerintah sehingga administratif birokratis lebih menonjol dalam operasional jaringan, menyebabkan inisiatif tidak muncul karena lebih fokus pada tugas pokok dan fungsi masing-masing.

Selanjutnya hasil wawancara juga menunjukkan jika aktor jaringan melaksanakan kegiatan pemulihan berdasarkan tugas dan fungsi masing-masing baik di tingkat pemerintah pusat maupun daerah. Seperti yang disampaikan oleh informan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dari BPPW

Sulteng (Instansi vertikal yang berada di bawah kementerian Pekerjaan Umum) Bapak Z menjelaskan bahwa:

Dalam lingkup kementerian PUPR kami memiliki satgas tersendiri yang dikepalai oleh Dirjen Cipta Karya, tugasnya mengkoordinasikan beberapa balai yang terlibat di dalam kegiatan pemulihan bencana di Sulawesi Tengah (Hasil wawancara: 16 Maret 2023)

Secara khusus Kementerian PUPR memiliki Kepala Satuan Tugas (Satgas) Penanggulangan Bencana Kementerian PUPR di Sulawesi Tengah yang dijabat oleh Arie Setiadi Moerwanto, Dirjen Cipta Karya Kementerian PU yang bertugas menyelesaikan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di Sulawesi Tengah serta mengkoordinasikan UPT/ Balai yang menjadi kewenangannya. Jika dibandingkan dengan kementerian yang lain yang ditugaskan dalam INPRES 10 Tahun 2018 tentang Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca bencana di Sulawesi Tengah, Kementerian PUPR tercatat sebagai kementerian yang paling banyak menurunkan sumber dayanya yaitu Ditjen Cipta Karya (BPPW Sulteng). Ditjen Perumahan (BPPP Wilayah Sulawesi II & SNVT Penyediaan Perumahan Sulteng). Ditjen Bina Marga (BPJN XIV Palu). Ditjen Sumber Daya Air (BWS Sulawesi III). Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW).

Pada level pemerintah daerah keterlibatan dalam pelaksanaan dalam organisasi jaringan aktor juga dilakukan berdasarkan tugas dan fungsi masing-masing Organisasi Pemerintah Daerah, seperti dikemukakan oleh kbid perumahan Dinas Perumahan dan Pemukiman Kota Palu yang Ibu N yang menyatakan:

Kami bekerja sesuai dengan tupoksi kami sebagai lembaga teknis, terutama dalam hal penyediaan lahan untuk pembangunan hunian tetap termasuk penyediaan sarana dan prasarananya. Untuk pembangunan hunian tetap satelit yang berskala kecil kami yang bangun, sementara untuk hunian tetap kawasan yang berskala besar dikerjakan langsung oleh kementerian PUPR. (Wawancara: 13 Maret 2023)

Berdasarkan beberapa hasil wawancara yang dilakukan menunjukkan peserta jaringan bekerja berdasarkan tugas pokok dan fungsi masing-masing organisasi. Hubungan yang dibangun dengan aktor lainnya baik dari unsur pemerintah maupun dengan stakeholder lainnya bersifat koordinatif. Belum ada model tata kelola yang dibuat secara kolektif mampu merangkum berbagai kepentingan dan sumber daya yang dimiliki oleh peserta jaringan aktor dengan jumlah yang sangat besar.

Sementara dari warga terdampak bencana menilai jika model tatakelola yang digunakan saat ini masih tidak jelas dalam hal siapa yang bertanggungjawab terhadap kebutuhan dan pemenuhan atas hak mereka sebagai warga terdampak sebagaimana yang dijelaskan oleh salah seorang warga berinisial M sebagai berikut:

Sebagai warga yang mengalami musibah kami merasa pemerintah telah abai dengan nasib kami yang setelah sekian lama bencana berlalu tetapi belum ada kejelasan dengan nasib kami sampai saat ini. Selama ini hanya dijanjikan akan segera disiapkan hunian tetap entah dengan siapa lagi kami meminta tanggungjawab atas kejelasan nasib kami. (Hasil wawancara 12 Agustus 2022)

Secara umum dapat dikatakan bahwa tata kelola organisasi adalah cara untuk mengatur dan mengendalikan hubungan antara pihak manajemen (pengelola) dengan pihak yang berkepentingan (stakeholder) terhadap organisasi. Karena jika sebuah kegiatan tidak memiliki struktur tata kelola, maka mudah untuk terjebak dan kehilangan arah dalam

pencapaian tujuannya. Sehingga penting untuk memastikan model tata kelola yang akan digunakan untuk kegiatan telah terstruktur dengan baik sebelum melakukan kolaborasi.

5.3.2 Aturan Kerjasama

Aturan kerjasama dalam organisasi jaringan mencakup panduan atau pedoman mengenai tugas, tanggung jawab, hak dan kewajiban anggota, serta mekanisme pengambilan keputusan dan penyelesaian konflik. Aturan Kerjasama ini bertujuan untuk memastikan bahwa semua anggota memiliki panduan yang jelas dalam bekerja bersama dalam mencapai tujuan organisasi jaringan.

Aturan kerja sama yang disepakati dalam organisasi jaringan sangat penting untuk mencapai tujuan bersama dan memaksimalkan potensi yang dimiliki oleh anggota jaringan. Berikut beberapa aturan kerja sama yang dapat diterapkan dalam organisasi jaringan:

Komunikasi yang efektif: Anggota organisasi jaringan harus selalu berkomunikasi dengan jelas dan terbuka. Komunikasi yang efektif akan membantu memastikan bahwa semua anggota memiliki pemahaman yang sama tentang tujuan dan rencana organisasi.

Transparansi: Organisasi jaringan harus transparan dalam semua aspek kerja sama. Informasi harus tersedia untuk semua anggota dan keputusan harus dibuat secara kolektif.

Menghormati perbedaan: Anggota organisasi jaringan mungkin berasal dari berbagai latar belakang dan memiliki perspektif yang berbeda. Oleh

karena itu, penting untuk menghargai perbedaan dan mendorong inklusivitas.

Menghormati tanggung jawab masing-masing anggota: Setiap anggota organisasi jaringan memiliki tanggung jawab dan peran yang berbeda. Penting untuk menghormati tanggung jawab masing-masing anggota dan memastikan bahwa semua tugas terpenuhi.

Memperhatikan keamanan: Keamanan informasi dan data sangat penting dalam organisasi jaringan. Penting untuk memastikan bahwa semua data dan informasi penting terlindungi dengan baik.

Komitmen waktu: Waktu adalah sumber daya yang berharga dalam organisasi jaringan. Anggota harus mematuhi jadwal dan tenggat waktu yang telah ditetapkan untuk memastikan kerja sama yang efektif.

Evaluasi berkala: Organisasi jaringan harus melakukan evaluasi berkala untuk memastikan bahwa tujuan organisasi tercapai dan anggota organisasi masih terlibat secara aktif. Dengan menerapkan aturan kerja sama ini, organisasi jaringan diharapkan dapat mencapai tujuan bersama dan memaksimalkan potensi yang dimiliki oleh anggota.

Aturan kerjasama yang seharusnya menjadi pedoman dalam kerjasama dalam upaya bersama pemulihan pascabencana di Kota Palu belum pernah dibuat sebagai dasar dan panduan dalam usaha pencapaian tujuan organisasi jaringan. Hal ini terungkap seperti yang disampaikan oleh Bapak YS dari Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Palu sebagai berikut:

Kalau pedoman kerjasama secara tertulis tidak ada sih, kita berpegang dengan tugas dan fungsi masing-masing saja. Kalau seperti Perkim terkait dengan permukimannya terkait hunian dan infrastruktur dengan kami koordinasinya, untuk warga terdampak bencana koordinasinya dengan dinas sosial. Masing-masing bekerja dengan tugas dan fungsi masing-masing saja. (Wawancara: 4 Februari 2023)

Kondisi ini menunjukkan jika mayoritas peserta jaringan dari unsur pemerintah daerah tidak memiliki pedoman dalam melakukan kerjasama dengan stakeholder yang lain dan memiliki pemahaman jika terkait dengan dokumen kebencanaan berada di bawah kewenangan BPBD yang memang memiliki kewenangan dalam mengkoordinasikan penanganan bencana di Kota Palu. Hal yang sama terjadi dari peserta jaringan lainnya yang bekerja berdasarkan Standar Operasional Prosedur Organisasi masing-masing.

Secara umum BNPB telah mengeluarkan Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Pedoman Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pascabencana. Tujuan dari diterbitkannya Pedoman Umum Rehabilitasi adalah: 1. Memberikan acuan/pegangan bagi penyelenggaraan rehabilitasi; 2. Menjamin ketertiban dan kelancaran penyelenggaraan rehabilitasi; 3. Menjamin pencapaian tujuan rehabilitasi. Pedoman Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca bencana ini kemudian dijadikan panduan bagi Pemerintah dan Pemerintah Daerah dalam menyusun rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana. Pedoman Rehabilitasi dan rekonstruksi ini diharapkan dapat mengurangi kegamangan, mendorong koordinasi para pihak yang terlibat dalam tahap rehabilitasi bencana yang lebih jelas sehingga menghasilkan penanganan

bencana yang lebih efektif. Sebagai pedoman umum, dokumen ini diharapkan dapat berlaku untuk berbagai jenis bencana di seluruh wilayah Indonesia dengan karakteristik masing-masing.

Penjabaran Peraturan Kepala BNPB No. 11 Tahun 2008 tersebut di atas seharusnya menjadi pedoman bersama bagi stakeholder dalam kegiatan pemulihan pascabencana dalam implementasinya belum diketahui oleh seluruh stakeholder yang terlibat dalam penanganan bencana di Kota Palu, sehingga terkesan para pihak bekerja sesuai dengan pedoman berdasarkan tugas pokok masing-masing lembaganya.

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah Dengan Daerah Lain Dan Kerja Sama Daerah Dengan Pihak Ketiga. Memberikan peluang kepada pemerintah daerah untuk membangun menjalin kolaborasi sebagai upaya bersama untuk penanggulangan bencana secara bersama-sama dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama (PKS). Kota Palu bersama dengan 3 kabupaten yang terdampak bencana 28 September 2018 silam seharusnya merealisasikan peluang kerjasama ini, mengingat wilayah memiliki kerentanan bencana tergolong tinggi. Akan tetapi kerjasama antar daerah rawan bencana ini sampai sekarang belum pernah dilakukan.

Aturan kerjasama seharusnya menjadi bagian penting dari keseluruhan penanggulangan bencana yang menjadi dasar kerjasama antar aktor jaringan, menjadi pedoman dalam implementasi tahapan rehabilitasi yang harus dikaitkan dengan tahapan lain. Dalam pengertian ini, bukan saja kegiatan-kegiatan tahapan rehabilitasi berhubungan dengan tahap pra bencana dan tanggap darurat tetapi juga berhubungan dengan tahapan rekonstruksi. Hubungan dan koordinasi antar tahapan ini sangat menentukan efektivitas dan efisiensi penanggulangan bencana. Oleh karena itu, tahapan penanggulangan bencana semestinya tidak ditempatkan sebagai tujuan melainkan cara untuk mencapai efisiensi dan efektivitas penanggulangan bencana secara keseluruhan. Dari pengertian ini, sinkronisasi dan koordinasi yang termuat dalam aturan kerja sama semestinya merupakan kata kunci penanggulangan bencana yang harus dilaksanakan oleh berbagai pihak.

5.3.3 Mekanisme Pengambilan Keputusan

Organisasi jaringan adalah organisasi yang terdiri dari beberapa entitas independen yang saling terhubung dan bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama. Dalam organisasi jaringan, pengambilan keputusan biasanya melibatkan beberapa tahapan dan melibatkan berbagai pihak terkait. Berikut adalah beberapa mekanisme pengambilan keputusan yang umum digunakan dalam organisasi jaringan:

Diskusi dan konsensus: Anggota organisasi jaringan bertemu untuk mendiskusikan isu atau masalah yang dihadapi, dan berusaha mencapai konsensus terkait solusi atau tindakan yang harus diambil.

Delegasi: Sebuah entitas atau individu dalam organisasi jaringan dapat ditugaskan untuk membuat keputusan atas nama kelompok atau organisasi secara keseluruhan.

Voting: Anggota organisasi jaringan dapat memilih atau memberikan suara mereka dalam sebuah pertemuan atau forum untuk memutuskan tindakan atau solusi yang harus diambil.

Keputusan kolaboratif: Ini melibatkan kombinasi dari semua mekanisme di atas, di mana anggota organisasi jaringan bekerja sama untuk mencapai solusi atau tindakan yang terbaik.

Keputusan otonom: Anggota organisasi jaringan dapat membuat keputusan sendiri terkait dengan tindakan atau solusi yang harus diambil, tergantung pada tingkat otonomi yang dimiliki oleh anggota tersebut.

Dalam organisasi jaringan, keputusan sering kali tidak dibuat secara hierarkis atau terpusat, tetapi melalui diskusi, konsensus, dan kolaborasi antar anggota organisasi. Hal ini memungkinkan organisasi jaringan untuk lebih adaptif dan responsif terhadap perubahan yang terjadi dalam lingkungan mereka.

Adapun dari hasil penelitian melalui pengamatan dan wawancara terkait mekanisme pengambilan keputusan pada peserta jaringan pemulihan bencana di Kota Palu menunjukkan pengambilan keputusan

bergantung kepada jenis keputusan yang akan diambil, jika keputusan itu berkaitan dengan unit organisasi jaringan maka akan diserahkan kepada unit masing-masing. Untuk keputusan yang bersifat mengikat buat semua anggota jaringan akan diputuskan oleh manajer jaringan sesuai dengan hasil kesepakatan dan konsensus antar peserta jaringan. Seperti yang disampaikan Bapak Z dari BPPW Sulawesi Tengah berikut ini:

Kami yang merupakan instansi vertikal selalu berkoordinasi dengan pemerintah daerah karena ada beberapa kewenangan yang menjadi domain mereka. Misalnya penyediaan lahan dan penetapan WTB, sementara kami membangun dan menyediakan hunian tetapnya. Mekanisme pengambilan keputusan biasanya melalui forum rapat jika itu melibatkan lintas sektor dan biasanya dipimpin langsung oleh Walikota atau ibu Sekretaris Kota. (Wawancara: 16 Maret 2023)

Pengambilan keputusan yang bersifat penting tersebut biasanya diambil melalui rapat-rapat koordinasi yang dibuat khusus untuk kepentingan tersebut. Jika keputusan itu menyangkut kewenangan pemerintah daerah maka akan diserahkan kepada pemerintah daerah untuk mengambil keputusan kemudian jika kebijakan itu terkait dengan instansi vertikal maka akan diserahkan kepada ketua satgas untuk mengambil keputusan sesuai dengan kewenangan yang dimiliki.

Pengambilan keputusan dianggap sebagai proses yang menghasilkan pemilihan suatu tindakan di antara beberapa kemungkinan alternatif. Setiap proses pengambilan keputusan menghasilkan pilihan akhir; yang mengikuti proses mengidentifikasi dan memilih alternatif berdasarkan nilai dan preferensi pembuat keputusan, Hubungan antar aktor satu sama lain merupakan aspek penting dalam proses pengambilan keputusan, guna meredam konflik. Banyak proyek, strategi atau keputusan modifikasi gagal

karena berbagai alasan, salah satu yang penting mungkin karena kurangnya dukungan dari aktor kunci yang terlibat dalam rencana tersebut.

Informasi berbeda terkait pengambilan keputusan yang diambil oleh manajer jaringan berasal dari informan dari pihak NGO yang menyatakan jika mereka kurang dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan. Sebagaimana yang disampaikan oleh AM dari NGO Sulteng Bergerak berikut ini:

Selama ini secara pribadi sebagai direktur tidak pernah terlibat dalam proses pengambilan keputusan dalam kegiatan pemulihan bencana, sekretaris kota palu sebagai pemimpin jaringan tidak kelihatan kinerjanya terkait dengan tugasnya. Ini bisa dilihat selama ini tidak pernah ada informasi dan pernyataannya di media yang bisa kita lihat. (Wawancara: 5 Februari 2023)
Penilaian yang disampaikan di atas muncul karena adanya perbedaan

pendapat dan kepentingan antara peserta jaringan dari pihak pemerintah daerah dengan Organisasi Non Pemerintah dalam menyikapi kepentingan warga terdampak bencana. Mereka menganggap selama ini pemerintah abai dalam memperhatikan kepentingan warga terdampak bencana sejauh ini. Terkait dengan isu penyediaan hunian tetap ini, beberapa kali terjadi demonstrasi yang dilakukan oleh warga terdampak bencana kepada Walikota yang difasilitasi oleh NGO yang selama ini melakukan pendampingan kepada warga terdampak bencana di Kota Palu.

Proses pengambilan keputusan memang memiliki tantangan yang besar dalam jaringan organisasi karena aktor yang berbeda memiliki latar belakang, tuntutan dan sumber daya yang berbeda, namun semuanya bergantung satu sama lain untuk mencapai tujuan bersama. Ketika memiliki struktur seperti jaringan, aktor membutuhkan dukungan tertentu dari aktor

lain. dalam hal ini, aktor perlu bekerja sama untuk mencapai tujuan tertentu atau aktor membutuhkan dukungan untuk memfasilitasi persetujuan keputusan atas rencana tindakan yang diambil.

5.4 Proses Manajerial Efektivitas Jaringan Pemulihan Bencana Di Kota Palu.

Proses manajerial dalam organisasi jaringan melibatkan koordinasi dan pengambilan keputusan antara berbagai unit bisnis atau entitas yang saling terhubung. Manajer dalam organisasi jaringan harus memahami bagaimana merancang, mengelola, dan mengoptimalkan kegiatan mereka agar tetap efektif dan efisien. Berikut adalah beberapa proses manajerial yang umum dilakukan dalam organisasi jaringan, beberapa langkah yang mesti dilakukan dalam proses manajerial ini, menjalankan koordinasi yang dilakukan oleh manajer jaringan dengan anggota jaringan lainnya untuk memastikan bahwa keputusan yang diambil sejalan dengan tujuan organisasi yang telah ditetapkan sebelumnya. Selanjutnya melakukan pengorganisasian: Manajer dalam organisasi jaringan harus mengorganisir sumber daya manusia dan material yang tersedia untuk mencapai tujuan organisasi secara efisien dan efektif. Pengorganisasian yang baik akan membantu manajer memastikan bahwa setiap unit bisnis bekerja dengan saling koordinasi dan mendukung satu sama lain.

Secara umum ada beberapa tahapan yang dapat dilakukan dalam proses manajerial organisasi jaringan yang dikoordinasikan oleh pemimpin jaringan sebagai bagian dari tanggung jawab pekerjaannya. Setelah merencanakan dan mengorganisir pelaksanaan kegiatan, manajer dalam

organisasi jaringan harus memastikan bahwa semua unit bisnis melaksanakan rencana dengan baik. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa setiap unit kegiatan memahami tugas dan tanggung jawab masing-masing, serta mengikuti prosedur yang telah ditetapkan. Tugas berikutnya adalah melakukan pengawasan: Manajer dalam organisasi jaringan harus memantau kinerja setiap unit bisnis secara berkala. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa setiap unit bisnis berjalan sesuai dengan rencana dan tujuan organisasi secara keseluruhan. Pengawasan yang baik juga dapat membantu manajer mengidentifikasi masalah dan memperbaiki kegiatan organisasi. Tugas terakhir adalah melakukan evaluasi: Manajer dalam organisasi jaringan harus melakukan evaluasi kinerja organisasi secara keseluruhan secara berkala. Evaluasi yang baik menjadi penting karena akan membantu manajer memahami kekuatan dan kelemahan operasi organisasi serta memberikan dasar untuk meningkatkan kinerja organisasi di masa depan.

Melalui serangkaian kegiatan tersebut diatas, manajer dalam organisasi jaringan dapat mengoptimalkan kinerja organisasi secara keseluruhan dengan mengkoordinasikan dan mengintegrasikan kegiatan berbagai unit bisnis yang terkait. Terkait dengan proses manajerial yang telah dilakukan pada saat setelah bencana terjadi, berikut ini akan ditampilkan tabel tanggapan informan terkait proses manajerial jaringan dalam efektifitas jaringan pemulihan pascabencana bencana di Kota Palu seperti pada tabel 5.11 berikut ini :

Tabel 5.11 Proses Manajerial Dalam Efektivitas Jaringan Pemulihan Bencana di Kota Palu

KEY FACTOR	INDIKATOR	TANGGAPAN AKTOR		
		Pemerintah	Non Pemerintah	Warga Terdampak Bencana
Proses Manajerial	Strategi & Tujuan	Ada visi dan tujuan yang jelas	Tidak visi bersama organisasi jaringan	Tidak visi bersama organisasi jaringan
	Transparansi Komunikasi	Terjadi Pertukaran Informasi secara transparan	Tidak transparan	Tidak transparan

Sumber: Reduksi Data, 2023

Selanjutnya proses manajerial dalam jaringan organisasi kegiatan pemulihan pascabencana akan diuraikan dengan menggunakan variabel strategi dan tujuan dengan transparansi komunikasi sebagai berikut :

5.4.1 Strategi dan Tujuan.

Merancang strategi dan tujuan yang baik, menjadikan organisasi jaringan mampu meningkatkan kinerja operasional secara keseluruhan dan mengoptimalkan potensi dari hubungan antar unit atau entitas yang ada. Sementara untuk mengelola jaringan agar berjalan efektif, perlu dikembangkan strategi secara keseluruhan pada semua tingkat jaringan. Pengembangan strategi ini meliputi pengembangan visi dan misi yang jelas, menetapkan tujuan dan sasaran bersama, serta menyusun definisi secara jelas terhadap hasil yang hendak dicapai

Menurut Fred R. David (2011) menjelaskan bahwa proses manajemen strategi terdiri dari tiga tahapan, yaitu, memformulasikan strategi,

mengimplementasikan strategi dan mengevaluasi strategi dengan penjelasan sebagai berikut.

1. Tahap memformulasikan strategi antara lain menetapkan Visi dan Misi, mengidentifikasi peluang dan tantangan yang dihadapi organisasi dari sudut pandang eksternal, menetapkan kelemahan dan keunggulan yang dimiliki organisasi dari sudut pandang internal, menyusun rencana jangka panjang, membuat strategi-strategi alternatif dan memilih strategi tertentu yang akan dicapai.
2. Tahap mengimplementasikan strategi memerlukan suatu keputusan dari pihak yang berwenang dalam mengambil keputusan untuk menetapkan tujuan tahunan, membuat kebijakan, memotivasi pegawai, dan mengalokasikan sumber daya yang dimiliki sehingga strategi yang sudah diformulasikan dapat dilaksanakan. Pada tahap ini dilakukan pengembangan strategi pendukung budaya, merencanakan struktur organisasi yang efektif, mengatur ulang usaha pemasaran yang dilakukan, mempersiapkan anggaran, mengembangkan dan utilitasi sistem informasi serta menghubungkan kompensasi karyawan terhadap kinerja organisasi. Mengimplementasikan strategi sering disebut sebagai "*action stage*" dari manajemen strategis. Pengimplementasian strategi memiliki maksud memobilisasi para pegawai dan manajer untuk menerjemahkan strategi yang sudah diformulasikan menjadi aksi.
3. Tahap mengevaluasi strategi adalah tahap terakhir dalam manajemen strategis. Para manajer sangat perlu untuk mengetahui ketika ada

strategi yang sudah diformulasikan tidak berjalan dengan baik. Evaluasi strategi memiliki tiga aktivitas yang fundamental, yaitu mereview faktor-faktor internal dan eksternal yang menjadi dasar untuk penyusunan strategi, serta mengukur performa dan mengambil langkah korektif.

Strategi penyelenggaraan penanganan pascabencana diatur dengan Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Pedoman Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pascabencana yang dibagi menjadi 2 bagian yakni rehabilitasi dan rekonstruksi. Kegiatan Rehabilitasi seperti yang termuat dalam pedoman rehabilitasi pascabencana oleh BNPB adalah : 1. Melibatkan dan memberdayakan masyarakat dalam tahapan pelaksanaan rehabilitasi. 2. Memperhatikan karakter bencana, daerah dan budaya masyarakat setempat. 3. Mendasarkan pada kondisi aktual di lapangan (tingkat kerugian/ kerusakan serta kendala medan). 4. Menjadikan kegiatan rehabilitasi sebagai gerakan dalam masyarakat dengan menghimpun masyarakat sebagai korban maupun pelaku aktif kegiatan rehabilitasi dalam kelompok swadaya. 5. Menyalurkan bantuan pada saat, bentuk, dan besaran yang tepat sehingga dapat memicu/membangkitkan gerakan rehabilitasi dan penanganan bencana yang menyeluruh.

Strategi dalam Penyelenggaraan Rekonstruksi ini adalah: 1. Melibatkan partisipasi masyarakat sebesar mungkin, baik masyarakat yang terkena bencana maupun masyarakat secara umum, melalui proses memberdayakan masyarakat dalam berbagai kegiatan penyelenggaraan

rekonstruksi dan dengan menciptakan situasi kondusif bagi peran serta masyarakat yang sebesar-besarnya dalam kegiatan rekonstruksi, melalui mekanisme pelibatan yang sederhana. 2. Memanfaatkan kearifan lokal berdasarkan pada kondisi aktual di lapangan, melalui program yang mengacu kepada kebijakan pemerintah dengan memperhatikan kondisi sosial dan budaya masyarakat. 3. Mendorong pengembangan kapasitas dalam pelaksanaan rekonstruksi, baik ketika perencanaan, pelaksanaan, monitoring maupun penegakkan aturan-aturan yang ada, untuk menjamin hasil rekonstruksi yang memiliki ketahanan yang lebih baik terhadap bencana di masa yang akan datang, baik di tingkatan pemerintahan, masyarakat, komunitas lokal maupun individu. 4. Mengutamakan solusi jangka panjang dari pada penyelesaian masalah-masalah yang bersifat sementara. 5. Memberikan perhatian khusus kepada usaha-usaha berkelanjutan yang bersifat lokal. 6. Menggunakan proses perencanaan yang terintegrasi, dengan penetapan prioritas jangka pendek, menengah dan panjang. 7. Mengutamakan usaha-usaha untuk memulihkan kondisi ekonomi lokal dengan cepat sebagai bagian dari kegiatan prioritas jangka pendek, melalui pelibatan sebanyak-banyaknya berbagai pelaku ekonomi lokal dalam proses rekonstruksi. 8. Mengintegrasikan teknologi maju dengan sumber daya lokal yang sesuai. 9. Menggunakan rencana implementasi yang sederhana. 10. Memastikan tersedianya akses informasi mengenai semua kegiatan rekonstruksi bagi semua pemangku

kepentingan dalam rangka membangun komunikasi untuk menjamin akuntabilitas dan transparansi proses rekonstruksi.

Sebuah strategi dibuat sebagai pedoman dalam memenuhi tujuan organisasi. Manajer organisasi membuat strategi untuk menetapkan batasan terhadap tujuan organisasi yang ingin dicapai. Strategi dimulai dengan sebuah penentuan Misi. Misi merupakan pernyataan yang menyatukan organisasi agar mengetahui tujuan organisasi. Biasanya Misi merupakan pernyataan unik yang berkaitan dengan diferensiasi organisasi sebagai pembeda dengan organisasi lainnya. Berdasarkan hal tersebut maka strategi menjadi serangkaian rencana yang dibuat agar tujuan dapat berjalan dan sesuai dengan ekspektasi yang ditargetkan. Rangkaian aktivitas tersebut yang dapat dinyatakan sebagai proses dalam organisasi yang diturunkan berdasarkan pernyataan Misi organisasi.

Selanjutnya pelaksanaan strategi dan tujuan organisasi jaringan pemulihan bencana di Kota Palu bisa dilihat dari Visi dan Misi yang menjadi tujuan masa depan suatu organisasi atau lembaga, Dimana di dalamnya dituangkan pikiran-pikiran yang disusun berdasarkan tujuan sebuah organisasi dibuat. Misi menjadi pokok pikiran dan akan menjadi gambaran masa depan dari tujuan organisasi yang ingin dicapai. Selanjutnya masing-masing OPD telah menyusun Rencana Strategis (Renstra) berupa dokumen perencanaan jangka menengah yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama jangka waktu tertentu dengan menganalisis potensi, peluang dan kendala yang ada. Renstra Dinas/Badan Kota Palu

pada Tahun 2021-2026 adalah dokumen perencanaan jangka menengah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas/Badan serta berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Palu Tahun 2021-2026, yang menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) dan Rencana Kerja (Renja) OPD selama periode Renstra.

Visi Misi Pemerintah Kota Palu telah memuat penjabaran Misi yang jelas terkait dengan kondisi Kota Palu yang rentan akan bencana yakni:

VISI : Membangun Kota Palu Yang Mandiri, Aman Dan Nyaman, Tangguh serta Profesional Dalam Konteks Pembangunan Berkelanjutan berbasis Kearifan Lokal Dan Keagamaan.

MISI :

1. Membangun perekonomian yang mandiri dan siap bersaing dalam perkembangan ekonomi regional dan global
2. Membangun kembali tatanan lingkungan yang aman dan nyaman dengan dukungan infrastruktur yang berketahanan terhadap bencana
3. Membangun sumber daya manusia yang tangguh menghadapi perkembangan global dan mampu beradaptasi terhadap bencana dan covid-19
4. Menciptakan pemerintah yang profesional dan selalu hadir melayani.

Berdasarkan hasil penelusuran data sekunder diperoleh hasil jika saat ini salah satu pendekatan dalam menyusun strategi yang dipakai adalah Visi dan Misi pemerintah Kota Palu yang berkaitan dengan bencana atau OPD masing-masing, secara khusus belum ada rencana strategis yang dibuat oleh OPD teknis maupun non teknis dalam hal penanganan dan pemulihan pasca bencana yang melibatkan aktor jaringan diluar unsur pemerintah.

Strategi mencapai tujuan pemulihan bencana selanjutnya adalah menetapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang merupakan suatu rangkaian instruksi secara tertulis yang mendokumentasikan kegiatan atau proses rutin, yang menyediakan informasi bagi individu atau kelompok dalam menjalankan kegiatan dan memberikan konsistensi pada kualitas dan integritas dari target yang ingin dicapai. Dengan cara itu dapat diperkecil risikonya sehingga suatu kegiatan dapat berjalan sesuai prosedur yang ditetapkan. Fungsi SOP adalah menjelaskan secara rinci proses kerja yang berlangsung secara rutin, yang harus diterapkan atau diikuti. SOP bertujuan agar setiap orang/pihak mengetahui secara jelas peran dan posisinya masing-masing, agar setiap orang/pihak mampu menjaga konsistensi dalam menjalankan prosedur kerja, dan untuk memberikan keterangan/kejelasan tentang alur/proses kerja dan tanggung jawab masing-masing. SOP dalam Manajemen Bencana merupakan prosedur operasi baku yang disusun pada saat normal (pada saat tidak terjadi bencana). SOP ditetapkan oleh pihak/pejabat yang berwenang, mencakup

keseluruhan bidang tugas/aspek kegiatan pada seluruh tahapan/siklus (pencegahan dan mitigasi, kesiapsiagaan, tanggap darurat, dan pemulihan bencana).

Pemerintah Kota Palu saat ini menginisiasi penyusunan Rencana Kontijensi Bencana Gempa Bumi dan Tsunami Kota Palu yang bertujuan sebagai alat manajemen yang digunakan untuk menganalisis dampak potensi krisis, agar dapat mengatur langkah lebih awal yg tepat untuk menghadapi secara tepat waktu, efektif dan sesuai yang dibutuhkan oleh masyarakat yang terdampak. Serta untuk meningkatkan upaya penanggulangan bencana & kedaruratan. Seperti yang dijelaskan oleh Kalak BPBD menyebutkan jika dokumen tersebut direncanakan berisi standar operasional prosedur (SOP) dalam penanganan bencana alam gempa bumi dan tsunami di Kota Palu.

Hal lain yang dilakukan oleh pemerintah Kota Palu saat ini dalam hal strategi penataan ruang pascabencana adalah melakukan revisi terhadap Peraturan Daerah (Perda) Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) 2010 – 2030 menjadi Perda RTRW 2021 – 2041 yang oleh informan sekretaris Bappeda Bapak IM disebutkan jika:

RTRW yang dihasilkan sekarang ini sudah sangat sensitif bencana jika dibandingkan dengan RTRW sebelumnya. Ada ratusan kata tentang bencana yang termuat di dalamnya. dimana mitigasi bencana menjadi bagian penting di dalamnya untuk meminimalisir risiko dampak yang ditimbulkan oleh bencana. Misalnya larangan pembangunan kembali hunian dan pusat kegiatan pada beberapa lokasi rawan bencana seperti zona sempadan pantai dan wilayah rawan likuefaksi yang bersifat masif. (Wawancara: 12 April 2023)

Meski begitu ada beberapa catatan penting terkait Perda RTRW 2021-2041 yang dihasilkan tersebut seperti penelitian yang dilakukan oleh Givents (2022) yang menyebutkan jika pemerintah Kota Palu tidak terbuka mengenai informasi tentang naskah akademik, dokumen peninjauan kembali dan *shape file* Perda Rencana Tata Ruang dan Wilayah Kota Palu yang dibuat, sehingga publik tidak dapat berpartisipasi memberikan masukan secara substansi terhadap Perda tersebut. Sejalan dengan itu pihak perwakilan NGO memberikan penilaian jika RTRW yang disusun tersebut dilakukan secara tergesa-gesa tanpa melibatkan masyarakat secara luas dan tanpa kajian yang mendalam. Seperti yang dikemukakan oleh Bapak FO berikut ini :

Substansi tata ruang yang kami pahami dan yakini adalah memberikan perlindungan kepada setiap warga negara dan untuk kepentingan bersama, memberikan perlindungan terhadap lingkungan hidup dan mengintegrasikan penanggulangan bencana ke dalamnya. Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) beberapa lokasi pasca bencana yang diajukan juga perlu dipertimbangkan kembali sebab proses-proses ini minim sosialisasi dan tidak melibatkan partisipasi publik secara luas. (Hasil Diskusi Publik RTRW April 2021)

Perbedaan yang tajam antara pihak pemerintah dan Organisasi Non Pemerintah terlihat ketika membahas tentang penetapan strategi dan tujuan yang berdampak kepada masyarakat, padahal tujuan dan kepentingan aktor dalam jaringan ini sejalan untuk memulihkan kondisi awal masyarakat seperti sediakala sebelum bencana terjadi. Hal ini tidak terjadi ketika penetapan strategi dan tujuan disusun untuk kepentingan internal masing-masing organisasi aktor, seperti pada penyusunan Visi Misi dan SOP penanganan bencana. Olehnya dibutuhkan sebuah penyusunan

strategi dan penetapan tujuan organisasi jaringan aktor yang melibatkan semua unsur stakeholder sebagai upaya penyelesaian konflik yang mungkin timbul antar peserta organisasi jaringan aktor.

Strategi dan tujuan dalam organisasi jaringan merupakan bentuk organisasi yang terdiri dari berbagai unit atau entitas yang saling terkait dan bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama. Strategi dan tujuan organisasi jaringan harus dirancang dengan cermat untuk memastikan bahwa setiap unit bisnis bekerja dengan saling koordinasi dan mendukung satu sama lain.

5.4.2 Transparansi Komunikasi

Konsep transparansi komunikasi mengacu pada kondisi dimana informasi, data, dan komunikasi yang dibagi secara terbuka, jujur, dan dapat dipercaya diantara anggota organisasi jaringan. Hal ini sangat penting bagi organisasi jaringan, karena adanya kebutuhan untuk koordinasi yang erat antara unit bisnis atau entitas yang terkait dalam mencapai tujuan bersama. Berikut adalah beberapa teori dan konsep transparansi komunikasi untuk efektivitas organisasi jaringan:

Teori sistem menyatakan bahwa setiap organisasi harus dilihat sebagai sistem yang terdiri dari berbagai komponen yang saling terkait dan saling mempengaruhi. Oleh karena itu, transparansi komunikasi harus diterapkan pada seluruh sistem organisasi jaringan untuk memastikan bahwa informasi dan data yang dibagikan secara terbuka dan jujur pada setiap unit jaringan. Teori jaringan mengacu pada konsep bahwa organisasi

jaringan terdiri dari berbagai unit atau entitas yang terkait dan bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama. Dalam konteks ini, transparansi komunikasi sangat penting untuk memastikan bahwa setiap unit memiliki akses ke informasi yang diperlukan untuk bekerja secara efektif dengan unit lainnya dalam organisasi jaringan aktor.

Konsep kepercayaan adalah konsep penting dalam transparansi komunikasi. Kepercayaan yang tinggi di antara anggota organisasi jaringan akan memastikan bahwa informasi yang dibagikan secara terbuka dan jujur, dan bahwa semua anggota organisasi dapat bekerja dengan saling koordinasi dan saling mendukung satu sama lain. Konsep Akuntabilitas: Konsep akuntabilitas adalah kemampuan organisasi jaringan untuk bertanggung jawab atas tindakan dan keputusan mereka kepada semua pemangku kepentingan, termasuk para anggota unit bisnis dan entitas yang terkait. Transparansi komunikasi akan memungkinkan organisasi jaringan untuk menjalankan akuntabilitas yang efektif dengan menyediakan informasi yang diperlukan untuk membuat keputusan yang tepat.

Konsep komunikasi terbuka mengacu pada praktik menginformasikan setiap orang terkait dengan informasi dan keputusan yang berdampak pada organisasi jaringan. Komunikasi terbuka memastikan bahwa setiap anggota organisasi jaringan memiliki akses ke informasi yang diperlukan dan bahwa komunikasi yang efektif dapat terjalin pada setiap unit bisnis atau entitas yang terkait.

Dari hasil wawancara dengan Ibu N dari Dinas Perumahan dan Permukiman menjelaskan aspek dari transparansi yang terbangun selama ini antar peserta jaringan sebagai berikut:

Kalau secara administratif kita pasti menggunakan persuratan, tapi karena butuh waktu maka kami biasa menggunakan via WA atau apa, karena kalau menggunakan surat harus ditandatangani pejabat, harus diantar lagi sementara ini sifatnya mendesak. Kalau urusan kebencanaan kami siap, harus siap. Soal transparansi kami sangat terbuka dengan semua pihak (Hasil Wawancara: 13 Maret 2023)

Penjelasan di atas menggambarkan jika hal-hal yang bersifat formal yang diterapkan selama ini oleh peserta jaringan dari Organisasi Pemerintah Daerah jika terkait dengan penanganan bencana bisa dikecualikan untuk masalah bersifat darurat atau mendesak seperti masalah kebencanaan. Ini menunjukkan telah terbangun kesadaran bersama jika kegiatan kebencanaan membutuhkan reaksi cepat dalam penanganannya. Adapun dengan pihak lain di luar OPD akan dilibatkan sesuai dengan kebutuhan dari organisasi.

Adapun penilaian berbeda terhadap transparansi komunikasi dalam organisasi jaringan ini diperoleh dari wawancara dari unsur NGO bapak AM yang menjelaskan:

Pada beberapa kesempatan kami mengusulkan agar dibuat pemerintah terbuka kepada semua pihak terutama warga penyintas, karena sudah 4 tahun pascabencana berlalu mereka masih banyak yang mendapatkan yang belum mendapatkan hunian yang mejadi haknya sekarang masih tinggal di hunjara. Mereka butuh kepastian informasi tentang bagaimana nasib mereka kedepan. (Hasil wawancara: 5 Februari 2023)

Beberapa usulan dari pihak NGO seperti meminta agar dibuat posko pengaduan atau pusat informasi bagi warga terdampak bencana sebagai sarana untuk menyampaikan permasalahan yang dihadapi serta tempat

memperoleh informasi mengenai nasib mereka, akan tetapi sampai saat ini belum direalisasikan oleh pihak Pemerintah Kota Palu.

Permasalahan sulitnya membangun komunikasi dengan pemerintah Kota Palu terhadap pihak lain yang ingin berpartisipasi dalam kegiatan pemulihan bencana merupakan salah satu kendala tercapainya efektivitas jaringan dari dimensi transparansi komunikasi, seperti yang informasi yang disampaikan oleh informan dari pihak akademisi Bapak RE Kepala Pusat Studi Kebencanaan Universitas Tadulako sebagai berikut:

Saat ini banyak pihak, terutama lembaga bantuan yang lebih memilih lokasi di daerah lain di luar Kota Palu yang juga terdampak bencana, akibat kurang terbukanya informasi dan komunikasi dengan pihak pemerintah Kota Palu terhadap organisasi bantuan yang akan masuk. Sehingga mereka lebih memilih untuk berkegiatan di Kabupaten Sigi atau Donggala yang dianggap mudah dalam melakukan koordinasi. (Hasil wawancara: 20 Desember 2022)

Jika melihat kondisi berdasarkan data yang ada terlihat jika program pemulihan bencana berupa pelatihan dan pendampingan oleh pihak seperti lembaga internasional yang akhirnya mengalihkan kegiatan dan program pemulihan bencana untuk warga terdampak ke kabupaten lain yang juga terdampak bencana, seperti Kabupaten Sigi dan Donggala karena alasan tidak responsifnya pemerintah kota terhadap program yang mereka buat. Hal tersebut menunjukkan jika pada aspek transparansi komunikasi tidak berjalan dengan baik antar sesama peserta jaringan yang maupun dengan pihak lain yang berkepentingan dengan program pemulihan pascabencana.

Menerapkan teori dan konsep transparansi komunikasi ke dalam organisasi jaringan menjadi hal penting untuk dilakukan untuk dapat memastikan bahwa informasi, data, dan komunikasi yang dibagikan

dilaksanakan secara jujur dan terbuka, sehingga memungkinkan anggota organisasi untuk bekerja dengan saling berkoordinasi dan mendukung satu sama lain untuk mencapai tujuan bersama.

5.5 Faktor Relasi Dalam Efektivitas Jaringan Pemulihan bencana Di Kota Palu.

Faktor relasi sangat penting dalam efektivitas jaringan karena organisasi jaringan terdiri dari berbagai unit bisnis atau entitas yang terkait yang bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama. Berikut adalah beberapa faktor relasi yang dapat mempengaruhi efektivitas jaringan:

Komunikasi: Komunikasi adalah faktor relasi yang juga sangat penting dalam efektivitas jaringan. Komunikasi yang efektif memastikan bahwa semua anggota jaringan memahami tujuan dan sasaran bersama, dan bahwa setiap anggota dapat memperoleh akses ke informasi yang diperlukan untuk membuat keputusan yang tepat.

Interdependensi: Faktor relasi yang mempengaruhi efektivitas jaringan lainnya adalah interdependensi. Jaringan terdiri dari entitas atau unit bisnis yang saling bergantung satu sama lain, dan ketergantungan ini memastikan bahwa setiap anggota jaringan harus bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama.

Keterlibatan: Keterlibatan adalah faktor relasi lainnya yang mempengaruhi efektivitas jaringan. Anggota jaringan harus merasa terlibat dan berpartisipasi aktif dalam jaringan untuk memastikan bahwa mereka memiliki kontribusi yang signifikan dalam mencapai tujuan bersama.

Pertukaran Sumber Daya: Pertukaran sumber daya adalah faktor relasi yang juga penting dalam efektivitas jaringan. Anggota jaringan harus dapat saling membagi sumber daya, seperti pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman, demi memastikan bahwa setiap anggota dapat memperoleh keuntungan dari jaringan tersebut. Berikut ini akan ditampilkan tabel tanggapan informan terkait faktor relasi jaringan dalam efektivitas jaringan pemulihan pascabencana bencana di Kota Palu seperti yang disajikan pada tabel 5.12 sebagai berikut :

Tabel 5. 12 Faktor Relasi Dalam Efektivitas Jaringan Pemulihan Bencana di Kota Palu

KEY FACTOR	INDIKATOR	TANGGAPAN AKTOR		
		Pemerintah	Non Pemerintah	Warga Terdampak Bencana
Faktor Relasi	Kepercayaan	Tinggi	Rendah	Sedang
	Harmoni & Komitmen	Memaksimalkan sumber daya yang dimiliki	Maksimalkan sumber daya yang dimiliki	Memaksimalkan sumber daya yang dimiliki
	Gaya Kepemimpinan	Memiliki kompetensi dan partisipatif	Tidak transparan	Tidak transparan

Sumber: Reduksi Data, 2023

Secara keseluruhan, faktor relasi dalam jaringan aktor atau organisasi memiliki pengaruh sangat penting dalam mewujudkan tercapainya efektivitas jaringan. Setiap anggota jaringan harus memiliki hubungan yang baik satu sama lain, berkomunikasi secara terbuka dan efektif, dan saling bergantung dalam pertukaran sumber daya untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan bersama.

5.5.1 Kepercayaan

Kepercayaan adalah faktor relasi yang sangat penting dalam efektivitas jaringan. Anggota jaringan harus memiliki tingkat kepercayaan yang tinggi satu sama lain untuk memungkinkan kolaborasi yang efektif dan membangun hubungan kerja yang sehat.

Kepercayaan dalam jaringan dapat diartikan sebagai keyakinan bahwa pihak lain dalam jaringan akan bertindak sesuai dengan harapan dan kepentingan bersama. Kepercayaan memiliki peran penting dalam mempengaruhi kerja sama dan koordinasi antara anggota jaringan. Berikut adalah beberapa aspek penting kepercayaan dalam jaringan.

1. Kepercayaan inter personal: Kepercayaan ini berkaitan dengan keyakinan bahwa individu-individu dalam jaringan akan bertindak dengan jujur, konsisten, dan dapat diandalkan. Hal ini melibatkan keyakinan bahwa anggota jaringan akan memenuhi komitmen mereka dan bekerja untuk mencapai tujuan bersama.
2. Kepercayaan institusional: Kepercayaan ini berkaitan dengan keyakinan bahwa aturan, norma, dan prosedur yang mengatur hubungan dalam jaringan akan ditegakkan dengan adil dan konsisten. Kepercayaan ini juga berkaitan dengan keyakinan bahwa institusi atau otoritas yang mengelola jaringan akan menjalankan tugas mereka secara efektif.
3. Kepercayaan simbolik: Kepercayaan ini berkaitan dengan persepsi tentang kesamaan nilai, tujuan, atau visi antara anggota jaringan.

Keyakinan ini mempengaruhi sejauh mana anggota jaringan merasa saling terhubung dan memiliki kepentingan bersama.

4. Kepercayaan kemampuan: Kepercayaan ini berkaitan dengan keyakinan bahwa anggota jaringan memiliki kemampuan, keterampilan, dan sumber daya yang diperlukan untuk mencapai tujuan bersama. Kepercayaan ini mempengaruhi sejauh mana anggota jaringan bersedia bekerja sama dan saling bergantung satu sama lain.

Robbins dan Judge (2007) menyebutkan lima dimensi kunci dalam konsep kepercayaan yang dapat dijadikan parameter pengukuran kepercayaan. Kelima dimensi tersebut meliputi: (1) integritas (*integrity*), merujuk pada kejujuran dan kebenaran; (2) kompetensi (*competence*), terkait dengan pengetahuan dan keterampilan teknis dan interpersonal yang dimiliki individu; (3) konsistensi (*consistency*), berhubungan dengan keandalan, kemampuan memprediksi dan penilaian individu jitu dalam menangani situasi; (4) loyalitas (*loyalty*), keinginan untuk melindungi dan menyelamatkan orang lain; dan (5) Keterbukaan (*openness*).

Berdasarkan tanggapan informan, menunjukkan jika variabel kepercayaan peserta jaringan dari unsur pemerintah berada pada penilaian kategori cukup tinggi. Hal ini disebabkan karena adanya keyakinan jika mereka mampu menyelesaikan tugas sesuai dengan Tupoksi masing-masing karena adanya dukungan sumber daya dan anggaran. Sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak MI Kabid BPBD berikut ini :

Jika diminta menilai tingkat kepercayaan antar aktor jaringan maka saya melihat jika tidak ada masalah dalam hal itu, aktor dari pemerintah pada

dasarnya saling percaya dan sudah saling mengenal sehingga lebih mudah berkoordinasi dan kami juga percaya jika semua instansi yang terlibat mampu menyelesaikan tugas – tugas yang diberikan kepadanya. (Hasil Wawancara: 12 Agustus 2022)

Meski demikian pada beberapa kasus permasalahan tidak serta selesai pada saat warga terdampak bencana telah mendapatkan hunian tetap, masih banyak permasalahan yang muncul setelahnya contohnya jual beli rumah hunian tetap oleh warga. Fasilitas umum dan fasilitas sosial yang belum sepenuhnya tersedia di lokasi-lokasi huntap, baik di Tondo I, Duyu, maupun di Pombewe. Belum terencana program-program pascahuni (pemulihan mata pencaharian) bagi warga yang sudah menempati huntap di lokasi relokasi. belum ada informasi terkait dengan perencanaan bagaimana sekolah bagi anak-anak yang sudah berada di lokasi relokasi: apakah anak-anak tersebut (terutama yang SD) masih harus bersekolah di tempat asalnya masing-masing atau akan ada kebijakan tertentu terkait dengan sekolah/pendidikan ini. Kondisi ini tentunya akan menurunkan tingkat kepercayaan warga terdampak bencana terhadap keseriusan pemerintah dalam kegiatan pemulihan bencana yang menjadi tanggung jawabnya.

Sementara dari pihak NGO tanggapan terhadap beberapa dimensi kepercayaan berada pada kategori sedang dan rendah, baik kepada pihak pemerintah maupun kepada pihak swasta. Tanggapan terhadap pemerintah rendah karena anggapan unsur pemerintah kurang melibatkan mereka dalam proses kegiatan pemulihan, sementara dengan pihak swasta (kontraktor pembangunan huntap) pada beberapa kasus berdasarkan

temuan SKP HAM telah melakukan wan prestasi terhadap proyek yang dikerjakannya.

Adapun tanggapan dari unsur swasta memiliki penilaian pada kategori sedang dan tinggi karena keyakinan memiliki kompetensi mampu menyelesaikan tugasnya dengan baik serta telah melalui proses tender yang ketat untuk mendapatkan proyek yang dikerjakannya.

Dalam organisasi jaringan kepercayaan yang kuat dapat memperkuat kerja sama, komunikasi, dan koordinasi antara anggota. Hal ini penting untuk mencapai tujuan bersama dan membangun hubungan yang berkelanjutan di dalam jaringan. Namun, kepercayaan juga dapat rentan terhadap perubahan yang terjadi pada hubungan antara anggota jaringan. Oleh karena itu, penting untuk membangun dan memelihara kepercayaan dalam jaringan melalui komunikasi terbuka, transparansi, kejujuran, dan penghargaan terhadap kepentingan bersama.

5.5.2 Harmoni dan Komitmen

Faktor relasi sangat penting dalam efektivitas jaringan karena organisasi jaringan terdiri dari berbagai unit bisnis atau entitas yang terkait yang bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama. Berikut adalah beberapa faktor relasi yang dapat mempengaruhi efektivitas jaringan:

Kepercayaan: Kepercayaan adalah faktor relasi yang sangat penting dalam efektivitas jaringan. Anggota jaringan harus memiliki tingkat kepercayaan yang tinggi satu sama lain untuk memungkinkan kolaborasi yang efektif dan membangun hubungan kerja yang sehat.

Komunikasi: Komunikasi adalah faktor relasi yang juga sangat penting dalam efektivitas jaringan. Komunikasi yang efektif memastikan bahwa semua anggota jaringan memahami tujuan dan sasaran bersama, dan bahwa setiap anggota dapat memperoleh akses ke informasi yang diperlukan untuk membuat keputusan yang tepat.

Interdependensi: Faktor relasi yang mempengaruhi efektivitas jaringan lainnya adalah interdependensi. Jaringan terdiri dari entitas atau unit bisnis yang saling bergantung satu sama lain, dan ketergantungan ini memastikan bahwa setiap anggota jaringan harus bekerja sama untuk mencapai tujuan secara bersama.

Keterlibatan: Keterlibatan adalah faktor relasi lainnya yang mempengaruhi efektivitas jaringan. Anggota jaringan harus merasa terlibat dan berpartisipasi aktif dalam jaringan untuk memastikan bahwa mereka memiliki kontribusi yang signifikan dalam mencapai tujuan bersama.

Pertukaran Sumber Daya: Pertukaran sumber daya adalah faktor relasi yang juga penting dalam efektivitas jaringan. Anggota jaringan harus dapat saling membagi sumber daya, seperti pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman, untuk memastikan bahwa setiap anggota dapat memperoleh keuntungan dari jaringan tersebut.

Secara keseluruhan, faktor relasi sangat penting dalam efektivitas jaringan. Anggota jaringan harus memiliki hubungan yang baik satu sama lain, berkomunikasi secara terbuka dan efektif, dan saling bergantung dalam pertukaran sumber daya untuk mencapai tujuan bersama.

Penjelasan tentang harmoni dan komitmen dari efektifitas organisasi jaringan. Harmoni dan komitmen adalah faktor penting dalam efektifitas organisasi jaringan. Berikut adalah penjelasan lebih lanjut mengenai kedua faktor tersebut:

Harmoni: Harmoni mengacu pada keselarasan antara berbagai elemen atau bagian dari organisasi jaringan, termasuk hubungan antar anggota jaringan, tujuan dan strategi bersama, serta kebijakan dan prosedur yang digunakan. Dalam organisasi jaringan yang harmonis, anggota jaringan saling mendukung dan bekerja sama dengan baik untuk mencapai tujuan bersama, dengan menyeimbangkan kepentingan masing-masing pihak dan menjaga hubungan yang positif dan saling menguntungkan.

Komitmen: Komitmen mengacu pada tingkat keterlibatan dan kesediaan anggota jaringan untuk berpartisipasi aktif dalam mencapai tujuan bersama.

Hasil penelitian pada variabel harmoni dan komitmen yang dibangun antara peserta jaringan dalam program pemulihan pascabencana di menunjukkan kondisi yang berbeda antara peserta yang berasal dari unsur pemerintah jika dibandingkan dengan organisasi sipil. Harmoni dan komitmen peserta jaringan dari unsur pemerintah berjalan dengan baik seperti yang dikemukakan oleh informan dari OPD yang diwawancarai yang menjelaskan jika pemerintah Kota Palui selalu berkoordinasi dan bekerja sesuai dengan tupoksinya, komitmen dipegang sesuai dengan visi dan misi organisasinya serta arahan dari pimpinan. Hal berbeda terjadi dengan peserta yang berasal dari unsur organisasi sipil yang menyebutkan jika

mereka jarang berhubungan dengan pihak pemerintah, kecuali dalam kegiatan-kegiatan formal.

Masalah ini terjadi karena tidak adanya komitmen yang dibuat dan disepakati bersama antara peserta jaringan, yang kemudian berdampak tidak terciptanya harmoni atau keselarasan antara peserta jaringan. Kondisi ini tentu saja mempengaruhi efektivitas jaringan pemulihan pascabencana dimana harmonisasi dan komitmen menjadi salah satu syarat pencapaiannya.

Dalam organisasi jaringan yang efektif, anggota jaringan harus memiliki tingkat komitmen yang tinggi terhadap tujuan bersama, serta memperlihatkan semangat dan dedikasi dalam bekerja sama untuk mencapai tujuan tersebut. Tingkat komitmen yang tinggi juga memastikan bahwa anggota jaringan siap untuk menanggapi perubahan atau tantangan yang terjadi dalam organisasi jaringan.

Kombinasi antara harmoni dan komitmen dalam organisasi jaringan memainkan peran penting dalam meningkatkan efektivitas jaringan secara keseluruhan. Ketika anggota jaringan memiliki hubungan yang harmonis dan saling mendukung satu sama lain, serta memiliki komitmen yang tinggi terhadap tujuan bersama, mereka dapat bekerja lebih efektif dalam mencapai tujuan jangka panjang organisasi jaringan. Hal ini juga dapat memperkuat jaringan dan meningkatkan kemampuannya untuk beradaptasi dengan perubahan dalam lingkungan bisnis.

5.5.3 Gaya Kepemimpinan.

Peran pemimpin dalam efektivitas jaringan sangat penting untuk mengarahkan, memfasilitasi, dan memotivasi anggota jaringan. Namun, penting untuk dicatat bahwa faktor-faktor lain, seperti komitmen anggota, keterlibatan, dan kualitas hubungan antara anggota jaringan juga mempengaruhi efektivitas jaringan secara keseluruhan. Gaya kepemimpinan dapat mempengaruhi efektivitas organisasi jaringan secara signifikan.

Berdasarkan hasil penelitian dan observasi yang dilakukan ditemukan kondisi jika aktor jaringan dalam pemulihan bencana di Kota Palu secara keseluruhan yang melibatkan aktor baik pada level pusat, provinsi sampai kepada pemerintah kota tidak memiliki aktor baik secara individu maupun lembaga yang secara jelas ditunjuk sebagai pemimpin jaringan secara keseluruhan pada semua tingkat jaringan. Kalaupun ada yang ditunjuk sebagai ketua tapi masih bersifat sektoral seperti misalnya Kepala Satuan Tugas (Satgas) Penanggulangan Bencana Kementerian PUPR di Sulteng Arie Setiadi Moerwanto Dirjen Bina Marga Kementerian PUPR yang memimpin penyelenggaraan rehabilitasi dan rekonstruksi pemulihan pascabencana serta mengkoordinasikan sumber daya yang dimiliki dan menjadi kewenangan Kementerian PUPR.

Pada lingkup Kota Palu berdasarkan ketentuan Undang-Undang RI. Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, dimana Pemerintah Daerah menjadi penanggungjawab dalam penyelenggaraan

penanggulangan bencana, maka Sekretaris Kota Palu sebagai *ex officio* Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang dibantu Kepala Pelaksana (Kalak) memiliki tanggung jawab dan kewenangan sebagai pemimpin jaringan dalam pemulihan bencana di Kota Palu.

Ada beberapa gaya kepemimpinan yang dapat diterapkan dalam organisasi jaringan, dan masing-masing gaya memiliki dampak yang berbeda pada anggota jaringan dan hasil yang dicapai. Berikut adalah penjelasan tentang beberapa gaya kepemimpinan dan dampaknya pada efektivitas organisasi jaringan:

1. **Kepemimpinan Transformasional:** Gaya kepemimpinan transformasional melibatkan pengembangan hubungan personal yang kuat antara pemimpin dan anggota jaringan. Pemimpin transformasional sering kali berfokus pada memotivasi dan mempengaruhi anggota jaringan untuk mencapai tujuan bersama dengan memberikan arahan dan memperkuat visi bersama. Gaya kepemimpinan ini sering kali efektif dalam meningkatkan keterlibatan anggota jaringan dan mencapai tujuan bersama yang ambisius.
2. **Kepemimpinan Demokratis:** Gaya kepemimpinan demokratis melibatkan partisipasi anggota jaringan dalam proses pengambilan keputusan. Pemimpin demokratis akan meminta masukan dari anggota jaringan dan berusaha menciptakan lingkungan yang terbuka dan inklusif. Gaya kepemimpinan ini sering kali efektif dalam memotivasi anggota jaringan dan memperkuat hubungan antara anggota jaringan.

3. **Kepemimpinan Otoriter:** Gaya kepemimpinan otoriter melibatkan pengambilan keputusan yang diambil oleh pemimpin tanpa melibatkan partisipasi anggota jaringan. Pemimpin otoriter sering kali menentukan tujuan dan strategi jaringan, serta mengarahkan anggota jaringan untuk mencapai tujuan tersebut. Gaya kepemimpinan ini dapat efektif dalam situasi yang memerlukan pengambilan keputusan cepat atau ketika tugasnya sangat jelas, tetapi dapat menciptakan lingkungan kerja yang kurang inklusif dan dapat mempengaruhi keterlibatan dan motivasi anggota jaringan.
4. **Kepemimpinan kolaboratif:** Kepemimpinan kolaboratif melibatkan kemampuan pemimpin untuk mendorong dan memfasilitasi kolaborasi yang erat antara anggota jaringan. Pemimpin kolaboratif mempromosikan keterlibatan aktif, saling ketergantungan, dan pemecahan masalah bersama dalam upaya mencapai tujuan jaringan.
5. **Kepemimpinan koordinatif:** Kepemimpinan koordinatif melibatkan kemampuan pemimpin untuk mengoordinasikan kegiatan dan upaya antara anggota jaringan. Pemimpin koordinatif memastikan adanya saluran komunikasi yang efektif, pemahaman yang bersama tentang peran dan tanggung jawab, serta pemantauan dan evaluasi yang tepat.
6. **Kepemimpinan adaptif:** Kepemimpinan adaptif melibatkan kemampuan pemimpin untuk menghadapi perubahan dan tantangan yang muncul dalam konteks jaringan. Pemimpin adaptif dapat merumuskan strategi

yang sesuai, mengatasi hambatan, dan mempromosikan fleksibilitas dan inovasi dalam jaringan.

Jika merujuk kepada beberapa gaya kepemimpinan organisasi jaringan diatas, berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa informan yang mewakili OPD seperti yang disampaikan oleh Bapak HOU dari Dinas Sosial berikut ini:

ibu Sekkot dalam memimpin pelaksanaan kegiatan pemulihan bencana selama ini terlibat secara aktif, sudah baik. Pada beberapa kesempatan beliau sering memimpin langsung rapat terkait dengan koordinasi penanganan bencana... (Hasil wawancara 4 Agustus 2022)

Senada dengan pendapat di atas, gaya kepemimpinan sekretaris kota dalam memimpin jaringan juga dinilai demokratis baik melalui pertemuan formal maupun dalam kegiatan informal lainnya, sebagaimana disampaikan oleh ibu N dari Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Palu sebagai berikut:

Beliau sering memimpin langsung rapat koordinasi kecuali berhalangan, perannya sangat membantu dalam memberikan arahan kepada kami, misalnya kita tidak yakin dengan apa yang kita sepakati beliau biasanya memberikan petunjuk untuk koordinasi dengan yang lebih paham seperti ke BPBD atau yang lain, beliau sangat care (Hasil Wawancara 13 Maret 2023)

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, hasil ini menunjukkan kecenderungan manajer jaringan dalam hal ini Sekretaris Kota Palu, menerapkan gaya kepemimpinan demokratis dalam mengelola organisasi jaringan di bawah kewenangannya dalam hal meminta masukan anggotanya dan melibatkan mereka dalam proses pengambilan keputusan, terutama peserta jaringan yang berasal dari unsur Organisasi Pemerintah Daerah. Hal lain yang berpengaruh dari posisi Sekretaris Kota yang secara

ex officio menjabat sebagai kepala BPBD adalah lebih mudah melakukan koordinasi antar OPD yang secara struktur organisasi menjadi kewenangannya dikarenakan jabatannya sebagai sebagai pemimpin eksekutif daerah dalam menjalankan peran strategis pemerintahan daerah.

Hasil wawancara yang dilakukan terhadap peserta jaringan dari organisasi pemerintah daerah Kota Palu secara umum menyatakan jika Sekretaris Kota selaku Kepala BPBD telah melaksanakan tugasnya dengan baik, yang ditunjukkan dengan mengkoordinasikan OPD dalam pelaksanaan pemulihan bencana sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing. Selanjutnya pada beberapa kesempatan memimpin langsung rapat-rapat koordinasi yang membahas tentang pelaksanaan pemulihan bencana di Kota Palu. Akan tetapi diperoleh penilaian yang berbeda dari peserta jaringan yang berasal dari Non Government Organization seperti Sulteng Bergerak seperti yang disampaikan oleh Bapak AM yang berpendapat bahwa:

Untuk menemui pemerintah kota setengah mati. Saya sendiri belum pernah ketemu dengan ibu sekkot, yang kami kerjasamakan soal keadilan gender khusus untuk warga terdampak bencana, itu sih bagus responnya....kalau yang lain-lain sih tidak enak kalau kita bilang tidak bagus...saya tidak pernah dengar ibu sekkot bicara di media terkait dengan pemulihan bencana (Wawancara: 5 Februari 2023)

Penjelasan lebih lanjut disampaikan juga bahwa untuk bertemu dengan pihak pemerintah kota mereka meminta untuk difasilitasi oleh DPRD Kota Palu untuk bisa bertemu dalam forum rapat. Dimana pada beberapa kesempatan rapat yang difasilitasi oleh pansus DPRD Kota Palu tidak dihadiri oleh Sekretaris Kota. Begitu juga pada kegiatan koordinasi

lainnya secara formal seringkali tidak melibatkan unsur NGO dalam pelaksanaannya. Sehingga penyelenggaraan kegiatan pemulihan bencana hanya bertumpu kepada pihak pemerintah saja dan terkesan mengabaikan pihak lain terutama peserta jaringan aktor dari unsur NGO.

Secara keseluruhan, gaya kepemimpinan dapat mempengaruhi efektivitas organisasi jaringan. Kepemimpinan transformasional dan demokratis sering kali efektif dalam meningkatkan keterlibatan dan motivasi anggota jaringan, serta memperkuat hubungan antara anggota jaringan. Sementara kepemimpinan otoriter dapat efektif dalam situasi yang memerlukan pengambilan keputusan cepat atau ketika tugasnya sangat jelas, tetapi dapat menciptakan lingkungan kerja yang kurang inklusif. Oleh karena itu, pemimpin organisasi jaringan harus memilih gaya kepemimpinan yang sesuai dengan situasi dan tujuan organisasi jaringan untuk meningkatkan efektivitasnya.

5.6 Indigenous Knowledge Dalam Efektivitas Jaringan Pemulihan Bencana di Kota Palu

Indigenous Knowledge atau pengetahuan asli, atau yang dalam buku Kayori Seni Merekam Bencana ini sebagai "pengetahuan autentik", adalah pengetahuan yang diwujudkan melalui perangkat adat dan kebudayaan, dengan alam sebagai laboratoriumnya. Dalam konteks Indonesia, masyarakat di wilayah adat terus mempertahankan pengetahuan ini dalam bentuk dan ekspresi yang beragam. Sebagai ajaran, pengetahuan autentik dapat menjadi modal sosial bagi masyarakat adat yang selama ini sering mendapat represi dari kekuasaan dalam konteks merebut ekosistem alam,

yang merupakan sumber kehidupan mereka. Masyarakat adat telah memiliki pengetahuan autentik dalam mengelola hutan, sawah, dan sumber air untuk bertahan hidup, menghasilkan makanan, dan menjadi tempat berlindung untuk mencapai kendali atas kehidupan mereka sendiri. Sebagian besar pengetahuan autentik menghilang karena teknologi asing dan konsep pembangunan yang berorientasi pada keuntungan sesaat dan penuh kehancuran. Tragedi menghilangnya pengetahuan ini turut menghapus keterampilan, teknologi, artefak, strategi pemecahan masalah, dan beberapa keahlian tertentu. Oleh Ellen dan Harris membuat klasifikasi yang komprehensif terkait pengetahuan autentik dalam tulisannya yang berjudul *Concepts of Indigenous Environmental Knowledge in Scientific and Development Studies Literature*.

Berdasarkan catatan sejarah yang ada, ada banyak peristiwa bencana yang telah terjadi di daerah lembah Palu yang dihuni Suku Kaili selama 100 tahun terakhir. Dalam rentang waktu tersebut, tercatat setidaknya telah 9 kali bencana besar yang telah melanda wilayah tersebut. Bencana-bencana tersebut telah menjadi bagian dari memori komunal suku Kaili dan terus diceritakan dari satu generasi ke generasi berikutnya melalui Tutura atau cerita turun-temurun. Daerah hunian suku Kaili memang dikenal sebagai daerah yang sering mengalami bencana. Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor geografis dan lingkungan. Salah satu Tutura yang terus direproduksi hingga hari ini adalah tentang pentingnya pengurangan risiko bencana

termasuk bagaimana penanganan dan kemampuan menghadapi kehidupan setelah bencana berlalu.

Tutura ini menjadi sangat penting bagi suku Kaili karena mereka telah belajar dari pengalaman pahit bencana yang pernah terjadi. Dengan memahami risiko dan upaya pengurangannya, suku Kaili berusaha untuk melindungi diri mereka sendiri, keluarga, dan komunitas mereka dari dampak buruk bencana. Pengurangan risiko bencana mencakup berbagai aspek, seperti peningkatan kesadaran akan bahaya bencana, peningkatan infrastruktur yang tahan bencana, dan perencanaan tanggap darurat yang efektif. Tutura ini mengajarkan suku Kaili untuk selalu waspada terhadap potensi bencana, serta berbagi pengetahuan dan keterampilan dalam menghadapinya. Dalam Tutura ini, suku Kaili juga belajar untuk saling membantu dan bekerja sama sebagai komunitas dalam menghadapi bencana. Mereka mengetahui pentingnya solidaritas dan kolaborasi dalam mengurangi risiko bencana serta meminimalkan kerugian yang ditimbulkan. Meskipun bencana sering kali tidak dapat dihindari, suku Kaili percaya bahwa dengan pengetahuan dan persiapan yang tepat, dampak buruk dari bencana dapat dikurangi secara signifikan. Oleh karena itu, Tutura tentang pengurangan risiko bencana terus disampaikan dan diperbaharui agar dapat terus berguna dan relevan bagi generasi mendatang suku Kaili.

Dalam menghadapi masa depan yang penuh tantangan, suku Kaili berharap bahwa Tutura ini akan terus menjadi pegangan dan panduan dalam menjaga keamanan dan kesejahteraan mereka. Dengan

mempertahankan dan melanjutkan kearifan lokal atau pengetahuan lokal dalam wujud Tutura ini, Suku Kaili berharap dapat terus bertahan dan bangkit setelah menghadapi bencana-bencana yang mungkin masih akan terjadi di masa depan.

Lobo, Tambi, Banua (Struktur Bangunan Rumah)

Salah satu bentuk ketangguhan dalam menghadapi bencana adalah bangunan dan strukturnya. Bangunan yang mengandung kearifan lokal suku Kaili merupakan hasil adaptasi dan pembelajaran dari bencana masa lalu. Struktur ini diciptakan oleh pemikiran kolektif nenek moyang mereka yang berusaha untuk mengurangi dampak bencana yang berulang yang merusak tempat tinggal mereka. Rumah asli suku Kaili terbuat dari kayu dan atap jerami/daun rumbia. Bangunan rumah ini didesain menyerupai rumah panggung, dibangun dengan jarak tertentu, seperti ketinggian tanah dan pangkal bangunan, serta atap dengan lantai yang rendah untuk meringankan beban rumah. Selain itu, seluruh pondasi rumah asli Kaili berbentuk seperti pondasi pegas yang banyak dijumpai pada rumah-rumah di negara Jepang.

Konstruksi ini dipakai untuk meredam getaran saat terjadi gempa. Fondasinya tidak dibangun dengan menjatuhkan atau menanam di tanah, tetapi dengan tiga batang kayu besar yang diikat kuat dan berdiri di atas batu. Oleh karena itu, alih-alih retak dan roboh seperti rumah modern dengan pondasi tanam seperti yang umum dipakai saat ini, model rumah suku Kaili ini meminimalisir efek gempa dan mengikuti pergerakan bumi

untuk menyelamatkan suku Kaili dari kerugian materi dan korban manusia. Informasi mengenai bangunan asli suku Kaili ini telah diwariskan secara turun temurun. Bahkan, di Sibalaya di Kabupaten Sigi, ada sebuah petuah berupa himbauan yang berbunyi: "Jangan keluar rumah jika terjadi gempa." Tujuan syair tersebut adalah mengubah rumah menjadi "perahu" atau "tali penyelamat" jika terjadi gempa bumi. Hal ini memungkinkan penduduk Kaili bertahan dari dampak bencana, seperti berada di bawah tanah atau terkubur di bawah bangunan yang runtuh karena berada di luar rumah. Sementara banyak yang menganggap tindakan rumah saat gempa tidak masuk akal.

Struktur bangunan suku Kaili seharusnya bisa menyelamatkan lebih banyak orang. Model konstruksi ini juga harus diterapkan secara umum pada mitigasi bencana dan perbaikan permukiman berkelanjutan. Karakteristik wilayah yang berbeda dari setiap wilayah menyebabkan karakteristik bencana yang dihadapi juga berbeda. Hal ini mempengaruhi bentuk-bentuk manajemen bencana adaptif. Berupa struktur bangunan asli suku Kaili, Tutura seharusnya menjadi implementasi mitigasi bencana di wilayah Palu dan wilayah rawan bencana lainnya. Kata-kata suku Kaili sebagai kearifan lokal harus menjamin keberlanjutan hidup untuk keselamatan lebih banyak jiwa di masa depan

Toponimi (Penamaan Tempat/Wilayah)

Salah satu bentuk Tutura adalah nama tempat atau nama daerah. Penamaan tersebut dipicu oleh peristiwa yang pernah terjadi di daerah

tersebut, termasuk bencana. Artinya suku Kaili memahami daerah mana saja yang pernah mengalami bencana dalam sejarah dan mencatat dengan nama daerah mana saja yang rawan bencana. Misalnya Desa Rogo Kabupaten Sigi artinya pernah hancur. Belakangan, ratusan rumah di desa itu hancur saat bencana 28 September 2018 dan banjir bandang 2020. Lalu ada Desa Beka, Kabupaten Sigi yang artinya pernah dimekarkan. Lahan desa banyak terdistribusi saat likuifaksi September 2018. Berikutnya Desa Jono Oge Kabupaten Sigi yang artinya banyak alang-alang. Jenis tanaman ini biasanya tumbuh di sungai dan rawa. Namun saat terjadi bencana September 2018, kawasan ini bukanlah sungai atau rawa seperti namanya, melainkan kawasan padat penduduk.

Karenanya, saat terjadi likuefaksi juga ikut menimpa Desa Jono Oge. Oleh masyarakat Kaili menilai dampak ini terjadi karena Desa Jono Oge dibangun di atas jalur air yang seharusnya tidak dimanfaatkan sebagai areal pemukiman. Kearifan lokal suku Kaili dapat menjadi instrumen penanggulangan bencana yang efektif. Dengan menafsirkan nomenklatur masing-masing daerah dan menyesuaikan perilaku pembangunan. Model pembangunan berdasarkan nama tempat daerah dapat membantu mitigasi bencana dengan mempertimbangkan karakteristik daerah dan bencana yang berbeda dari setiap daerah.

Jika saja pelarangan berdasarkan tradisi nenek moyang itu diikuti selama pembangunan pada dua kawasan pemukiman yang terdampak likuifaksi tersebut, mungkin saja tidak akan terjadi peristiwa hilangnya

ratusan rumah dan keluarga yang ditelan lumpur. Semuanya menjadi logis dan tidak takhayul ketika ditunjukkan dengan jelas. Sebagai perbandingan, Desa Kinta lama merupakan satu-satunya wilayah di Desa Petobo yang selamat dari likuifaksi. Di sisi lain, lokas berhektar-hektar dari satu kelurahan tetangga hancur total. Bukan tanpa alasan, Kampung Tua Kinta berarti tempat tinggal atau tanah untuk sebuah rumah. Salah satu cerita yang terpelihara dari kota tua Kinta adalah tidak boleh ada lebih dari 60 orang yang bermukim di kawasan tersebut. Seiring bertambahnya populasi, desa tua Kinta terus mengikuti dan taat akan aturan sehingga mampu bertahan dari bencana alam yang terjadi.

Raigo (Kesenian)

Bencana tidak berakhir ketika bumi berhenti berguncang atau bumi runtuh atau air laut telah surut. Masih banyak lagi bencana yang akan datang setelah itu. Salah satunya adalah trauma mental. Inilah yang terjadi pada masyarakat suku Kaili. Gangguan stres pascatrauma atau *Post-Traumatic Stress Disorder* (PTSD) membayangi kehidupan mereka setelah peristiwa traumatis. Beberapa penyintas tidak berani masuk, apalagi tidur di rumah mereka selama berminggu-minggu setelah bencana, padahal rumah mereka masih utuh. Beberapa yang lain bahkan gugup hanya karena berada di dekat tembok. Belum lagi duka mendalam bagi mereka yang kehilangan orang yang dicintai atau harta benda. Namun, bencana yang menimpa masyarakat suku Kaili tidak hanya menimbulkan trauma individu,

tetapi juga mengubah struktur kehidupan kolektif masyarakat secara signifikan.

Oleh karena itu, upaya pemulihan trauma yang hanya terfokus pada level individu tidaklah cukup. Diperlukan pendekatan pemulihan yang lebih holistik dan berbasis komunitas, seperti yang dilakukan oleh suku Kaili. Salah satu upaya untuk pulih dari trauma menurut kata suku Kaili yaitu tari Raigo. Tarian ini dibawakan bersama-sama dalam formasi melingkar sambil melantunkan syair-syair panjang dalam bahasa yang sudah tidak digunakan lagi dalam percakapan sehari-hari, yaitu Uma Tua. Tari Raigo merupakan ritual adat yang dilakukan dalam berbagai kesempatan atau situasi. Beda peristiwa atau situasi, beda pula puisi yang digunakan. Sehubungan dengan pemulihan pascabencana Palu-Sigi-Donggala, masyarakat suku Kaili menampilkan tarian ini dengan membawakan syair-syair yang menggambarkan siklus hidup manusia dari lahir sampai mati dan betapa baiknya orang-orang yang mendahuluinya. Tujuan tersembunyi dari puisi tersebut adalah untuk memberikan hiburan dan dorongan untuk bangkit kembali, terutama bagi keluarga yang sedang berduka dan bagi semua orang yang selamat pada umumnya.

Trauma para penyintas bencana berdampak secara bertahap dan dapat mengganggu kesehatan mental mereka. Oleh karenanya, pemulihan trauma bagi penyintas bencana menjadi topik yang sangat penting. Untuk menyikapi hal tersebut, masyarakat suku Kaili menjadikan tari Raigo sebagai solusi pemulihan trauma pascabencana agar seluruh penyintas

tetap terjaga kesehatan mentalnya. Selain itu, tarian Raigo juga memberi kesempatan bagi warga untuk mempererat tali silaturahmi dan bergerak bersama untuk bangkit. Sederhananya, tarian Raigo bertujuan menyebarkan kebahagiaan dalam suasana duka.

Gampiri (Lumbung Pangan)

Selain suasana duka yang luar biasa, lingkungan pascabencana Palu-Sigi-Donggala juga diselimuti suasana mencekam karena kriminalitas merebak di mana-mana. Karena secara tidak langsung, krisis membuka ruang terjadinya eskalasi kejahatan. Termasuk di Palu, Sigi, dan Donggala ketika gempa, tsunami, dan likuefaksi telah berhenti; tak sedikit masyarakat yang melakukan penjarahan dan pencurian, terutama untuk mencukupi kebutuhan pangan saat kondisi yang tidak pasti. Secara sederhana, kita dapat memahami bahwa tindakan tersebut terjadi karena bencana membuat mereka kekurangan atau bahkan kehilangan kemampuan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Selain itu, bencana juga menyebabkan terputusnya rantai distribusi pangan ke daerah terdampak. Akibatnya, persediaan makanan habis. Oleh karena itu, tak heran jika banyak orang rela melakukan apa saja, termasuk tindakan kriminal, untuk memenuhi kebutuhan pangan belaka.

Namun, sebetulnya suku Kaili sudah memiliki siasat untuk memitigasi hal semacam itu. Istilahnya *gampiri*. Sebuah lumbung pangan berbentuk bangunan kecil seperti saung yang difungsikan sebagai tempat penyimpanan padi atau bahan makanan lain yang tahan

lama. *Gampiri* ditopang oleh tiang-tiang penyangga yang dilingkari dengan kayu bundar pada bagian atasnya. Kayu bundar ini disebut *tandingi*. *Tandingi* memiliki fungsi keamanan, yakni mencegah tikus naik ke lumbung sehingga kualitas dan kuantitas bahan pangan yang disimpan di *gampiri* terjaga. Selain itu, *gampiri* tidak memiliki tangga tetap sehingga menyulitkan orang untuk mencuri bahan pangan yang disimpan di dalamnya.

Terdapat dua jenis *gampiri*, yaitu *gampiri* individu dan *gampiri* kolektif (*gampiri mbaso*). *Gampiri* individu umumnya diperuntukkan bagi ketua adat, sedangkan *gampiri mbaso* digunakan secara kolektif oleh warga suku Kaili untuk menyimpan hasil panen. Seyogianya, satu *gampiri* dapat digunakan oleh 10-15 keluarga di satu kawasan. Manfaat *gampiri* adalah mencegah kelaparan ketika datang krisis, seperti paceklik atau bencana. Saat bencana Palu-Sigi-Donggala terjadi, persediaan pangan yang tersimpan di *gampiri* dapat mencukupi kebutuhan pangan warga selama 1-2 minggu dan berhasil mengurangi risiko terjadinya penjarahan atau pencurian di kawasan yang memiliki *gampiri*.

Sejatinya, melestarikan *gampiri* merupakan upaya untuk menjaga ketahanan pangan. Ketika krisis terjadi, termasuk pascabencana Palu-Sigi-Donggala, *Gampiri* dapat menyelamatkan banyak keluarga dengan latar belakang atau identitas apa pun dari kelaparan. Hal ini karena *gampiri* menjunjung tinggi nilai inklusivitas dan nondiskriminasi.

Semua boleh menyimpan sesukanya, semua boleh mengambil secukupnya.

Kayori (Syair Lisan)

Kayori adalah sastra lisan Suku Kaili di Sulawesi Tengah yang berisi syair-syair kuno tentang masa lalu, termasuk di dalamnya peringatan soal bencana alam. Namun, kayori kini perlahan menghilang. Hanya segelintir yang masih bisa melantungkannya. Salah satunya adalah Panambulu, pria yang disebut berusia 104 tahun. "Ada semua cerita (tentang bencana alam) dalam kayori, termasuk cerita orang tua kami," kata Panambulu dalam bahasa Kaili. Dua bait kayori yang dilantunkan Panambulu tentang bencana berbunyi: "kalau ada salah kita di dunia pasti gempa lagi, gempa ini dari perilaku kita di dunia, bila kita tidak sesuai dengan adat, kita akan ada lagi gempa." Iksam Djorimi, arkeolog di Palu yang meneliti tentang Kayori, mengatakan bahwa sampai bencana gempa bumi dan likuefaksi terjadi di Palu, Sigi, dan Donggala, hanya sedikit orang yang mengetahui pesan-pesan lokal ini.

Pengetahuan Asli Tutura Dalam Penanganan Bencana Di Kota Palu.

Tutura yang tersiar di suku Kaili, Sulawesi Tengah hanyalah satu dari sekian banyak produk pengetahuan lokal yang berguna dalam pencegahan dan penanganan bencana di seluruh Indonesia. Mengapa hampir setiap daerah memiliki pengetahuan lokal terkait kebencanaan masing-masing yang sifatnya spesifik dan unik. Karena karakteristik bencana di setiap daerah berbeda-beda dan pengetahuan lokal adalah pintu masuk terbaik

untuk memahami hal tersebut. Dengan memahami karakteristik bencana secara detail dan holistik, maka upaya pencegahan dan penanganannya dapat lebih berkelanjutan, efektif, tepat sasaran, dan berpotensi menyelamatkan lebih banyak orang.

Pada akhirnya, sinergi antara pengetahuan lokal dan pengetahuan modern menjadi sangat penting dalam konteks kebencanaan. Pengetahuan lokal dapat memberikan gambaran yang paling akurat mengenai karakteristik, pola, sampai cara pencegahan dan penanganan bencana. Di saat yang sama, tabiat manusia modern selalu memerlukan pembenaran rasional yang berbasis pada bukti-bukti ilmiah sebelum memercayai atau melakukan sesuatu. Maka dari itu, pengintegrasian pengetahuan lokal dengan pengetahuan modern merupakan hal yang krusial. Keduanya tidak perlu saling bertentangan satu sama lainnya apalagi saling menghapuskan.

Kota Palu memiliki Peraturan Daerah (PERDA) Kota Palu Nomor 9 Tahun 2016 tentang Kelembagaan Adat Kaili. Selain itu pada penjabaran Visi kearifan lokal merupakan bentuk pengakuan Pemerintah Kota Palu untuk menjadikan kearifan lokal sebagai basis dalam pembangunan. Kearifan lokal merupakan bentuk pengetahuan asli masyarakat lembah Kaili yang berasal dari nilai luhur budaya di lembah Kaili yang memiliki relevansi penyelesaian permasalahan kemasyarakatan. Bahkan secara khusus BPBD Kota Palu sebagai leading sektor dalam penanganan bencana menetapkan Visi *"MENUJU KOTA TANGGUH BENCANA BERBASIS KEARIFAN LOKAL "*

Berdasarkan kondisi di atas terkait dengan pengetahuan lokal yang dimiliki oleh masyarakat suku Kaili di Kota Palu, seiring dengan perkembangan jaman dimana Kota Palu telah berkembang pesat menjadi pemukiman yang padat sekaligus menjadi ibukota dari Provinsi Sulawesi Tengah. Selain itu keberadaan kaum migran yang dominan di Kota Palu menyebabkan nilai-nilai pengetahuan asli tidak lagi menjadi sesuatu yang penting dan menarik. Oleh sebagian besar suku Kaili, pengetahuan asli yang dimiliki dan diwariskan secara turun temurun ini masih dijadikan pedoman dalam menjalani kehidupan terkait dengan bencana yang selama ini merupakan bagian dari kehidupan mereka dari waktu ke waktu.

Peristiwa bencana alam yang terjadi pada 28 September 2018 memberikan gambaran nyata betapa pengetahuan asli yang dimiliki oleh suku kaili terbukti secara nyata menyelamatkan mereka dari bencana, terlihat dari korban yang di dominasi oleh penduduk migran yang tidak memiliki pengetahuan tentang lokasi dan wilayah pemukiman yang tidak boleh dihuni karena sejarahnya sebagai bekas lokasi tsunami dan likuifaksi. Oleh penduduk lokal, daerah yang disebutkan dalam Toponimi sudah dihindari untuk dijadikan pemukiman, termasuk tidak menghuni daerah pesisir yang rawan terkena gelombang tsunami.

Hasil wawancara yang dilakukan dengan antropolog sekaligus tokoh masyarakat adat Kaili menjelaskan tentang pentingnya memasukkan unsur pengetahuan asli dalam kegiatan penanganan bencana di Kota Palu sebagai berikut :

Sangat penting memasukkan pengetahuan lokal yang memang telah terbukti efektif dalam mengurangi dampak dan korban jiwa bagi masyarakat di Kota Palu ini, beberapa hal yang bisa dilakukan adalah menyusun regulasi yang bisa mengakomodasi pengetahuan asli ini supaya bisa dipakai oleh masyarakat Kota Palu, tidak hanya oleh suku kaili tapi juga oleh suku migran secara bersama-sama. (Hasil wawancara : 16 Agustus 2023)

Selanjutnya juga disampaikan jika kondisi saat ini, syair Kayori yang menceritakan tentang kejadian bencana tidak pernah lagi dipraktikkan oleh masyarakat termasuk oleh suku kaili sendiri, sehingga perlu ada usaha lain yang dilakukan agar kearifan lokal yang dimiliki tersebut tidak hilang, salah satunya adalah dengan memasukkan pengetahuan asli tersebut ke dalam kurikulum atau muatan lokal pada sekolah dasar, menengah sampai tingkatan atas, sebagai upaya melestarikan pengetahuan tentang bagaimana menghadapi bencana alam yang sewaktu-waktu terjadi tanpa pemberitahuan lebih dahulu.

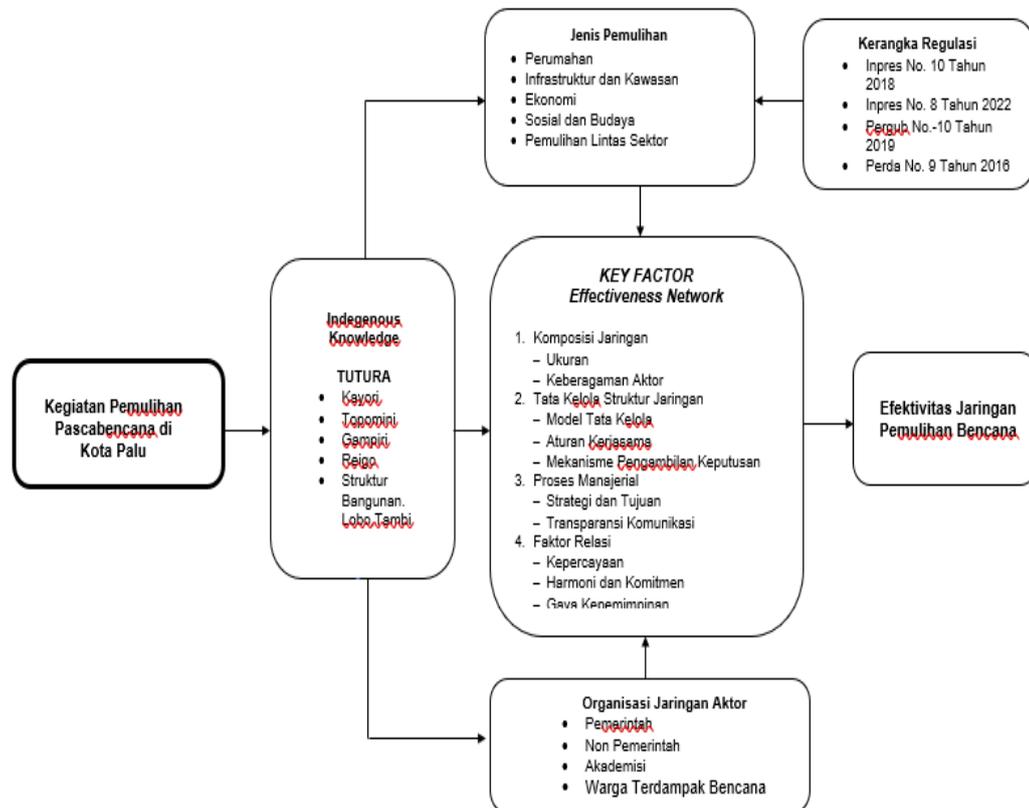
Peran pemerintah dan stakeholder lainnya sangat dibutuhkan dalam upaya mewujudkan pengetahuan lokal ini bisa menjadi bagian dari upaya mencapai efektifitas dalam jaringan pemulihan bencana di Kota Palu. Seperti yang dikemukakan oleh salah seorang anggota lembaga adat yang menyatakan sebagai berikut :

Meski saat ini kami belum menangani aturan adat yang berkaitan dengan penanganan bencana, akan tetapi kedepan jika pemerintah mengatur itu dalam regulasi dan menyerahkan ke lembaga adat untuk membantu dalam mengimplementasikan maka secara pribadi dan lembaga kami siap untuk membantu. Memngingat hal ini penting untuk mencegah jatuhnya banyak korban jiwa dan sebagai pembelajaran dari bencana yang sebelumnya terjadi. (Hasil wawancara: 17 Agustus 2023)

5.7 Implikasi Temuan Penelitian

Berdasarkan hasil penelitian dengan menggunakan analisis *key factor* efektivitas jaringan diperoleh temuan bahwa asumsi dasar yang digunakan ternyata tidak sepenuhnya berjalan sesuai dengan fakta empiris di lapangan. Komposisi jaringan aktor yang terdiri dari ukuran dan keragaman aktor yang besar seharusnya bisa dimanfaatkan dengan maksimal karena tersedianya sumber daya tetapi belum diwujudkan karena tidak melibatkan masyarakat secara aktif dalam kegiatan pemulihan bencana padahal tujuan utama dari kegiatan pemulihan bencana adalah rangkaian kegiatan untuk mengembalikan kondisi normal masyarakat dan lingkungan hidup yang terkena bencana. Aspek struktur jaringan masih menggunakan model tatakelola terpusat dan belum diintegrasikan untuk kepentingan dan kebutuhan organisasi jaringan. Pada dimensi proses manajerial pelaksanaan tugas dan kegiatan dan mekanisme pengambilan keputusan tidak memberikan dukungan terwujudnya efektivitas jaringan pemulihan. Selanjutnya pada dimensi faktor relasi dalam hal kepercayaan, harmoni dan komitmen serta gaya kepemimpinan belum efektif dalam upaya pemulihan pascabencana. Oleh karena itu, berdasarkan sintesa hasil penelitian maka peneliti mencoba merumuskan kerangka konseptual yang ideal untuk

efektifitas model pemulihan bencana seperti pada gambar 5.1 sebagai berikut ini:



Gambar 5 1: Kerangka Konsep Model Efektivitas Jaringan Pemulihan Bencana

Dari gambar diatas dapat dijelaskan bahwa dari hasil penelitian yang dilakukan terhadap model efektivitas jaringan pemulihan bencana di Kota Palu bisa disimpulkan jika konsep dan teori *effectiveness network* yang ada saat ini belum seluruhnya bisa menjawab permasalahan yang dihadapi dalam upaya pemulihan pascabencana, karena belum mampu menciptakan sinergitas antar aktor peserta jaringan yang terlibat termasuk perpaduan budaya dan pengetahuan lokal dengan pengetahuan modern.

Sehingga diperlukan sebuah pendekatan model efektivitas dalam bentuk *indigenous Knowledge* yang dianggap bisa memberi penguatan sebagai kebaruan temuan penelitian yang dilakukan tentang efektivitas jaringan pemulihan pascabencana di Kota Palu.

Dalam penelitian ini, juga terlihat jika *key factor* yang digunakan mengukur efektivitas jaringan saling ternyata saling mempengaruhi satu dengan yang lain. Misalnya pada dimensi transparansi komunikasi yang memiliki kategori rendah akan berkorelasi dengan rendahnya tingkat kepercayaan, begitu juga sebaliknya. Begitu juga pada dimensi transparansi saling mempengaruhi dengan dimensi harmoni dan komitmen antar peserta jaringan aktor. Semakin transparan komunikasi antar sesama peserta jaringan maka akan berpengaruh positif terhadap harmonisasi dan komitmen peserta jaringan.

Temuan penelitian ini mengindikasikan adanya tipe baru, yang bisa memperkaya pengkategorian model efektivitas jaringan dan dirumuskan berdasarkan *key factor* komposisi jaringan, tatakelola struktur jaringan, proses manajerial serta faktor relasi yang telah berlangsung yaitu *Indigenous Knowledges* (Pengetahuan Asli). Tipe ini tidak berdiri sendiri namun merupakan penjabaran lebih lanjut atas tipologi studi jaringan yang sudah ada sebelumnya.

Kegiatan pemulihan pascabencana akan efektif jika didukung oleh pelembagaan organisasi aktor terutama dengan komposisi aktor yang besar serta permasalahan yang kompleks. Aspek pelembagaan ini meski

tidak menjamin efektivitas pelaksanaannya tapi sangat membantu dalam mengatur secara jelas peran dan fungsi stakeholder atau instansi yang terkait dalam penanganan bencana secara terpadu dengan memaksimalkan sumber daya yang dimiliki oleh masing-masing stakeholder, hal ini juga sekaligus untuk semakin mempercepat realisasi kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi sebagaimana harapan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Percepatan Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pascabencana, Gempa Bumi dan Tsunami di Provinsi Sulawesi Tengah dan Wilayah Terdampak Lainnya dan karena tidak bisa diselesaikan sesuai dengan waktu yang ditentukan dilanjutkan dengan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Penuntasan Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pascabencana, Gempa Bumi, Tsunami dan Likuefaksi di Provinsi Sulawesi Tengah.

Tidak efektifnya jaringan dalam upaya pemulihan yang dilakukan di Kota Palu dapat dilihat dari masih banyaknya masalah yang terjadi dalam kegiatan pemulihan termasuk target percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi yang belum terselesaikan. Olehnya berdasarkan sintesa hasil penelitian yang dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa faktor kunci yang digunakan untuk mendorong tercapainya efektivitas jaringan perlu ditambahkan dengan Model *Indigenous Knowledge*.

BAB VI

P E N U T U P

6.1 Kesimpulan

Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis efektivitas jaringan pemulihan pascabencana di Kota Palu, dengan fokus pada komposisi jaringan, struktur jaringan, proses manajerial, dan faktor relasi yang mempengaruhi efektivitasnya.

Berdasarkan rumusan masalah dalam penelitian tentang Model Efektivitas Jaringan Pemulihan Bencana, menunjukkan jika Pemerintah Kota Palu belum efektif dalam upaya pemulihan pascabencana terutama dalam hal rehabilitasi dan rekonstruksi hunian tetap bagi sebagian warga terdampak bencana, yang sampai pada tahun kelima pascabencana masih tinggal di hunian sementara. Berdasarkan variabel model yang digunakan untuk menilai efektivitas jaringan dalam penelitian ini, maka dapat disimpulkan beberapa hal berikut:

1. Komposisi Jaringan.

Hasil analisis menunjukkan bahwa jaringan pemulihan bencana di Kota Palu terdiri dari berbagai macam aktor yang berperan dalam upaya pemulihan. Masuk pada kategori “sangat besar”, baik dari segi jumlah maupun keragaman aktornya. Dijelaskan jaringan yang efektif harus cukup besar untuk membawa beban tetapi tidak terlalu besar untuk dikelola dan memiliki tujuan bersama. Namun, terdapat variasi yang belum terpenuhi dalam komposisi ukuran dan keragaman aktor yang mempengaruhi

efektivitas jaringan dalam hal pelibatan masyarakat kurang diakomodir, meliputi partisipasi dalam perencanaan pemulihan, pelaksanaan program-program pemulihan, dan pembentukan kelompok-kelompok komunitas yang bertujuan untuk membangun ketahanan terhadap bencana dalam organisasi jaringan. Sementara efektivitas jaringan pemulihan bencana juga tergantung pada keterlibatan aktif masyarakat dalam proses pemulihan bencana.

2. Tata Kelola Struktur Jaringan

Tata Kelola struktur jaringan sebagai sebagai salah satu faktor kunci dalam efektivitas pemulihan bencana masih lemah dalam hal koordinasi dan pengintegrasian peserta jaringan akibat banyaknya lembaga yang terlibat mulai dari pemerintah pusat, provinsi dan daerah/kota dengan berbagai masalah yang kompleks yang dihadapi terutama hambatan pembebasan lahan untuk pembangunan huntap. Kota Palu yang memiliki kondisi geografis dan topografi yang rentan terhadap bencana, sehingga keberadaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) yang memiliki fungsi pengendali dan koordinasi penanganan bencana sangat penting dalam menangani situasi darurat dan pemulihan pascabencana belum memiliki Unsur Pengarah dari instansi terkait dan profesionalisme/ahli dalam struktur organisasinya. Aturan kerja sama yang diharapkan menjadi pedoman pembagian tugas kerja serta pembagian tanggung jawab belum mengatur secara rinci pembagian tugas dan masih bersifat umum. Model tata kelola dalam bentuk mekanisme pengambilan

keputusan yang baik yang diharapkan dapat meningkatkan koordinasi dan kolaborasi antara aktor jaringan belum efektif disebabkan dalam sering kali dalam rapat koordinasi hanya diwakilkan kepada staf tidak dihadiri langsung oleh pimpinan organisasi peserta jaringan.

3. Proses Manajerial

Faktor kunci proses manajerial yang efektif, termasuk strategi dan tujuan yang jelas serta komunikasi yang transparan, yang memiliki peran penting dalam memfasilitasi pemulihan pascabencana di Kota Palu, berjalan kurang maksimal akibat penetapan strategi yang tersegmentasi yang dibuat dan dipedomani oleh aktor dari unsur pemerintah, sementara aktor dari sektor sipil dan privat bekerja sesuai dengan strategi masing-masing. Selanjutnya hal yang sama juga terjadi dalam hal transparansi komunikasi yang mensyaratkan akses informasi yang terbuka antar sesama peserta jaringan tidak berjalan dengan baik antar peserta jaringan yang terlibat dalam program pemulihan pascabencana di Kota Palu.

4. Faktor Relasi

Koordinasi antara lembaga terkait: Efektivitas jaringan pemulihan bencana sering tergantung pada kemampuan lembaga-lembaga terkait, seperti pemerintah daerah, organisasi non pemerintah, dan sektor privat untuk berkoordinasi dengan baik. Koordinasi yang efektif memungkinkan aliran informasi yang tepat waktu dan penggunaan sumber daya yang efisien. Faktor relasi seperti kepercayaan, harmoni, komitmen, dan gaya kepemimpinan juga berpengaruh terhadap efektivitas jaringan pemulihan

bencana di Kota Palu. Pada dimensi kepercayaan belum terbangun antar peserta jaringan terutama aktor dari kalangan pemerintah dengan aktor NGO hal ini terjadi selain karena perbedaan kepentingan juga karena komunikasi yang tidak berjalan dengan baik. Dimensi harmoni dalam bentuk keselarasan serta saling memberi dukungan dan komitmen dalam bentuk kesediaan untuk secara aktif berpartisipasi dalam jaringan tidak terjalin dengan baik akibat rendahnya tingkat kepercayaan. Pada aspek gaya kepemimpinan dalam jaringan, dari beberapa gaya yang ada terlihat jika pemimpin jaringan mengadopsi model demokratis dalam penyelenggaraan organisasi jaringan meski tidak berjalan maksimal karena salah satu ciri dari gaya kepemimpinan demokratis yakni memperkuat hubungan antar peserta jaringan belum terwujud.

5. Indigenous Knowledges

Indigenous Knowledge atau pengetahuan asli dapat memainkan peran penting dalam efektivitas jaringan pemulihan bencana. Pengetahuan asli ini dapat membantu masyarakat untuk bersiap menghadapi bencana, saat terjadi bencana, dan pulih dari bencana. Suku Kaili sebagai penghuni lembah palu selama ratusan tahun memiliki pengetahuan asli terkait kemampuan dalam bertahan terhadap berbagai macam bencana alam dan telah menjadikannya sebagai kearifan lokal. Prasyarat untuk menjadikan pengetahuan lokal sebagai model dalam mendorong efektifnya jaringan aktor yang bekerja dalam penanganan bencana sangat memungkinkan, karena dukungan masyarakat Kota Palu yang masih memegang adat

istiadat, Visi Misi pemerintah kota yang mengakui kearifan lokal, adanya perangkat adat dan regulasi berupa perda tentang kelembagaan adat.

6.2 Saran

6.2.1 Aspek Akademis

1. Penelitian tentang model efektivitas jaringan dalam pemulihan bencana tergolong baru dalam lingkup organisasi jaringan, ada 4 faktor kunci yang digunakan sebagai model untuk menilai sejauh mana efektivitas jaringan organisasi dalam pemulihan pascabencana di Kota Palu digunakan dalam penelitian ini. Faktor-faktor kunci tersebut belum cukup untuk mewujudkan efektivitas pada tingkat jaringan pemulihan dalam pemulihan pascabencana. Berdasarkan pada hasil penelitian ditawarkan sebuah model *Indigenous Knowledge* untuk pencapaian efektivitas organisasi jaringan sebagai referensi model dalam penelitian efektivitas organisasi jaringan.
2. Dalam rangka perkembangan penelitian ilmiah, penelitian ini perlu ditindaklanjuti dengan penelitian lanjutan dengan berbagai perspektif terkait efektivitas jaringan organisasi pemulihan pascabencana, seperti perspektif *prilaku (behavioral approach)* perspektif budaya (*culture approach*) perspektif konflik (*conflict approach*) perspektif pelayanan publik (*public service*) dan berbagai perspektif lainnya. Dari sisi tahapan manajemen bencana penelitian berikutnya dikembangkan pada tahapan pra bencana dan pada fase tanggap darurat.

6.2.2 Aspek Praktis

Berdasarkan simpulan hasil penelitian yang dilakukan, berikut ini saran dalam hal praktis untuk diimplementasikan, yang diharapkan akan memperbaiki program pemulihan pascabencana dan memastikan efektivitas dalam pencapaian tujuan yang lebih baik di masa depan.

1. Melakukan evaluasi menyeluruh terhadap jaringan pemulihan pascabencana di Kota Palu dengan meninjau struktur organisasi, kebijakan, prosedur, dan mekanisme koordinasi yang ada serta mengidentifikasi kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman yang dapat mempengaruhi efektivitas jaringan pemulihan pascabencana. Melibatkan masyarakat secara aktif dalam perencanaan, implementasi, dan evaluasi kegiatan pemulihan bencana serta membangun sistem pemantauan dan evaluasi berkelanjutan untuk memonitor progres dan efektivitas jaringan pemulihan bencana di Kota Palu.
2. Organisasi jaringan terutama pada daerah rentan bencana perlu dilembagakan dalam bentuk Dewan atau Forum Penanggulangan Bencana Daerah yang terdiri dari stakeholder terkait dan berkompeten, termasuk pihak non pemerintah seperti DPRD, LSM, media massa, perguruan tinggi, ormas, lembaga adat, kalangan swasta, pengusaha dan komunitas peduli bencana. Dewan atau Forum ini menjadi satu kesatuan dalam proses perumusan, implementasi sampai kepada monitoring dan evaluasi pada berbagai tingkat kegiatan penanggulangan bencana.

3. Membangun Kolaborasi dengan daerah terdampak bencana, termasuk dengan organisasi internasional, lembaga donor, dan negara lain dapat membantu dalam memperoleh sumber daya, pendanaan, dan pengetahuan yang diperlukan untuk meningkatkan efektivitas jaringan pemulihan bencana di Kota Palu. Menggunakan pendekatan jangka panjang yang meliputi rekonstruksi fisik, pemulihan ekonomi, rehabilitasi psikososial, dan pembangunan ketahanan terhadap bencana untuk mencapai pemulihan secara berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku & E Book

- Alamsyah A. Ramadhani D.P. 2020. Social Network Analysis Konsep dan Praktis, Bandung. CV. Sadari.
- Alwi, 2018. Kolaborasi dan Kinerja Kebijakan, Makassar. Kedai Buku Jenny.
- Bungin Burhan. 2010. Metodologi Penelitian Kualitatif. Jakarta. PT. Raja Grafindo Persada.
- Creswell, John W. 2015. Penelitian Kualitatif & Desain Riset. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Frederickson, H. George. 1997. The Spirit of Public Administration, (Jossey-Bass Publisher: San Fransisco,), p.8-14.
- Handyaningrat, Soewarno. 1990. Pengantar Study Administrasi Dan Manajemen.. CV Haji Masagung. Jakarta.
- Haynes, Philip. 2003. Managing Complexity In The Public Services. United Kingdom; : Bell & Bain Ltd, Glasgow.
- Hidayat, S. (2016). Menimbang Ulang Konsep Good Governance: Diskursus Teoretis. *Masyarakat Indonesia*, 42(2), 152–165.
- Jones C, Hesterly WS, Borgatti SP. 1997. A general theory of network governance: exchange conditions and social mechanisms. *Academy of Management Review* 22(4): 911–945
- Kickert, W.J.M., E.H. Klijn, J.F.M. Koppenjan (eds.) *Managing Complex Networks*, Sage, London. 1997
- Klijn, E.H. & Koppenjan, J. 2016. *Governance Networks in the Public Sector*. New York: Routledge.
- Klijn, E-H., Koppenjan, J. & Termeer, K.. 1995. *Managing Networks in the Public Sector: A Theoretical Study of Management Strategies in Policy Networks*. Public Administration.
- Koliba, C., Meek, J.W. & Zia, A. 2010. *Governance Networks in Public Administration and Public Policy*. Florida: CRC Press.

- Koliba, Christopher; Jack W. Meek; Asim Zia.. Governnace Networks in Public Administration and Public Policy. Boca Raton (USA): CRC press. 2018
- Moh. Nazir, Efektivitas Dalam Pembinaan Masyarakat Industri, Makalah (Banda Aceh: MUI, 1987).
- Nurjanah Dkk, 2013. Manajemen Bencana, Bandung. Alfabeta.
- Palogai, Ibe S.Lala Bohang.2021. Kayori Seni merekam Bencana. Yogyakarta. Basabasi.
- Rhodes, R. A. W. (1996). The New Governance: Governing without Government. *Political Studies*, 44(4), 652–667. <https://doi.org/10.1111/j.1467-9248.1996.tb01747>.
- Richard M. Steers, 1999. Efektivitas Organisasi, Jakarta. Pustaka Pelajar, h.53.
- Sarantakos, S., 1993, Social Research, Melbourne: Mac Millan Education Australia Pty Ltd.
- Scott, 2000. Social Network Analysis. A hand book, Second Edition. California. SAGE Publications Inc.
- Sjamsiar Sjamsuddin. 2006. Kepemerintahan Dan Kemitraan.Yayasan Pembangunan Nasional. Malang.
- Sørensen, E. Democratic Theory and Network Governance. *Administrative Theory & Praxis*.2002.
- Sørensen, E., and J. Torfing (eds) (2007) *Theories of Democratic Network Governance*,
- Steers, M Richard. Efektivitas Organisasi. (Jakarta: Erlangga 1985) hal. 53
- Sugiyono. 2011. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Bandung. Afabeta.
- Sugiyono. 2015. Metode Penelitian Kombinasi (Mix Methods). Bandung. Alfabeta.
- Sukmadinata, Nana Syaodih. 2009. Metode Penelitian Pendidikan. Bandung: Remaja Rosdakarya,

Turrini, et. al. 2010. Networking Literature About Determinants Of Network Effectiveness. Public Administration Vol. 88, No. 2, Blackwell Publishing Ltd, 9600 Garsington Road, Oxford (528–550)

Yusriadi, 2018. Reformasi Birokrasi Dalam Pelayanan Publik, Yogyakarta, Deep Publish. CV. Budi Utama.

B. Jurnal

Autoridad Nacional del Servicio Civil. (2021). 濟無No Title No Title No Title. *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952., 2013–2015. <https://doi.org/10.1111/conl.12311>.This

Bogdanova, E., Tkach, O., & Aasland, A. (2016). Network governance in Russia: Costs and benefits. *Demokratizatsiya*, 24(2), 139–142.

Bonso, H., & Suranto, S. (2018). Effectiveness Network Governance In Making of Special Regional Regulations In Papua Province. *Journal of Governance and Public Policy*, 5(3). <https://doi.org/10.18196/jgpp.53101>

Davis, G. L., & Robbin, A. (2015). Network Disaster Response Effectiveness: The Case of ICTs and Hurricane Katrina. *Journal of Homeland Security and Emergency Management*. <https://doi.org/10.1515/jhsem-2014-0087>

Hans-Klijn dalam Laia Martinez. Governance Network As Collaborative Platforms For Innovation In The Public Sector. 2011.Paper for the PhD course about Network Governance: Theories, Methods and Practices. RUC.

Hill, Carolyn J., and Laurence E. Lynn Jr. 2005. Is hierarchical governance in decline? Evidence from empirical research. *Journal of Public Administration Research and Theory* 15:173–95.

Hiwasaki, L., Luna, E., Syamsidik, & Marçal, J. A. (2015). Local and indigenous knowledge on climate-related hazards of coastal and small island communities in Southeast Asia. *Climatic Change*, 128, 35-56.

Howes, M., Tangney, P., Reis, K., Grant-Smith, D., Heazle, M., Bosomworth, K., & Burton, P. (2015). Towards networked governance: improving interagency communication and collaboration for disaster risk management and climate change adaptation in Australia. *Journal*

of *Environmental Planning and Management*, 58(5), 757–776.
<https://doi.org/10.1080/09640568.2014.891974>

Jacob Torfing, E-Journal, 2005. governance network theory : towards a second generation, Department of Social Sciences, Roskilde University, Denmark

Jenkins, W.O. "Collaboration over Adaptation". 2006. *Public Administration Review*, hal. 66,

Jones, Candace, William Hesterly dan Stephen Borgatti, 1997. A General Theory of Network Governance: Exchange Condition and Social Mechanism, *Academy of Management Review*, 22 (4)

Kim, Junki. Networks, 2006. Network Governance, And Networked Networks Graduate School of Public Administration, Seoul National University, South Korea. Hal. 28

Klijn, E-H., Koppenjan, J. & Termeer, K. 1995. Managing Networks in the Public Sector: A Theoretical Study of Management Strategies in Policy Networks. *Public Administration* 73(3): 437-454.

Muzwardi, A. (2015). The Analysis of Network Governance in The Investment Development of Free Trade Zone and Free Port (KPBPB) Batam. *JKAP (Jurnal Kebijakan Dan Administrasi Publik)*, 19(2), 144.
<https://doi.org/10.22146/jkap.9827>

Nahapiet, Janine dan Ghoshal, Sumantra. 1998. Social Capital, Intellectual Capital, And The Organizational Advantage. *Academy of Management. The Academy of Management Review* 23, (2)

Nazir, Mohammad, 1997. Efektivitas Dalam Pembinaan Masyarakat Industri, Makalah (Banda Aceh: MUI).

Planko, J., Chappin, M. M. H., Cramer, J. M., & Hekkert, M. P. (2017). Managing strategic system-building networks in emerging business fields: A case study of the Dutch smart grid sector. *Industrial Marketing Management*, 67 (April 2016), 37–51.
<https://doi.org/10.1016/j.indmarman.2017.06.010>

Provan Keith G. Kenis Patrick N. 2008. Modes of network governance: Structure, management, and effectiveness. *Journal of Public Administration Research and Theory* 18 (2):229–252.

- Provan, K.G. & Milward, H.B. 1995. "A Preliminary Theory of Interorganizational Network Effectiveness: A Comparative Study of Four Community Mental Health Systems". *Administrative Science Quarterly* 40 (1): 1-3
- R. Gulati et al. 2011. How do networks matter? The performance effects of interorganizational networks, *Research in Organizational Behavior* 31. Elsevier. 207–224
- Raab, J., Mannak, R.S. and Cambre', B., (2013), "Combining structure, governance and cultural context:A configurational approach to network effectiveness", *Journal of Public Administration Research and Theory*.
- Sørensen, Jacob Torfing, The democratizing impact of governance networks: From pluralization, via democratic anchorage, to interactive political leadership, *Public Administration*, (2018). (302-317),
- Treib, Oliver & Bähr, Holger & Falkner, Gerda. (2005). Modes of Governance: A Note Towards Conceptual Clarification. *European Governance Papers*, N-05-02, 2005.
- Autoridad Nacional del Servicio Civil. (2021). 濟無No Title No Title No Title. *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952., 2013–2015. <https://doi.org/10.1111/conl.12311>.This
- Bogdanova, E., Tkach, O., & Aasland, A. (2016). Network governance in Russia: Costs and benefits. *Demokratizatsiya*, 24(2), 139–142.
- Bonso, H., & Suranto, S. (2018). Effectiveness Network Governance In Making of Special Regional Regulations In Papua Province. *Journal of Governance and Public Policy*, 5(3). <https://doi.org/10.18196/jgpp.53101>
- Davis, G. L., & Robbin, A. (2015). Network Disaster Response Effectiveness: The Case of ICTs and Hurricane Katrina. *Journal of Homeland Security and Emergency Management*. <https://doi.org/10.1515/jhsem-2014-0087>
- Howes, M., Tangney, P., Reis, K., Grant-Smith, D., Heazle, M., Bosomworth, K., & Burton, P. (2015). Towards networked governance: improving interagency communication and collaboration for disaster risk management and climate change adaptation in Australia. *Journal of Environmental Planning and Management*, 58(5), 757–776.

<https://doi.org/10.1080/09640568.2014.891974>

Muzwardi, A. (2015). The Analysis of Network Governance in The Investment Development of Free Trade Zone and Free Port (KPBPB) Batam. *JKAP (Jurnal Kebijakan Dan Administrasi Publik)*, 19(2), 144. <https://doi.org/10.22146/jkap.9827>

Vasavada, T. (2013). Managing Disaster Networks in India: study of structure and effectiveness. *Public Management Review*, 15(3), 363–382. <https://doi.org/10.1080/14719037.2013.769854>

Waugh, W., & Streib, G. (2006). Collaboration and Leadership for Effective Emergency Management. *Public Administration Review*, 66,

William O. Jenkins. Collaboration over Adaptation: 2006. The Case for Interoperable Communications in Homeland Security. *Public Administration Review*.

C. Sumber Lain

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaga Negara RI tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4723);

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaga Negara RI tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4723);

Peraturan Pemerintah RI Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Pasal 71 Ayat (3);

Peraturan Pemerintah RI Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana;

Peraturan Presiden RI Nomor 8 Tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana;

Peraturan Presiden RI Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

Peraturan Presiden RI Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019;

Instruksi Presiden (INPRES) Nomor 10 Tahun 2018 tentang Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Gempa Bumi dan Tsunami di Provinsi Sulawesi Tengah dan Wilayah Terdampak Lainnya.

Instruksi Presiden (INPRES) Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penuntasan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Gempa Bumi dan Tsunami di Provinsi Sulawesi Tengah dan Wilayah Terdampak Lainnya

Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Pedoman Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pascabencana.

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sulawesi Tengah Nomor. 10 Tahun 2019 tentang Rencana Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pascabencana.

Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 5 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2011 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 5)

Chori, Eril Obeit, 2020. Diakses pada 3 Maret 2022. Penjelasan Lengkap Tentang Social Network Analysis. <https://qwords.com/blog/social-network-analysis/>.

Republika. Co.id. Diakses pada 3 Maret 2021. Kerugian Bencana di Sulteng Meningkat Jadi Rp 18,48 Triliun | Republika Online.

skp-ham.org, Diakses pada 2 Oktober 2021 Catatan Pemantauan (skp-ham.org) usulan untuk pemprov : percepatan penyediaan hunian tetap.

Kumparan,com. Diakses pada 13/08/2019)
<https://kumparan.com/paluposo/tim-menkopolhukam-pantau-penyebab-lambatnya-penanganan-bencana-sulteng>.

Kabarselebes.id diakses pada (8/08/2020)
<https://www.kabarselebes.id/berita/2020/08/08/dansatgas-banyak-masalah-penanganan-pascabencana-di-sulteng/>

Walhi.or.id diakses pada (28/09/2019) <https://www.walhi.or.id/walhi-sulawesi-tengah-satu-tahun-penanganan-bencana-korban-masih-terlantar>

Beritasatu. com diakses pada (6/11/2020)
https://www.beritasatu.com/nasional/695441/sulteng_bergerak_minta_isu_penanganan_bencana_jadi_prioritas_debat_calon_walikota_palu.

Law justice, co diakses pada (6/10/2018) https://www.law-justice.co/artikel/53192/ironisnya_penanganan_bencana_gempa_bumi_dan_tsunami_di_sulawesi_tengah.

Tribunnews. com. Diakses pada (11/05/2019)
https://palu.tribunnews.com/2019/05/11/ombudsman_sulteng_nilai_penanggulangan_bencana_di_sulteng_carut_marut

Tempo. Co. diakses pada (27/09/2019)
https://www.tempo.co/abc/4773/setahun-gempa_tsunami_palu_ribuan_korban_masih_tinggal_di_tenda_pengungsian

youtube suara penyintas 2019. Diakses pada (14/09/2020)
<https://www.youtube.com/watch>.

Antaraneews.com diakses pada (21/01/2020)
https://www.antaraneews.com/berita/1258080/dprd-sulteng_bentuk_pansus_percepatan_pemulihan_pascabencana

Antaraneews.com diakses pada (10/11/2020)
https://www.antaraneews.com/berita/1831224/bnpp_harap_pemda_di_sulteng_transparan_kelola_dana_hibah_rehab_rekon.

www.sultengbergerak.org diakses pada (04/6/2021)
<https://www.sultengbergerak.org/4-255-kk-penyintas-palu-belum-terima-huntap/>

(<https://www.bbc.com/indonesia/media-50080408>) diakses pada (21/01/2022)

LAMPIRAN – LAMPIRAN

Lampiran 1: Surat Izin dan Rekomendasi Penelitian



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS HASANUDDIN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK PROGRAM PASCASARJANA
KAMPUS TAMALANREA
JALAN PERINTIS KEMERDEKAAN KM. 10 MAKASSAR 90245
TELEPON (0411) 585 024 /FAX (0411) 585 024

Nomor : 3136/UN4.8.1/PT.01.04/2022
Lamp. : Proposal Penelitian
Hal : **Permohonan Izin Penelitian**

28 Maret 2022

Yang Terhormat:
Kepala Satuan Tugas Penanganan Bencana
Provinsi Sulawesi Tengah
di-
Palu

Dengan hormat, kami mohon kebijaksanaan Bapak kiranya berkenan memberi izin dan bantuan untuk melakukan penelitian kepada mahasiswa Program Pascasarjana Fisip Universitas Hasanuddin yang tersebut di bawah ini :

Nama : **MUHAMMAD ARIEF**
Nomor Pokok : E013191010
Program : Doktor (S3)
Program Studi : Administrasi Publik
Judul Disertasi : Model Efektivitas Jaringan dalam Pemulihan Bencana di Kota Palu Provinsi Sulawesi Tengah.
Pembimbing : Prof. Dr. Muh. Akmal Ibrahim, M.Si. (Promotor)
Dr. Badu Achmad, M.Si. (Ko-Promotor)
Dr. Suryadi Lambali, MA. (Ko-Promotor)
Waktu Penelitian : 28 Maret 2022 - Sampai Selesai

Atas izin dan bantuan Bapak disampaikan terima kasih.

a.n. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik,
Riset dan Inovasi,

Dr. Phil. Sukri, SIP, M.Si.
NIP. 19750818 200801 1 008

Tembusan Kepada Yth.:

1. Dekan Fisip Unhas;
2. Wakil Dekan Bidang Perencanaan, Keuangan dan Sumber Daya
3. Mahasiswa yang bersangkutan;
4. Arsip.



PEMERINTAH KOTA PALU
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Jalan WR. Supratman No. 15 Telp. (0451) 426122

SURAT REKOMENDASI PENELITIAN

Nomor : 071/150-19/Bk8p/2022

- Dasar : a. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- b. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penerbitan Surat Keterangan Penelitian.
- Menimbang : Surat Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset Dan Teknologi Universitas Hasanuddin Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Program PascaSarjana Nomor 3136/UN4.8.1/PT.01.04/2022 Tanggal 28 Maret 2022 hal Permohonan Izin Penelitian Survey/Research/ Skripsi.

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Palu, memberikan rekomendasi kepada :

1. Nama : **MUHAMMAD ARIEF**
2. Alamat : Jl. Perdost untad Blok BA No. 20
3. No HP : 085220400660
4. Pekerjaan : PNS

Untuk : Melakukan penelitian dalam rangka penyusunan karya ilmiah (skripsi/tesis/tugas akhir, dsb) dengan rincian sebagai berikut :

- a. Judul proposal : **"MODEL EFEKTIVITAS JARINGAN DALAM PEMULIHAN BENCANA DI KOTA PALU PROVINSI SULAWESI TENGAH ."**
- b. Tempat lokasi : KOTA PALU
- c. Bidang Penelitian : ADMINISTRASI PUBLIK
- d. Waktu Penelitian : Maret - Desember 2022
- e. Penanggungjawab : Prof Dr. M. Akmal Ibrahim, MSi
- f. Status penelitian : Baru
- g. Tim peneliti : -
- h. Nama Lembaga : **UNIVERSITAS HASANUDDIN**

Ketentuan yang harus ditaati adalah :

1. Sebelum melakukan kegiatan terlebih dahulu melapor kepada Pejabat setempat/lembaga swasta yang akan dijadikan obyek lokasi penelitian;
2. Tidak dibenarkan melakukan kegiatan yang tidak sesuai atau tidak ada kaitannya dengan judul penelitian sebagaimana di maksud di atas;
3. Harus menaati semua ketentuan peraturan yang berlaku;
4. Surat rekomendasi penelitian ini akan dicabut/batal, apabila pemegang surat rekomendasi tidak menaati ketentuan yang berlaku;
5. Melaporkan hasil penelitian kepada Wali Kota Palu cq. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Palu.

Demikian Surat Rekomendasi Penelitian ini di buat untuk dipergunakan seperlunya dan berlaku 1 (satu) tahun sejak tanggal diterbitkan.

Palu, 19 April 2022

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA PALU



ANSYAR SUTIADI, S.Sos., M.Si
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 19721213 199203 1 004

Tembusan :

1. Wali Kota Palu (sebagai Laporan);
2. Yang Bersangkutan.

Lampiran 2. Instrument Wawancara

DAFTAR PERTANYAAN PENELITIAN

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,

Beberapa Daftar pertanyaan dibawah ini adalah beberapa hal terkait dengan indikator-indikator yang digunakan dalam penelitian yang berjudul “Model Efektifitas Jaringan Pemulihan Bencana Di Kota Palu Provinsi Sulawesi Tengah”. Jawaban yang Bapak/Ibu Berikan tidak akan mempengaruhi keberadaan Bapak/Ibu secara personal maupun di Tempat Kerja karena penelitian ini semata-mata untuk kepentingan Akademik. Olehnya itu diharapkan Bapak/Ibu dapat memberikan informasi yang objektif dan valid mengenai fenomena yang ada terkait dengan penelitian ini. Atas bantuan dan partisipasinya saya ucapkan banyak terima kasih. Wassalam

IDENTITAS INFORMAN

Nama :

Umur :

Jenis Kelamin :

Pendidikan Terakhir :

Afiliasi/Alamat :

A. KOMPOSISI JARINGAN

I. Ukuran Aktor.

1. Apa yang anda ketahui dengan organisasi jaringan pemulihan bencana di Kota Palu?
.....
2. Bagaimana pendapat anda tentang adanya organisasi jaringan pemulihan bencana?
.....
3. Siapa saja yang terlibat dalam orgnisasi jaringan pemulihan bencana?
.....
4. Apakah aktor/lembaga yang terlibat dalam organisasi jaringan yang terlibat saat ini terlalu banyak atau sedikit ?

5. Bagaimana dengan peran masing2 aktor yang terlibat dalam organisasi jaringan?
.....

II. Keragaman Aktor.

1. Apa peran anda/organisasi dalam organisasi jaringan pemulihan bencana?
.....
2. Menurut anda apakah latar belakang aktor yang terlibat telah memenuhi kebutuhan organisasi jaringan?
.....
3. Sumber daya apa yang anda miliki dan telah digunakan dalam organisasi jaringan?
.....
4. Bagaimana anda memanfaatkan sumber daya anda/organisasi di dalam organisasi jaringan?
.....

B. STRUKTUR TATAKELOLA JARINGAN

I. Model Tatakelola.

1. Menurut anda, bagaimana seharusnya program dalam pemulihan bencana ini dilakukan?
.....
2. Bagaimana proses tatakelola dalam jaringan organisasi dibuat dan disepakati ?
.....
3. Faktor-faktor apa yang mempengaruhi dalam penyusunan tata kelola ?
.....
4. Menurut anda bagaimana seharusnya tatakelola dibuat dan dijalankan dalam organisasi jaringan?
.....

II. Aturan Kerjasama.

1. Adakah aturan kerjasama yang digunakan dalam dalam organisasi jaringan?
.....
2. Bagaimana aturan kerjasama tersebut disepakati?
.....
3. Apakah aturan yang disepakati tersebut dalam bentuk formal atau informal?
.....
4. Apakah aturan yang ada meningkatkan saling percaya antar peserta jaringan ?
.....
5. Apakah aturan kerjasama tersebut meningkatkan keadilan bagi semua anggota jaringan atau sebaliknya membuat hubungan kerjasama berlangsung kaku atau tidak fleksibel ?
.....

6. Se jauh apa aturan kerjasama yang ada dalam mendukung upaya pencapaian tujuan jaringan?
.....

C. PROSES MANAJERIAL

I. Strategi Dan Tujuan

1. Apakah ada strategi dan tujuan yang dibuat didalam organisasi jaringan ?
.....
2. Adakah visi dan misi yang jelas ?
.....
3. Apakah ada penetapan tujuan dan sasaran bersama dalam organisasi jaringan ?
.....

II. Transparansi Komunikasi

1. Bagaimana komunikasi antar peserta jaringan komunikasi dibangun/dibuat?
.....
2. Media apa yang digunakan oleh peserta jaringan dalam berkomunikasi?
.....
3. Apakah komunikasi yang dijalankan secara jelas dan transparan ?
.....
4. Apakah komunikasi yang terjadi melibatkan semua peserta organisasi jaringan?
.....
.....

D. FAKTOR RELASIONAL

I. Kepercayaan

1. Apakah anda memiliki keyakinan dengan tujuan organisasi jaringan dalam pencapaian tujuan ?
.....
2. Apakah anda yakin jika peserta dalam organisasi jaringan lainnya bersungguh2 dalam pencapaian tujuan organisasi jaringan ?
.....

II. Harmoni dan Komitmen.

1. Bagaimana anda berhubungan dengan peserta organisasi jaringan?
.....
2. Apa komitmen anda terhadap organisasi jaringan ?
.....
3. Bagaimana anda mengelola perbedaan didalam organisasi jaringan ?

-
4. Apakah ada perencanaan dan koordinasi dalam mengatasi serta mengelola konflik yang mungkin timbul dalam organisasi jaringan?
.....

III. Gaya Kepemimpinan

1. Menurut anda seperti apa manajer jaringan mengelola organisasi jaringan?
.....
2. Apa kewenangan dan kompetensi yang dimiliki oleh manajer jaringan?
.....
3. Apakah manajer dalam mengambil keputusan dilakukan secara partisipatif dan tidak memihak ?
.....
4. Apakah manajer organisasi jaringan memiliki kemampuan menginspirasi dan memotivasi anggota organisasi jaringan?
.....

-----Terima Kasih-----

Lampiran 3. Dokumentasi Kegiatan Penelitian



Wawancara dengan Kepala Pelaksana BPBD Kota Palu



Wawancara dengan Kepala Bidang Perlindungan Sosial Masyarakat Dinsos Kota Palu.



Wawancara dengan Kabid. Perumahan. Dinas Perumahan dan Pemukiman Kota Palu.



Wawancara dengan Kasi. Perumahan. Dinas Perumahan dan Pemukiman Kota Palu.



Wawancara dengan Sekretaris Bappeda Kota Palu



Wawancara dengan PPK Balai Prasarana dan Permukiman Wilayah Sulawesi Tengah.

Lampiran 4. Dokumentasi Kegiatan Pemulihan Bencana



Diskusi Walikota Palu tentang usaha pemulihan ekonomi bagi warga terdampak bencana.



Lokasi pembangunan hunian tetap warga terdampak bencana.



Aktivitas pembangunan hunian tetap



Contoh rumah hunian tetap bagi warga terdampak bencana di Kota Palu



Pelatihan pemberdayaan ekonomi pascabencana di Kota Palu



Penyerahan bantuan modal usaha bagi warga terdampak bencana di Kota Palu

